

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN**  
Tema Paket 6 Akses Masyarakat Adat

Periode 2020-2022

# **Berangkat dari Adat:**

**Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat**

Didukung oleh: Program Hibah COREMAP-CTI World Bank, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)





## **LAPORAN AKHIR KEGIATAN**

### **Tema Paket 6 Akses Masyarakat Adat**

**Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat**

**Disusun oleh:**

**YAYASAN PILI**

**Didukung oleh:**

**Program Hibah COREMAP-CTI World Bank  
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)**

**Alamat Lembaga:**

**Jl. Tumenggung Wiradireja No.216, Cimahpar, Bogor Utara, 16155**

**April 2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	2
1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan	2
1.4. Metodologi Strategi Pendekatan yang Dijalankan	3
1.5. Informasi Ringkas Organisasi dan Proyek	7
2. PELAKSANAAN PROGRAM	8
2.1. Kerangka Kerja ( <i>Logical Framework</i> )	8
2.2. Kemajuan dan Pencapaian Masing-masing <i>Output</i>	21
2.3. Hambatan dalam Pencapaian <i>Output</i> dan Upaya Mengatasi	29
2.4. Penyerapan Anggaran	30
3. INFOGRAFIS HASIL PROGRAM	44
3.1. Sarana dan Prasarana	44
3.2. Peningkatan Kapasitas	44
3.3. Kajian, Survei, dan BMPs	46
3.4. Modul, Kajian, Surat Keputusan, dan Mekanisme Kerja/SOP yang Dihasilkan	47
4. ENVIRONMENT AND SOCIAL ACTION PLAN (ESAP), GENDER INCLUSION PLAN, DAN PELAKSANAANNYA	49
4.1. Tindakan Terkait Dampak Sosial dan Lingkungan	49
4.2. Inklusi Gender	50
5. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROYEK	51
5.1. Dampak Proyek Terhadap Masyarakat/Pemerintah/Lingkungan	51
6. INOVASI DAN TEROBOSAN	55
7. PEMBELAJARAN	57
8. REKOMENDASI PENTING SEBAGAI TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL/ <i>OUTPUT</i> SETELAH PROGRAM BERAKHIR DAN TANTANGANNYA	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Kerja atau LFA	8
Tabel 2 Capaian <i>Output</i>	21
Tabel 3 Matriks Serapan Output Vs Program	31

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah pada tahun 2022 ini, Yayasan PILI bisa menyelesaikan proyek ICCTF dukungan Coremap-CTI, Bappenas dari World Bank. Proyek yang dikerjakan Yayasan PILI dalam paket 6 berjudul “Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Taman Nasional Laut Sawu (TNP Laut Sawu) dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat.”

Bicara soal adat, PILI menginisiasi dan mengawal penerbitan Surat Keputusan Bupati terkait pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) ataupun Panitia MHA di masing-masing kabupaten yang telah ditunjuk sebagai *pilot site*. Begitu juga dukungan kajian akademik untuk mendukung proses identifikasi dan verifikasi wilayah KMHA di dua kabupaten sebagai rencana kerja Panitia atau Pokja KMHA di Rote Ndao maupun di Raja Ampat.

Pembentukan kelompok di tingkat KMHA yaitu tingkat desa/kampung untuk pengembangan perikanan dan penyusunan rencana pengelolaan perikanan berbasis adat juga sudah terlaksana. Selain itu proses pendampingan kelompok dalam implementasi RPP dan juga dukungan pengadaan peralatan untuk mengembangkan usaha perikanan juga sudah dilakukan di 3 KMHA. Hal terakhir untuk jembatan dukungan para pihak sudah ada penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan antara kelompok dengan dinas terkait di dua kabupaten juga sudah dilakukan.

Selebihnya kajian dampak yang dilakukan di tiga KMHA telah ada perubahan di tingkat kelembagaan, pengetahuan dan persepsi masyarakat terkait usaha perikanan. Dari kegiatan yang dilakukan telah disusun buku pembelajaran terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan dan akan dituliskan dalam pembelajaran praktik terbaik (*best management practices* - BMPs). Buku pembelajaran itu terkait perlindungan dan pengakuan KMHA, pendampingan pengelolaan perikanan berbasis hak (*right-based fisheries management* [RBFM]), rencana pengelolaan perikanan, dan kemitraan. Semoga kegiatan ini bisa menjadi pembelajaran di tempat lain untuk lebih baik lagi.

**Tim Pelaksana Yayasan PILI**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hasil analisis citra satelit resolusi tinggi tahun 2011 menunjukkan adanya 5.019,53 hektare mangrove dan 5.320,62 hektare lamun di dalam kawasan Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, dengan luasan paling besar berada di Kabupaten Sumba Timur dan di Kabupaten Rote Ndao (Sumber: Laporan TNC Sawu Sea, 2011). Hasil monitoring sesuai Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (EKKP3K) oleh BKKPN Kupang dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6/Kepmen-KP/ 2014 tentang rencana pengelolaan dan zonasi TNP Laut Sawu dan sekitar di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014-2034, menunjukkan bahwa tekanan dan praktik yang merusak telah berdampak pada kelestarian ekosistem laut dangkal di TNP Laut Sawu (terutama mangrove, lamun, dan terumbu karang), dengan tingkat kerusakan rata-rata mencapai 70%. Berdasar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), kondisi pemanfaatan berlebihan (untuk ikan karang, udang penaeid, kepiting, dan cumi-cumi) telah terjadi di wilayah Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao.

Kondisi ekologis perairan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat yang terletak Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat masih tergolong baik. Warga dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat saat ini mengandalkan wisata bahari sebagai tulang punggung sektor ekonomi dan pembangunan wilayah. Keanekaragaman hayati yang tinggi dan pemandangan alam yang luar biasa menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke Raja Ampat.

Karakteristik fisik perairan Kepulauan Raja Ampat amat mendukung biota perairan khususnya terumbu karang karena kedalaman perairan yang relatif dangkal, kejernihan air, dan intensitas cahaya matahari yang cukup. Lokasi perairan Kepulauan Raja Ampat yang berada pada kawasan perairan bebas (cukup jauh dari daratan) diduga menyebabkan pengaruh bahan-bahan tersuspensi yang berasal dari aktivitas daratan sangat kecil.

Pada umumnya mata pencaharian penduduk di kampung-kampung sekitar Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat hampir sama dengan mata pencaharian penduduk di pulau-pulau kecil lainnya yaitu sebagai nelayan. Mata pencaharian sampingan dengan berkebun atau mengumpulkan hasil hutan di sekitar kampung. Hasil tangkapan ikan utamanya untuk konsumsi keluarga. Wilayah tangkap nelayan biasanya hanya di perairan dan pulau-pulau sekitar kampung. Di beberapa kampung terdapat Lembaga

Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang pembentukannya difasilitasi oleh Coremap-CTI II Raja Ampat.

Kegiatan ini akan memperkuat penerapan konsep “wilayah penangkapan ikan” oleh dan untuk kelompok masyarakat (khususnya kesatuan masyarakat hukum adat atau KMHA) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (percontohan di Kabupaten: Rote Ndao) dan Provinsi Papua Barat (percontohan di Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat) sebagai pelaku penting bagi pengembangan kemitraan konservasi TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat secara berkelanjutan.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

### **1.2.1 Tujuan**

Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola sumber daya pesisir dan perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat (*indigenous people right*) di wilayah TNP Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan SAP Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

### **1.2.2 Sasaran**

1. Menguatnya kelembagaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat.
2. Berkembangnya praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal oleh kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA).
3. Implementasi rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (*right-based sustainable fisheries management* [RB-SFM]) di wilayah kabupaten sasaran.
4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan proyek.
5. Terselenggaranya tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan proyek.

## **1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Lingkup kegiatan ini, mencakup:

1. Penguatan dukungan kebijakan pemda kabupaten/provinsi di dua lokasi sasaran terhadap pengakuan dan perlindungan *tenurial system* KMHA.
2. Pelaksanaan kajian ekonomi dan biologi yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan *input, output, dan process control*.
3. Penyusunan rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (*right-based sustainable fisheries management* atau RB-SFM).

4. Pengembangan kemitraan dalam tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM, melalui kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan.
5. Penguatan kapasitas KMHA dampingan dalam menerapkan tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan dengan prinsip RB-SFM.
6. Pengembangan pembelajaran dari *pilot activities* di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk *best management practices* (BMPs).
7. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku lainnya dalam pengembangan pembelajaran dari *pilot activities* di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat.
8. Terselenggaranya manajemen dan tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan proyek.
9. Penguatan sistem manajemen proyek, kelengkapan tim pelaksana, dan sarana-prasarana kerja di dua lokasi sasaran dalam mencapai target rencana proyek.
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan periodik.

#### 1.4. Metodologi

Strategi pendekatan yang dijalankan:

- A. Upaya legalisasi nilai-nilai tradisional dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat telah dilakukan oleh pemerintah melalui alokasi ruang kelola dalam “zona lainnya” yaitu “sub zona kearifan lokal” sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2034, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034.

Agar kebijakan tersebut dapat efektif terlaksana di lapangan, usulan program ini secara ringkas menempuh pendekatan sebagai mana ilustrasi di bawah ini:



Gambar 1 Pendekatan Usulan Program

B. Tahapan identifikasi dan pemetaan awal keberadaan KMHA hingga tahapan pencapaian kemandirian kelembagaan KMHA, diuraikan dalam metodologi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi dan Pemetaan

Kejelasan wilayah kelola adat (spasial dan karakter aset penghidupan berkelanjutan atau *sustainable livelihood assets*) dari KMHA di Kabupaten Rote Ndao (TNP Laut Sawu) serta KMHA di Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat (SAP Kepulauan Raja Ampat), akan dibangun dengan:

- Kajian dan pemetaan partisipatif, musyawarah adat, dan penetapan “deliniasi makro dan mikro” ruang laut dan pesisir dalam wilayah kelola adat melalui kesepakatan musyawarah KMHA (termasuk perempuan adat) dan kebijakan pimpinan adat, didampingi pengambil kebijakan desa/kampung, kecamatan/distrik, kabupaten, provinsi, serta pihak BKKPN Kupang;
- Pematangan dokumen rekognisi kebijakan wilayah kelola laut KMHA dalam serial pembelajaran *shared-learning* dan dialog kebijakan Kelompok Kerja KMHA Provinsi NTT (Kabupaten Rote Ndao) dan Provinsi Papua Barat (Kabupaten Raja Ampat) bersama kebijakan desa/kampung,

kecamatan/distrik, kabupaten, provinsi, serta pihak BKKPN Kupang; yang diperkuat dengan perumusan kajian dan naskah akademis.

## 2. Pendampingan Kearifan Lokal KMHA dalam Tata Kelola Perikanan

Keberadaan KMHA dengan ruang kelola adat laut dan pesisir yang sah (*legitimate*), akan menjadi dasar perumusan rencana pengelolaan (*management plan*) sumber daya pesisir dan ikan karang, melalui:

- a. Penyusunan basis data, kajian dampak sosial dan dampak ekonomi, serta kecenderungan kondisi ekosistem pesisir dan (khususnya sumber daya perikanan karang) dengan melaksanakan serangkaian kajian partisipatif.
- b. Pematangan dokumen perencanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan perikanan berkelanjutan oleh unit usaha KMHA dalam lokakarya adat yang diperkuat dengan peraturan adat dan kajian akademis.
- c. Penguatan rekognisi rencana kelola sumber daya pesisir dan perikanan berkelanjutan berbasis ulayat KMHA melalui serial pembelajaran bersama (*shared-learning*) dan dialog kebijakan yang dilengkapi dengan perumusan serial modul pembelajaran kebijakan.
- d. Implementasi rencana kelola sumber daya pesisir dan perikanan berkelanjutan berbasis ulayat KMHA melalui seleksi *pilot activities* dalam musyawarah adat, yang diperkuat dengan penyusunan kajian kelayakan, kajian dampak lingkungan, kajian bio-ekonomi, perumusan serial modul pembelajaran, pelaksanaan pelatihan teknis, uji coba lapangan, serta monitoring dan evaluasi hasil uji coba dalam memperoleh praktik-praktik terbaik tata kelola perikanan (*best management practices* atau BMPs).

## 3. Penguatan kelembagaan

Serial dialog kebijakan bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan KMHA untuk mendorong:

- a. Pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat KMHA dan rekognisi wilayah kelola laut dan pesisir KMHA dalam kebijakan tata ruang dan kebijakan pembangunan desa/kampung, atau kecamatan/distrik, atau kabupaten, atau provinsi.
- b. Rekognisi rencana pengelolaan berkelanjutan (*sustainable management plan*) KMHA (melalui rencana kelola kelompok masyarakat) sebagai unit usaha KMHA atas sumber daya perikanan karang dan kuota tangkapan ikan dan hasil laut lainnya berbasis *tenurial system* ulayat adat (KMHA) serta pengelolaan perikanan berdasarkan konsep hak pengelolaan

perikanan (HPP) atau *right-based sustainable management* (RBFM). Kelompok masyarakat yang telah difasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompoknya yaitu KUB (Kelompok Usaha Bersama), Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan), Poklahsar (Kelompok Pengolah Pemasar), dan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas melalui Manaholo/Pengawas Adat).

- c. Penguatan kolaborasi konservasi TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat, melalui kerja sama usaha antara kelompok masyarakat (Pokmas) dengan pelaku industri untuk mendukung keberlanjutan *pilot activities* dalam adopsi teknologi budidaya perikanan karang, serta pengembangan rantai pasok berkelanjutan (*sustainable supply chain*).

#### 4. Kemandirian kelembagaan

Pengembangan lebih lanjut dari kerja sama teknis rantai pasok berkelanjutan bersama pelaku industri perikanan di NTT dan Papua Barat akan diperkuat melalui:

- a. Pengembangan kapasitas teknis sumber daya manusia perikanan dalam unit usaha Pokmas KMHA.
- b. Rekognisi rencana kerja pengembangan *sustainable fisheries* oleh Pokmas dalam program pembangunan sektor perikanan dan kelautan level kabupaten dan provinsi.
- c. Fasilitasi pengembangan teknologi pengelolaan budidaya perikanan karang dan teknologi pasca-panen.
- d. Inisiasi penguatan jejaring pemasaran produk perikanan berkelanjutan berbasis pengembangan unit usaha Pokmas melalui kerja sama dengan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) di Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat, serta pelaku industri perikanan di NTT dan Papua Barat.
- e. Fasilitasi pendampingan pengembangan standarisasi produk perikanan KMHA dan SDM pelaku perikanan karang di lokasi *pilot activities* di wilayah KMHA sasaran.

### 1.5. Informasi Ringkas Organisasi dan Proyek

<p>Nama Proyek: <i>Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat.</i></p>	
Durasi Proyek:	Agustus 2020 – Maret 2022
Lokasi Proyek/Kegiatan	TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat
Total Hibah Dari ICCTF	Rp8.423.982.391,-
Dana hibah yang sudah diterima	Rp7.830.615.596,-
Dana hibah ICCTF yang sudah digunakan	Rp8.423.982.391,-
Jumlah penerima manfaat langsung	±430 Orang yang terlibat kegiatan dengan PILI dari bulan Januari 2021 hingga Desember 2021 di dua Site
Jumlah penerima manfaat tidak langsung	Dua desa di kabupaten Rote Ndao (lebih kurang 600KK) dan 1 kampung di SAP Raja Ampat (lebih kurang 98KK)
Nama organisasi	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia
Direktur	Iwan Setiawan
Program Manager	Evi Indraswati

## 2. PELAKSANAAN PROGRAM

### 2.1. Kerangka Kerja (*Logical Framework*)

Tabel 1 Kerangka Kerja atau LFA

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
<p>Tujuan Proyek: Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola sumber daya pesisir dan perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat (<i>indigenous people right</i>) di wilayah TNP Laut Sawu (TNP-LS), Provinsi NTT dan SAP Kepulauan Raja Ampat (SAP-KRA), Provinsi Papua Barat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuk Pokja KMHA melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur dan atau Bupati dalam tata kelola TNP-LS dan SAP-KRA;</li> <li>2) Terbentuk 3 (tiga) kelompok KMHA (satu KMHA di SAP-KRA dan dua KMHA di TNP-LS) yang terlibat dalam mengidentifikasi atau menganalisis sumber daya perikanan yang dimiliki ancumannya, pemanfaatan atau pengelolaannya, dan pelestariannya, sebagai bagian dari penilaian kelayakan lokasi;</li> <li>3) Terbangun kesepakatan di komunitas/KMHA/kampung/kabupaten untuk melakukan pengelolaan perikanan berbasis hak (<i>right-based fisheries management</i> atau RBFM), baik dalam bentuk kesepakatan kelompok/aturan KMHA/peraturan kampung atau naskah kebijakan di kabupaten sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan;</li> <li>4) Terbangun kelembagaan komunitas/KMHA melalui aktivitas Kelompok Kerja (Pokja) atau Panitia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dukungan pemerintah daerah secara formal terhadap rencana kegiatan;</li> <li>2) Laporan penilaian kelayakan lokasi dan penentuan kelompok dampingan KMHA bersama Pemda NTT, Kab. Rote Ndao, Kab. Raja Ampat, dan UPT pengelola TNP-LS dan SAP-KRA (BKKPN Kupang);</li> <li>3) Naskah kesepakatan kelompok/aturan KMHA/peraturan kampung atau naskah kebijakan di kabupaten tentang terapan <i>right-based fisheries management</i> (RBFM) di TNP-LS dan SAP-KRA;</li> <li>4) Laporan perkembangan kelembagaan komunitas/KMHA dan laporan aktivitas Kelompok Kerja (Pokja) atau Panitia Pengakuan dan Perlindungan KMHA kabupaten;</li> <li>5) Laporan kajian partisipatif tentang ekonomi dan biologi yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan <i>input, output, and process control</i>;</li> <li>6) Rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (<i>right-based sustainable fisheries management</i> atau RB-SFM) memuat <i>harvest measure control</i></li> </ol>	<p>Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola sumber daya pesisir dan perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat (<i>indigenous people right</i>) di wilayah TNP Laut Sawu, Provinsi NTT (TNP-LS) dan SAP Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat (SAP-KRA).</p>

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
	<p>Pengakuan dan Perlindungan KMHA kabupaten;</p> <p>5) Tersedia rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (<i>right-based sustainable fisheries management</i> atau RB-SFM) dengan fokus pada pengendalian tangkapan (<i>harvest measure control</i>) perikanan ikan karang -- dengan memadukan <i>input, process, and output control</i> -- yang didasarkan pada kajian partisipatif tentang ekonomi dan biologi yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan <i>input, output, dan process control</i>;</p> <p>6) Terlaksana rencana pengelolaan pengendalian tangkapan dan pengelolaan <i>input, process, and output control</i> oleh kelompok dampingan KMHA didukung perlengkapan dan penguatan kapasitas atau pelatihan tentang kegiatan yang akan diimplementasikan;</p> <p>7) Terlaksana pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA, didukung bantuan perlengkapan dan penguatan kapasitas atau pelatihan hingga produksi; dan</p> <p>8) Terbangunnya pembelajaran dari <i>pilot activities di TNP-LS</i> (Kabupaten Rote Ndao) dan SAP-KRA (Kabupaten Raja Ampat) dari hasil monitoring dan evaluasi berupa <i>best management practices</i> (BMPs).</p>	<p>perikanan ikan karang -- dengan memadukan <i>input, process, and output control</i>;</p> <p>7) Laporan perkembangan implementasi <i>RB-SFM</i> oleh kelompok dampingan KMHA;</p> <p>8) Laporan kegiatan penguatan kapasitas atau FGD/workshop tentang <i>RB-SFM</i> dan bantuan perlengkapan;</p> <p>9) Laporan perkembangan implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA;</p> <p>10) Laporan kegiatan penguatan kapasitas atau FGD/workshop tentang pengolahan hasil tangkapan dan bantuan perlengkapan; dan</p> <p>11) Dokumen pembelajaran dari <i>pilot activities</i> di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil monitoring dan evaluasi berupa <i>best management practices</i> (BMPs).</p>	

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
<p>Outcome 1. Menguatnya kelembagaan kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di TNP Laut Sawu (TNP-LS) dan SAP Kepulauan Raja Ampat (SAP-KRA).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuk Pokja KMHA melalui penetapan SK Gubernur atau Bupati secara formal terhadap rencana pelaksanaan kegiatan;</li> <li>2) Teridentifikasi empat kelompok masyarakat yang akan didampingi dalam KMHA (terutama kelompok nelayan);</li> <li>3) Terlaksana penilaian kelayakan lokasi pendampingan kelompok nelayan KHMA yang akan menjadi <i>pilot activities</i>;</li> <li>4) Terbangun pengakuan dan perlindungan <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i> melalui peran Pokja/Panitia KMHA kabupaten/provinsi;</li> <li>5) Tersusun <i>baseline</i> informasi mengenai <i>tenurial system</i> KMHA (khususnya <i>marine tenure</i>) di lokasi <i>pilot activities</i> sebagai dasar kajian RBFM.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Inception report</i>;</li> <li>2) SK Pokja/Panitia KMHA;</li> <li>3) Laporan penilaian kelayakan lokasi dan penentuan kelompok dampingan KMHA bersama Pemda NTT, Kab. Rote Ndao, Kab. Raja Ampat, dan UPT Pengelola TNP-LS dan SAP-KRA (BKKN Kupang);</li> <li>4) Laporan pemetaan partisipatif <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i> sebagai dasar kajian RBFM;</li> <li>5) Laporan monitoring periodik dan Laporan evaluasi program.</li> </ol>	<p>Tidak terjadi penolakan dan bisa sinkronisasi dengan menemukan jalan tengah jika ada perbedaan pengakuan antara legalitas versi negara dan keberadaan lembaga masyarakat hukum adat di dua lokasi <i>project</i> di TNP laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat.</p>
<p>Output 1.1. Panitia/Kelompok Kerja (Pokja) KMHA untuk pengakuan dan perlindungan <i>tenurial system</i> KMHA yang dibentuk melalui penetapan SK Gubernur dan atau Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuk Pokja/Panitia KMHA di dua kabupaten (satu KMHA di SAP-KRA dan dua KMHA di TNP-LS) yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati dilengkapi rencana kerja dan mekanisme kerja/<i>standard operating procedure</i> (SOP) di Prov. NTT-Kab Rote Ndao, dan Prov. Papua Barat-Kab. Raja Ampat);</li> <li>2) Terlaksana rencana kerja Pokja/Panitia KMHA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) SK Pokja/Panitia KMHA di lokasi target (Prov. NTT-Kab Rote Ndao, dan Prov. Papua Barat-Kab. Raja Ampat);</li> <li>2) Dokumen rencana kerja dan mekanisme kerja di masing-masing Pokja/Panitia KMHA, serta SOP untuk masing-masing Pokja/Panitia KMHA;</li> <li>3) Laporan kegiatan berdasarkan rencana kerja.</li> </ol>	<p>Tidak ada penolakan para pihak dan mendapat dukungan positif dari lembaga adat serta dinas terkait.</p> <p><u>Mitigasi:</u> Melakukan kajian kesiapan kelembagaan adat dan diskusi dengan para pihak terkait dengan pengakuan KMHA dan skema yang akan ditempuh.</p>

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
Output 1.2. Hasil Kajian kelayakan lokasi KMHA yang akan menjadi <i>pilot activities</i> .	Terlaksananya dua kajian kelayakan lokasi KMHA bersama Pokja/Panitia KMHA yaitu di TNP-LS (Kab. Rote Ndao) dan SAP-KRA (Kab. Raja Ampat, Distrik Waigeo Barat daratan).	1. Laporan kajian kelayakan; 2. Kesepakatan para pihak terhadap lokasi <i>pilot activities</i> .	Terjadi sengketa untuk penentuan desa lokasi pilot.  <u>Mitigasi:</u> Ada kriteria untuk penentuan desa, adanya proses diskusi partisipatif, berdasarkan hasil kajian kelayakan kelembagaan KMHA.
Output 1.3. Hasil Kajian tentang mekanisme kerja <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i> .	Tersusun tiga hasil kajian tentang mekanisme kerja <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i> (dua KMHA di TNP-LS wilayah Kabupaten Rote Ndao dan satu KMHA di SAP-KRA wilayah Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat).	Laporan pemetaan partisipatif <i>tenurial system</i> (termasuk <i>marine tenure</i> ) KMHA di dua lokasi sasaran.	Tidak ada titik temu untuk kesepakatan mekanisme kerja.  <u>Mitigasi:</u> Dibangun proses partisipatif dengan diskusi para pihak dan membuat skema bersama untuk hasil mekanisme kerja.
Outcome 2. Berkembangnya praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal oleh kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA).	1) Terbangun kelembagaan komunitas/KMHA dari pendampingan oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Panitia Pengakuan dan Perlindungan KMHA kabupaten dan UPT-BKKPN Kupang (Wilker Rote Ndao dan Satker Raja Ampat); 2) Terbangun kesepakatan kelompok/aturan KMHA/peraturan kampung atau naskah kebijakan di kabupaten tentang terapan RBFM di TNP-LS dan SAP-KRA; 3) Tersusun laporan kajian partisipatif tentang ekonomi dan biologi yang	1) Laporan pendampingan kelembagaan komunitas/KMHA oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Panitia Pengakuan dan Perlindungan KMHA kabupaten dan UPT-BKKPN Kupang (Wilker Rote Ndao dan Satker Raja Ampat); 2) Dokumen naskah kesepakatan kelompok/aturan KMHA/peraturan kampung atau kebijakan di kabupaten tentang terapan RBFM di TNP-LS dan SAP-KRA; 3) Laporan kajian partisipatif tentang ekonomi dan biologi yang menjadi masukan dalam	UPT berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan kemitraan RB-SFM.  <u>Mitigasi:</u> Sosialisasi aktif di awal program, penyampaian KAK, pendekatan personil kunci, dan penyampaian agenda kerja di awal program (minimal untuk setahun) untuk kemudian

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
	<p>menjadi masukan dalam rencana pengelolaan <i>input, output, and process control</i>;</p> <p>4) Tersusun rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (RB-SFM) memuat <i>harvest measure control</i> perikanan ikan karang -- dengan memadukan <i>input, process, and output control</i>;</p> <p>5) Tersedianya laporan kajian bioekonomi yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan sumber daya udang.</p>	<p>rencana pengelolaan <i>input, output, and process control</i>;</p> <p>4) Dokumen rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (<i>right-based sustainable fisheries management</i> atau RB-SFM) memuat <i>harvest measure control</i> perikanan ikan karang -- dengan memadukan <i>input, process, and output control</i>.</p>	<p>dikonsultasikan dengan UPT terkait untuk sinkronisasi.</p>
<p>Output 2.1. Naskah akademis (kebijakan daerah) pengakuan dan perlindungan <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i>.</p>	<p>Tersedia satu naskah akademis pengakuan dan perlindungan <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i> (dua KMHA di TNP-LS wilayah Kabupaten Rote Ndao dan satu KMHA di SAP-KRA wilayah Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat).</p>	<p>Dokumen naskah akademis dilengkapi analisis spasial tentang pengakuan dan perlindungan <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i> (dua KMHA di TNP-LS wilayah Kabupaten Rote Ndao dan satu KMHA di SAP-KRA wilayah Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat).</p>	<p>UPT berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan kemitraan RB-SFM.</p> <p><u>Mitigasi:</u> Sosialisasi aktif di awal program, penyampaian KAK, pendekatan personil kunci, dan penyampaian agenda kerja di awal program (minimal untuk setahun) untuk kemudian dikonsultasikan dengan UPT terkait untuk sinkronisasi.</p>
<p>Output 2.2. Hasil kajian <i>baseline</i> dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap pelaksanaan RBFM.</p>	<p>Tersusunnya satu kajian <i>baseline</i> dan satu kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan tentang praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.</p>	<p>1) Dokumen laporan kajian <i>baseline</i>;</p> <p>2) Dokumen laporan kajian dampak.</p>	<p>UPT berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p><u>Mitigasi:</u></p>

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
			Sosialisasi aktif di awal program, penyampaian KAK, dan konsultasi dengan UPT terkait untuk sinkronisasi.
Output 2.3 Dukungan terhadap kajian ekonomi dan biologi di tingkat nasional yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan <i>input, output, and process control</i> untuk sumber daya udang di WPP 718.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedianya satu hasil kajian bioekonomi yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan <i>input, output, dan process control</i> untuk sumber daya udang;</li> <li>2) Tersedianya data primer sumber daya Udang di WPP 718.</li> </ol>	Dokumen laporan kajian bioekonomi kompilasi data primer.	<p>Kecelakaan di laut saat pengambilan data.</p> <p><u>Mitigasi:</u> Perlu ada <i>safety procedure</i> dan nomor kontak Polisi Air maupun SAR dalam setiap kegiatan lapangan untuk pengambilan data.</p>
Output 2.4. Hasil kajian bio-ekonomi sederhana di dua lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM.	Tersedia satu kajian bio-ekonomi sederhana di dua lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM memuat <i>harvest measure control</i> perikanan ikan karang -- dengan memadukan <i>input, process, and output control</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan kajian bioekonomi partisipatif;</li> <li>2) Laporan kegiatan pelatihan.</li> </ol>	<p>Desa lokasi tidak aktif dalam melakukan dokumentasi pembelajaran.</p> <p><u>Mitigasi:</u> Perlu perencanaan bersama dan rencana pengelolaan RBSFM yang dikawal bersama dan pembagian peran yang jelas.</p>
Output 2.5. Rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak ( <i>Right-based sustainable fisheries management</i> atau RB-SFM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia 1 rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (<i>Right-Based Sustainable Fisheries Management</i> atau RB-SFM)</li> <li>2. Tersedianya satu kesepakatan kelompok/aturan KMHA/peraturan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen rencana pengelolaan;</li> <li>2. Dokumen kesepakatan terapan RBFM.</li> </ol>	<p>Tidak terjadi penolakan dari para pihak di lokasi sasaran.</p> <p><u>Mitigasi:</u> Pelaksanaan <i>kick-off meeting</i>, penyampaian KAK kepada para</p>

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
	<p>kampung atau naskah kebijakan tentang terapan RBFM.</p>		<p>pihak sebelum pelaksanaan kegiatan, komunikasi intensif melalui <i>social media group</i> yang disepakati, dan penggunaan <i>online meeting</i> dalam keadaan tidak memungkinkan tatap muka.</p>
<p>Outcome 3. Implementasi rencana pengelolaan RB-SFM di wilayah kabupaten sasaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terimplementasi kegiatan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM;</li> <li>2) Terbangun kapasitas kelompok dampingan KMHA dalam pengolahan hasil tangkapan; dan penerapan RBFM;</li> <li>3) Tersedia pembelajaran dari <i>pilot activities</i> di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil monitoring dan evaluasi berupa <i>best management practices</i> (BMPs);</li> <li>4) Terimplementasi tata kelola perikanan karang dengan prinsip RBFM;</li> <li>5) Terbangunnya kemitraan dalam tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Catatan dialog dan kesepakatan kemitraan usaha antara unit usaha KMHA (Pokmas) dan pelaku usaha perikanan (BUMD dan koperasi);</li> <li>2) Laporan perkembangan implementasi RB-SFM oleh kelompok dampingan KMHA;</li> <li>3) Laporan kegiatan penguatan kapasitas atau pelatihan tentang RB-SFM dan bantuan perlengkapan pendukung;</li> <li>4) Laporan perkembangan implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA;</li> <li>5) Laporan kegiatan penguatan kapasitas atau pelatihan tentang pengolahan hasil tangkapan dan bantuan perlengkapan pendukung; dan</li> <li>6) Dokumen <i>best management practices</i> (BMPs).</li> </ol>	<p>UPT berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan kemitraan RB-SFM.</p> <p><u>Mitigasi:</u> Sosialisasi aktif di awal program, penyampaian KAK kegiatan dengan UPT terkait dan mitra pelaku usaha, pendekatan khusus personil kunci dan pemegang keputusan, dan penyampaian agenda kerja dan rencana kerja di awal program (minimal untuk setahun) untuk kemudian dikonsultasikan dengan UPT terkait untuk sinkronisasi.</p>
<p>Output 3.1. Kemitraan dalam tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM, melalui</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuk satu kemitraan tata kelola perikanan karang oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan;</li> <li>2) Terbangun satu kemitraan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok</li> </ol>	<p>Laporan perkembangan kemitraan RB-SFM dan pengolahan hasil tangkapan.</p>	<p>UPT berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan kemitraan RB-SFM.</p> <p><u>Mitigasi:</u></p>

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan.	dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan.		Sosialisasi aktif di awal program, penyampaian KAK kegiatan dengan UPT terkait dan mitra pelaku usaha, pendekatan khusus personil kunci dan pemegang keputusan, dan penyampaian agenda kerja dan rencana kerja di awal program (minimal untuk setahun) untuk kemudian dikonsultasikan dengan UPT terkait untuk sinkronisasi.
Output 3.2. SDM KMHA dampingan dalam menerapkan tata kelola perikanan karang dengan prinsip RB-SFM yang ditingkatkan dan sarana pengembangan usaha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terimplementasi tata kelola perikanan karang oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM berdasarkan rencana pengelolaan perikanan;</li> <li>2) Terlaksananya dua kali <i>workshop</i>/penguatan kapasitas kelompok dampingan KMHA dalam penerapan RB-SFM dalam usaha perikanan;</li> <li>3) Tersedianya tiga unit peralatan pendukung usaha perikanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan pendampingan KMHA dalam menerapkan prinsip RB-SFM;</li> <li>2) Laporan kegiatan penguatan kapasitas / pelatihan KMHA dalam penerapan RB-SFM;</li> <li>3) Dokumen berita acara penitipan barang.</li> </ol>	Kesibukan KMHA (misal: agenda budaya) menyebabkan waktu tidak memadai bagi agenda <i>capacity building</i> .  <u>Mitigasi:</u> Penyusunan dan pengolahan data awal dan pengiriman KAK sebelum pertemuan; mengetahui agenda lokal yang dimuat dalam kajian kelayakan lokasi pada awal pelaksanaan proyek.
Output 3.3. KMHA dampingan menerapkan pengolahan hasil tangkapan dengan prinsip RB-SFM serta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terimplementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM;</li> <li>2) Terlaksananya dua kali <i>workshop</i>/penguatan kapasitas kelompok</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan pendampingan KMHA dalam menerapkan prinsip RB-SFM;</li> <li>2) Laporan kegiatan penguatan kapasitas/pelatihan KMHA dalam penerapan RB-SFM;</li> <li>3) Dokumen berita acara penitipan barang.</li> </ol>	UPT berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan kemitraan RB-SFM.

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
memiliki kapasitas dalam pengolahan hasil tangkapan.	dampingan KMHA dalam penerapan RB-SFM dalam pengolahan hasil tangkapan. 3) Tersedianya enam unit peralatan pendukung usaha pengolahan hasil tangkapan.		<u>Mitigasi:</u> Sosialisasi aktif di awal program, penyampaian KAK kegiatan dengan UPT terkait dan mitra pelaku usaha, pendekatan khusus personil kunci dan pemegang keputusan, dan penyampaian agenda kerja dan rencana kerja di awal program (minimal untuk setahun) untuk kemudian dikonsultasikan dengan UPT terkait untuk sinkronisasi.
Output 3.4. Dokumen hasil pembelajaran dari <i>pilot activities</i> di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil monitoring dan evaluasi berupa <i>best management practices</i> (BMPs).	Terdokumentasi proses monitoring dan evaluasi <i>pilot activities</i> di dua lokasi sasaran menghasilkan pembelajaran berupa empat dokumen <i>best management practices</i> (BMPs).	1) BMP tentang pengakuan dan perlindungan KMHA; 2) BMP tentang RBFM – KMHA; 3) BMP tentang <i>sustainable fisheries</i> perikanan karang oleh KMHA; 4) BMP kemitraan mendukung terapan RBFM dan <i>sustainable fisheries</i> .	Tidak terjadi penolakan dari para pihak di lokasi sasaran.  <u>Mitigasi:</u> <i>Stakeholder engagement</i> yang efektif, komunikasi intensif melalui <i>social media group</i> , <i>online meeting</i> dalam keadaan tanpa tatap muka, serta penggunaan jasa tenaga ahli sesuai kompetensi yang diperlukan.
Output 3.5. Dokumen pembelajaran dari <i>pilot activities</i> di TNP-LS dan SAP-KRA didukung oleh pemerintah daerah sasaran.	Tersedianya dua dokumen dukungan pemerintah daerah (Kab. Rote Ndao, Pemda NTT, Kab. Raja Ampat, Pemda Papua Barat) terhadap 4 <i>best management practices</i> (BMPs) yang dihasilkan proyek.	1) Laporan akhir <i>workshop</i> diseminasi BMPs; 2) Dokumen dukungan Pemda terhadap BMPs.	Tidak terjadi penolakan dari para pihak di lokasi sasaran.  <u>Mitigasi:</u> <i>Stakeholder engagement</i> yang efektif, komunikasi intensif melalui <i>social media group</i> , <i>online meeting</i> dalam keadaan

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
			tanpa tatap muka, serta penggunaan jasa tenaga ahli sesuai kompetensi yang diperlukan.
Outcome 4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan proyek.	1) Terlaksananya monitoring dan evaluasi; 2) Tersedianya pelaporan periodik - serta audit proyek dengan hasil baik.	Dokumen prosedur (SOP) <i>Mon-Ev reporting</i> internal proyek; ESAP, <i>grievance-complaint</i> handling sesuai SOP ICCTF.	Tidak terjadi penghentian kegiatan akibat adanya miss-procedure dalam pelaksanaan proyek, atau keterlambatan pembayaran. <u>Mitigasi:</u> Penerapan sistem manajemen proyek optimal, pembekalan dan pendampingan tim pelaksana, koordinasi rutin internal, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai jadwal, serta memastikan kelancaran belanja anggaran (tidak lebih dari tanggal 5 Desember, laporan keuangan paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun, dan <i>project closing</i> dimulai paling lambat 1 bulan sebelum tanggal penutupan).
Output 4.1 Dukungan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan periodik - serta audit proyek.	1) Terlaksana monitoring, evaluasi, dan pelaporan periodik - serta audit proyek dengan hasil baik; 2) Tersedianya dokumen pembelajaran proyek;	1) Laporan monitoring dan evaluasi periodik sesuai kesepakatan dan jadwal; 2) Dokumen pembelajaran proyek; 3) Dokumen publikasi dan multimedia.	Tidak terjadi penghentian kegiatan akibat adanya <i>miss-procedure</i> dalam pelaksanaan proyek, atau keterlambatan pembayaran.

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
	3) Tersedianya material komunikasi dan publikasi proyek (multimedia dan material cetak).		<p><u>Mitigasi:</u> Penerapan sistem manajemen proyek optimal, pembekalan dan pendampingan tim pelaksana, koordinasi rutin internal, pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai jadwal, serta memastikan kelancaran belanja anggaran (tidak lebih dari tanggal 5 Desember, laporan keuangan paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun, dan project closing dimulai paling lambat 1 bulan sebelum tanggal penutupan).</p>
Outcome 5. Terselenggaranya tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan proyek.	Terlaksana operasional proyek dan dukungan logistik sesuai rencana kerja dan jadwal pelaksanaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiapan <i>project management system</i> (SOP program, SOP keuangan, ESAP, <i>grievance-complaint handling</i>, instruksi kerja proyek, jadwal kerja detail), dan tata laksana logistik terlaksana dengan baik;</li> <li>2. Dokumen laporan keuangan;</li> <li>3. Laporan pengadaan konsultan.</li> </ol>	<p>Tidak terjadi keterlambatan pencairan anggaran.</p> <p><u>Mitigasi:</u> Pengembangan sistem manajemen proyek (programatik, SDM, dan keuangan), pembekalan dan pendampingan tim pelaksana; penyusunan <i>periodic expenses plan</i> didasarkan kepada survei segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan operasional</p>

Uraian	Indikator dan Target	Cara Pembuktian	Asumsi Penting Resiko/Mitigasi
			kantor lapangan yang dilakukan setiap 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
Output 5.1 Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik.	1) Terlaksana Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik; 2) Tersedianya tim pengelola proyek.	1) Dokumen laporan <i>periodic expenses plan</i> didasarkan kebutuhan operasional kantor lapangan; 2) Kontrak tim pengelola proyek.	Tidak terjadi keterlambatan pencairan anggaran.  <u>Mitigasi:</u> Pengembangan sistem manajemen proyek (programatik, SDM, dan keuangan), pembekalan dan pendampingan tim pelaksana; Penyusunan <i>periodic expenses plan</i> didasarkan kepada survei segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan operasional kantor lapangan yang dilakukan setiap 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

## 2.2. Kemajuan dan Pencapaian Masing-masing Output

Tabel 2 Capaian Output

Output	Indikator dan target tahun 2021	Capaian indikator dan target sampai saat ini	Akumulasi capaian dan indikator	Keterangan
Output 1.1. Panitia/Kelompok Kerja (POKJA) KMHA untuk pengakuan dan perlindungan <i>tenurial system</i> KMHA yang dibentuk melalui penetapan SK Gubernur dan atau Bupati.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Panitia MHA Kab. Rote Ndao;</li> <li>2. SK Panitia dan Pokja KMHA Kab. Raja Ampat;</li> <li>3. Dua SOP Pokja;</li> <li>4. Dua Mekanisme dan rencana kerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Panitia MHA Kab. Rote Ndao;</li> <li>2. SK Panitia dan Pokja KMHA Kab. Raja Ampat;</li> <li>3. Dua mekanisme dan rencana kerja;</li> <li>4. Laporan kegiatan pelaksanaan.</li> </ol>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Bupati Rote Ndao No 304 tahun 2021 ttg Panitia MHA Kab. Rote Ndao dan Rencana Kerja Panitia MHA Rote 2021.</li> <li>▪ SK Bupati Raja Ampat No 188/48/SK-BRA/VIII/2021 ttg Pembentukan Panitia dan Kelompok Kerja KMHA di SAP Raja Ampat.</li> </ul>
Output 1.2. Hasil Kajian kelayakan lokasi KMHA yang akan menjadi <i>pilot activities</i> .	Terlaksana kajian kelayakan lokasi KMHA bersama Pokja/Panitia KMHA di TNP-LS (di Kab. Rote Ndao) dan SAP-KRA (Kab. Raja Ampat, Distrik Waigeo Barat daratan).	Sudah dilaksanakan di Rote dan sedang berjalan di Raja Ampat.	100%	Laporan kajian kelayakan dan kesepakatan para pihak terhadap lokasi <i>pilot activities</i> sudah disusun.

Output 1.3. Hasil Kajian tentang mekanisme kerja <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i>	Tersusun hasil kajian tentang mekanisme kerja <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i> (dua KMHA di TNP-LS wilayah Kabupaten Rote Ndao dan satu KMHA di SAP-KRA wilayah Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat).	Laporan pemetaan partisipatif <i>tenurial system</i> (termasuk <i>marine tenure</i> ) KMHA di dua lokasi sasaran.	100%	Hasil pemetaan partisipatif sudah disusun dan dilampirkan bersama peta wilayah adat.
Output 2.1 Naskah akademis (kebijakan daerah) pengakuan dan perlindungan <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i> .	1) Tersedianya peta wilayah kelola laut KMHA; 2) Tersedianya naskah akademis pengakuan dan perlindungan <i>tenurial system</i> KMHA di lokasi <i>pilot activities</i> (dua KMHA di TNP-LS wilayah Kab. Rote Ndao dan satu KMHA di SAP-KRA Distrik Waigeo Barat, Kab. Raja Ampat).	Peta Wilayah Kelola Adat MHA di Kabupaten Rote Ndao.	100%	Sudah ada dua dokumen kajian akademis yang disusun maupun diserahkan ke panitia KMHA untuk mendukung pengakuan wilayah KMHA di dua kabupaten.
Output 2.2. Hasil kajian <i>baseline</i> dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap pelaksanaan RBFM.	Tersusunnya kajian <i>baseline</i> dan dampak sosial ekonomi dan lingkungan tentang praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan RBFM.	Laporan kajian <i>baseline</i> sosial ekonomi dan lingkungan di tiga KMHA tersedia.	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kajian <i>baseline</i> dan kajian dampak pasca proyek sudah dibuat dan disusun. Kajian meliputi sosial, ekonomi, sosial dan budaya yang ada di tiga KMHA di tingkat desa.</li> <li>▪ Kajian ini menggunakan metode survei KAP, survey rumah tangga, analisis gender, dan juga analisa data secara kuantitatif maupun kualitatif.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Input data sudah diselesaikan di tahun 2020 untuk <i>baseline</i> dan dampak di Maret 2022.</li> </ul>
Output 2.3 Dukungan terhadap kajian ekonomi dan biologi di tingkat nasional yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan <i>input, output, and process control</i> untuk sumber daya udang di WPP 718.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya hasil kajian bioekonomi yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan <i>input, output, and process control</i>, untuk Sumber daya udang;</li> <li>Tersedianya data primer sumber daya udang di WPP 718.</li> </ol>	Sudah dilakukan untuk <i>workshop</i> diseminasi untuk trip satu dan sedang berjalan untuk kajian trip kedua.	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen laporan kajian bioekonomi.</li> <li>Kompilasi data primer.</li> </ul>
Output 2.4 Hasil kajian bio-ekonomi sederhana di dua lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM.	Tersedianya kajian bio-ekonomi sederhana di dua lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM) memuat <i>harvest measure control</i> perikanan ikan karang -- dengan memadukan <i>input, process, and output control</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan <i>workshop</i> bioekonomi sederhana di tiga KMHA;</li> <li>Laporan kajian bio-ekonomi sederhana di tiga lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM) memuat <i>harvest measure control</i> perikanan ikan karang-- dengan memadukan <i>input, process, and output control</i>.</li> </ol>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah dilakukan <i>workshop</i> dan pelaksanaan kajian bioekonomi sederhana di tiga KMHA dengan peserta perwakilan dari kelompok masyarakat di masing-masing desa/kampung (Pokmaswas, Pokdakan, Poklahsar, dan KUB).</li> <li>Laporan kajian bioekonomi sudah selesai.</li> </ul>
Output 2.5 Rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak ( <i>right-based sustainable fisheries management</i> atau RB-SFM).	Tersedianya rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak ( <i>right-based sustainable fisheries management</i> atau RB-SFM).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (<i>right-based sustainable fisheries management</i> atau RB-SFM) tersedia di tiga KMHA;</li> <li>Kesepakatan kelompok/aturan KMHA/peraturan kampung</li> </ol>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah terbentuk kelompok di tiga KMHA dengan pembagian kelompok perikanan tangkap, pengawas, budi daya, dan pengolahan hasil tangkapan ikan.</li> <li>FGD Finalisasi Rencana Pengelolaan RB-SFM bersama</li> </ul>

		atau naskah kebijakan tentang terapan RBFM di tiga KMHA.		<p>BKKPN Kupang Satker Raja Ampat dan Rote Ndao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen pendukung berupa draf peraturan desa dan peraturan kampung di tiga kampung yang akan dikawal DMPD/DPMK untuk konsultasi dengan Kabag Hukum ke depannya.</li> </ul>
Output 3.1 Kemitraan dalam tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM, melalui kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan.	Berkembangnya kemitraan dalam tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM, melalui kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen kemitraan tata kelola perikanan karang oleh Pokmas KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan tersedia;</li> <li>Dokumen kemitraan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan tersedia.</li> </ol>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesepakatan dukungan kemitraan dengan dibangunnya rumah olah di Waisai untuk <i>workshop</i> peningkatan sumber daya manusia di kampung.</li> <li>Kesepakatan dukungan kemitraan dengan dibangunnya rumah olah di Oelua dan Sotimori.</li> <li>Kesepakatan dengan DPMD untuk membeli abon ikan dari hasil olahan kelompok dampingan melalui anggaran dana desa sebagai bentuk sinergi dan dukungan program penanganan <i>stunting</i>.</li> <li>Ada dokumen PKS kemitraan baik di Rote Ndao maupun di Raja Ampat untuk kerja sama dan pendampingan dengan dinas terkait.</li> </ul>

<p>Output 3.2. SDM KMHA dampingan dalam menerapkan tata kelola perikanan karang dengan prinsip RB-SFM yang ditingkatkan dan sarana pengembangan usaha.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terimplementasinya tata kelola perikanan karang oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM;</li> <li>2) Terbangunnya kapasitas (pengetahuan dan peralatan pendukung usaha perikanan) kelompok dampingan KMHA dalam penerapan RB-SFM;</li> <li>3) Tersedianya peralatan pendukung untuk kelompok masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan bulanan kelompok RBSFM;</li> <li>2. Modul pelatihan penguatan kapasitas tersedia;</li> <li>3. Laporan pendampingan tiga KMHA untuk implementasi RBSFM oleh kelompok dampingan KMHA tersedia;</li> <li>4. Pelaksanaan pengadaan alat pendukung RB-SFM;</li> <li>5. Mekanisme dan SOP pemakaian peralatan pendukung RB-SFM;</li> <li>6. Pengawasan untuk perikanan tangkap di Rote Ndao dan Raja Ampat: Pertemuan Bulanan Pokmaswas/ Manaholo.</li> </ol>	<p>100%</p>	<p>Kegiatan pendampingan penggunaan peralatan pendukung RB-SFM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan menyepakati aturan pemakaian peralatan pendukung RB-SFM.</li> <li>2. Pendampingan instalasi dan penggunaan peralatan pendukung RB-SFM.</li> <li>3. BAST peralatan pendukung RB-SFM.</li> <li>4. Pendampingan penggunaan peralatan pendukung.</li> </ol>
<p>Output 3.3. KMHA dampingan menerapkan pengolahan hasil tangkapan dengan prinsip RB-SFM serta memiliki kapasitas dalam pengolahan hasil tangkapan.</p>	<p>Terimplementasinya pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM, serta menguatnya kapasitas kelompok dampingan KMHA dalam pengolahan hasil tangkapan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan bulanan kelompok pengolahan dan pemasar;</li> <li>2. Modul pelatihan penguatan kapasitas tersedia;</li> <li>3. Laporan pendampingan tiga KMHA untuk implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM;</li> <li>4. Laporan pelaksanaan pengadaan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan;</li> <li>5. Mekanisme dan SOP pemakaian peralatan</li> </ol>	<p>100%</p>	<p>Kegiatan pendampingan penggunaan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan menyepakati aturan pemakaian peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan.</li> <li>2. Pendampingan instalasi dan penggunaan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan.</li> <li>3. Penitipan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan.</li> </ol>

		pendukung pengolahan hasil tangkapan.		4. Pendampingan penggunaan peralatan pendukung.
Output 3.4. Dokumen hasil pembelajaran dari <i>pilot activities</i> di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil monitoring dan evaluasi berupa <i>best management practices</i> (BMPs).	Tersedianya pembelajaran dari <i>pilot activities</i> di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil monitoring dan evaluasi berupa <i>best management practices</i> (BMPs).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi <i>pilot activities</i> di tiga KMHA;</li> <li>Dokumentasi praktik pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>BMP tentang pengakuan dan perlindungan KMHA;</li> <li>BMP tentang RBFM;</li> <li>BMP tentang RPP berbasis hak;</li> <li>BMP tentang kemitraan mendukung penerapan RBFM dan <i>sustainable fisheries</i>.</li> </ol> </li> </ol>	100%	Dokumen BMPs telah tersusun dan telah tercetak, di antaranya BMP Pengakuan dan Perlindungan KMHA, BMP RBFM, BMP RPP Berbasis Hak, dan BMP Kemitraan.
Output 3.5. Dokumen pembelajaran dari <i>pilot activities</i> di TNP-LS dan SAP-KRA didukung oleh pemerintah daerah sasaran.	Terealisasinya dukungan pemerintah daerah (Kab. Rote Ndao, Pemda NTT, Kab. Raja Ampat, Pemda Papua Barat) terhadap 4 (empat) <i>best management practices</i> (BMPs) yang dihasilkan proyek.	Sudah dilakukan kegiatan <i>workshop</i> diseminasi BMPs untuk sosialisasi dan adopsi komitmen BMPs.	100%	Sudah ada laporan kegiatan <i>workshop</i> diseminasi BMPs serta dukungan untuk adopsi BMPs.
Output 4.1 Dukungan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan periodik - serta audit proyek.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya laporan monev dan <i>spot check</i> lapangan;</li> <li>Tersedianya dokumentasi material komunikasi;</li> <li>Tersedianya struktur tim pelaksana proyek.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan monev dan <i>spot check</i> lapangan.</li> <li>Dokumentasi material komunikasi.</li> <li>Laporan kegiatan proyek hingga 2022.</li> </ol>	100%	Untuk melaksanakan proyek, PILI telah merekrut dan memobilisasi konsultan proyek yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinator utama lapangan (Nur Indah Ristiana)</li> <li>Koordinator site Rote Ndao (Ajeng Miranti Putri)</li> </ol>

				<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Asisten koordinator site Rote Ndao (Berliansah Nikin)</li> <li>4. Asisten koordinator site Raja Ampat (Hasim Andi Taufiq)</li> <li>5. Media (Nieko Octavi S.)</li> <li>6. Administrasi dan keuangan lapangan Raja Ampat (Siti Suprehatin)</li> <li>7. Asisten bendahara (Melda Yanti)</li> <li>8. Tenaga ahli ESSF dan monev (Andrea Aditya)</li> <li>9. CO-Lokal Rote Ndao (Abdur Rahman Mau dan Arifin Pratama Lolok)</li> <li>10. CO-Lokal Raja Ampat (Raimod F. Dimara)</li> <li>11. <i>Procurement specialist</i> (Bambang Supriadi)</li> </ol>
Output 5.1 Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terlaksananya dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik;</li> <li>2) Tersedianya tim pengelola proyek.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik;</li> <li>2. Tersedianya tim pengelola proyek;</li> <li>3. Struktur tim pelaksana proyek;</li> <li>4. Kontrak tim pelaksana proyek dan konsultan.</li> </ol>	100%	<p>Tim manajemen proyek yang didukung oleh proyek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajer program</li> <li>2. Bendahara proyek, yang telah direkrut dan dimobilisasi sejak 14 Agustus 2020.</li> </ol> <p>PILI dalam melaksanakan proyek COREMAP-CTI Paket 6 memiliki kantor proyek di Bogor dan kantor lapangan/<i>mess</i> di Kupang, dan Waisai yang operasionalnya didukung oleh proyek COREMAP-</p>

				CTI, antara lain: sewa kantor, internet, listrik, air, ATK, dan logistik bulanan.
--	--	--	--	---

### 2.3. Hambatan dalam Pencapaian Output dan Upaya Mengatasi

Secara umum hambatan yang ada:

- Pandemi membatasi pergerakan dan juga proses berkumpulnya para pihak. Untuk mengatasinya, perlu strategi pertemuan skala kecil dan terbatas dengan jadwal paralel. Selain itu, perlu ada edukasi untuk penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Pertemuan juga dapat dilakukan secara formal maupun informal.
- Keterlambatan proses pencairan dana proyek telah banyak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Di sisi lain, ada tuntutan serapan dana program sebagai salah satu indikator efektivitas program. Walau telah diatasi dengan *prefinance*, hal ini sedikit banyak mempengaruhi strategi prioritas pelaksanaan kegiatan.
- Perubahan personil dan posisi pengelola proyek ini sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang sudah dirancang terkait dengan biaya kemahalan dan penyesuaian protokol kesehatan di masa pandemi, sehingga proyek bisa berjalan baik seperti yang diharapkan. Solusi utama *update* kondisi di lapangan dan dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memudahkan mencari pendekatan lain dan modifikasi kegiatan yang diperlukan dan mencapai *output* yang diharapkan.
- Legalisasi bagian hukum memerlukan proses formal: diskusi dan *meeting* yang menghadirkan Sekda (tertunda dengan adanya PPKM) di kedua kabupaten. Selain itu, bergantinya personil di Kabag Perundangan Kabupaten Raja Ampat juga menjadi kendala dalam proses legalisasi.
- Perbedaan persepsi tentang mekanisme pengakuan KMHA di beberapa kelompok sesuai pemahaman masing-masing *stakeholder* dan aturan yang dianut. Upaya mengatasinya adalah dengan melakukan pertemuan untuk diskusi dan duduk bersama untuk menyamakan persepsi.
- Dinamika kelompok sebagai salah satu perkembangan organisasi tingkat tapak perlu pendampingan intensif dan membangun komunikasi efektif antar pihak baik internal anggota kelompok maupun para pihak karena masih proses memahami perlunya berkelompok dan berorganisasi.
- Perlu kegiatan pendukung untuk mengawal penguatan kelembagaan di tingkat tapak sambil berjalannya proses edukasi dan *awareness* kepada masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana yang diberikan dan disesuaikan dengan rencana pengelolaan perikanan berbasis hak di masing-masing KMHA.
- Kegiatan untuk mengawal penguatan kelembagaan di tingkat kampung/desa memerlukan intensitas dan komunikasi yang kontinyu, namun durasi *project* cukup singkat untuk bisa melanjutkan pendampingan hingga kelompok ini bisa mandiri.

- Kondisi geografis di Raja Ampat menyebabkan kegiatan di lokasi *project* sangat tergantung dengan cuaca dan musim angin. Ketika musim angin barat, kegiatan pendampingan tidak bisa dilakukan secara optimal. Peralatan harus disimpan di tempat yang aman, jika tidak akan terbang oleh angin kencang dan rusak karena badai.

#### 2.4. Penyerapan Anggaran

Dari dana anggaran 2021 yang diberikan dan jumlah serapan maka dapat dilihat dibawah ini untuk perhitungannya:

Dari dana yang telah diturunkan pada termin 1 s.d. 5 sebesar	: <b>Rp7.830.615.596</b>
Total pengeluaran	: <b>Rp8.423.982.391</b>
Sisa anggaran	: -
Persentase serapan anggaran	100 %

Adapun detail penggunaan anggaran ada dalam matriks berikut ini:

Tabel 3 Matriks Serapan Output Vs Program

Matriks Output Vs Program Tahun 2020

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2020	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2020 (IDR)	Budget AWP 2020 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
1	Output 1.1 Panitia/Kelompok Kerja (POKJA) KMHA untuk pengakuan dan perlindungan tenurial system KMHA yang dibentuk melalui penetapan SK Gubernur dan atau Bupati	3,80%	1,90%	1. Tim formatur terbentuk 2. Draft Sk pokja tersedia 3. 4 kali di RAB awal, Serial meeting/FGD penyusunan mekanisme kerja dan SOP 4. 1 kick off meeting	1. 1 tim formatur POKJA KMHA di kabupaten Raja Ampat 2. Dua Draft SK Pokja tersedia untuk dua kabupaten 3. 9 Serial meeting di 2 lokasi (Kabupaten Raja Ampat dan Rote Ndao ) 4. 1 Kick off Meeting terlaksana	80%	519.057.000	36.306	232.498.978	16.347
2	Output 1.2 Hasil kajian kelayakan lokasi KMHA yang akan menjadi pilot activities	3,80%	3,80%	1. Laporan kajian kelayakan kelembagaan KMHA di dua lokasi tersedia 2. Kesepakatan lokasi pilot di 3 KMHA	1. Laporan kajian kelayakan sudah tersedia di dua lokasi 2. Berita acara kesepakatan lokasi pilot di 3 KMHA sudah tersedia	100%	291.623.041	20.398	291.623.041	20.503
3	Output 1.3 Hasil kajian tentang mekanisme kerja tenurial system KMHA di lokasi pilot activities	5%	5%	1. Laporan kajian pemetaan partisipatif (tenurial system) 2. Peta tenurial sistem untuk pengelolaan perikanan di 3 KMHA	1. Laporan kajian pemetaan partisipatif (tenurial system) di tiga lokasi sudah tersedia 2. Peta tenurial sistem untuk pengelolaan perikanan di 3 KMHA sudah tersedia	100%	445.229.446	31.142	445.229.446	31.303
4	Output 2.2 Hasil kajian baseline dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap pelaksanaan RBFM	3,80%	1,50%	1 Draft laporan kajian baseline sosial ekonomi dan lingkungan di 3 KMHA tersedia	1. Draft laporan kajian baseline sosial ekonomi lingkungan di 3 KMHA tersedia	80%	186.117.641	13.018	115.734.446	8.137

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2020	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2020 (IDR)	Budget AWP 2020 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
5	Dukungan terhadap kajian ekonomi dan biologi di tingkat nasional yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan input, output and process control untuk sumber daya udang di WPP 718	3,80%	3,80%	1. Laporan hasil kajian bioekonomi yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan input, output dan proses control untuk Sumber daya udang tersedia 2. laporan analisa dan modeling data tersedia 3. workshop kajian awal bioekonomi udang di WPP 718 tersedia	1. Laporan hasil kajian bioekonomi yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan input, output dan proses control untuk Sumber daya udang tersedia 2. laporan analisa dan modeling data tersedia 3. workshop kajian awal bioekonomi udang di WPP 718 tersedia	100%	287.762.000	20.128	287.762.000	20.232
6	Output 2.4 Hasil kajian bio-ekonomi sederhana di 2 lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM	3,80%	0,20%	1. Laporan kegiatan Workshop bio ekonomi sederhana di 3 KMHA 2. Laporan kajian bio-ekonomi sederhana di 3 lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM) memuat harvest measure control perikanan ikan karang -- dengan memadukan input, process and output control	1. laporan Workshop bio ekonomi untuk metode pendekatan sederhana di 3 KMHA sudah tersedia	80%	12.794.000	895	12.794.000	900
7	Output 3.2 SDM KMHA dampingan dalam menerapkan tata kelola perikanan karang dengan prinsip RB-SFM yang ditingkatkan dan sarana pengembangan usaha	2%	0,2%	1. Identifikasi pengadaan alat dukungan untuk tata kelola perikanan 2. List pengadaan alat	1. Identifikasi pengadaan alat dukungan untuk tata kelola perikanan tersedia 2. List pengadaan alat tersedia	100%	18.509.400	1.295	18.509.400	1.301

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2020	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2020 (IDR)	Budget AWP 2020 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
8	Output 3.3 KMHA dampingan menerapkan pengolahan hasil tangkapan dengan prinsip RB-SFM serta memiliki kapasitas dalam pengolahan hasil tangkapan	2%	0.2%	1. Identifikasi pengadaan alat dukungan pengolahan hasil tangkapan untuk tata kelola perikanan 2. List pengadaan alat	1. Identifikasi pengadaan alat dukungan untuk tata kelola perikanan tersedia 2. List pengadaan alat tersedia	100%	12.649.200	885	12.649.200	889
9	Dukungan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan periodik - serta audit proyek	5%	5%	1. Laporan money dan spot check lapangan 2. dokumentasi material komunikasi 3. Laporan kegiatan proyek	1. Laporan money dan spot check lapangan tersedia 2. dokumentasi material komunikasi tersedia 3. Laporan kegiatan proyek tersedia	100%	379.497.178	26.544	379.497.178	26.682
10	Output 5.1 Terselenggaranya tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan proyek	5%	5%	1. Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik 2. Tersedianya tim pengelola proyek 3. Struktur tim pelaksana proyek 4. Kontrak tim pelaksana proyek dan konsultan	1. Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik tersedia 2. Tersedianya tim pengelola proyek tersedia 3. Struktur tim pelaksana proyek tersedia 4. Kontrak tim pelaksana proyek dan konsultan tersedia	100%	100.634.144	7.039	100.634.144	7.075

Matriks Output Vs Program Tahun 2021

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2021	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2021 (IDR)	Budget AWP 2021 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
1	Output 1.1 Panitia/Kelompok Kerja (POKJA) KMHA untuk pengakuan dan perlindungan tenurial system KMHA yang dibentuk melalui penetapan SK Gubernur dan atau Bupati	3,80%	1,90%	1. 2 SK Pokja (Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat) 2. 2 SOP Pokja 3. 2 Mekanisme dan rencana kerja	1. SK Panitia MHA Kab. Rote Ndao 2. SK Panitia dan Pokja KMHA Kab. Raja Ampat 3. 2 Mekanisme dan rencana kerja 4. Laporan kegiatan pelaksanaan	100%	282.835.243	20.164	282.835.242	20.164
2	Output 2.1 Naskah akademis (kebijakan daerah) pengakuan dan perlindungan tenurial system KMHA di lokasi pilot activities			1. Peta wilayah kelola laut KMHA 2. Naskah akademik di kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat	Peta wilayah kelola adat di Kabupaten Rote Ndao	100%	88.337.582	6.298	88.337.582	6.298
3	Output 2.2 Hasil kajian baseline dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap pelaksanaan RBFM	3,80%	1,50%	1 Draft laporan kajian baseline sosial ekonomi dan lingkungan di 3 KMHA tersedia	1. Laporan laporan kajian baseline sosial ekonomi lingkungan di 3 KMHA tersedia	100%	62.436.900	4.451	62.436.900	4.451
4	Output 2.4 Hasil kajian bio-ekonomi sederhana di 2 lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM	3,80%	0,20%	1. Laporan kegiatan Workshop bio ekonomi sederhana di 3 KMHA 2. Laporan kajian bio-ekonomi sederhana di 3 lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM) memuat harvest measure control perikanan ikan karang -- dengan memadukan input, process and output control	1. Laporan kegiatan Workshop bio ekonomi sederhana di 3 KMHA 2. Laporan kajian bio-ekonomi sederhana di 3 lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM) memuat harvest measure control perikanan ikan karang -- dengan memadukan input, process and output control	100%	333.027.708	23.742	333.027.708	23.742

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2021	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2021 (IDR)	Budget AWP 2021 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
5	<b>Output 2.5 Rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (Right-based sustainable fisheries management atau RB-SFM)</b>	3,80%		1. Dokumen rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (Right-Based Sustainable Fisheries Management atau RB-SFM) tersedia di 3 KMHA 2. Kesepakatan kelompok/aturan KMHA/Peraturan Kampung atau naskah kebijakan tentang terapan RBFM di 3 KMHA	1. Dokumen rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (Right-Based Sustainable Fisheries Management atau RB-SFM) tersedia di 3 KMHA 2. Kesepakatan kelompok/aturan KMHA/Peraturan Kampung atau naskah kebijakan tentang terapan RBFM di 3 KMHA	100%	645.097.415	45.990	645.097.415	45.990
6	<b>Output 3.1 Kemitraan dalam tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM, melalui kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan</b>	2%		1. Dokumen kemitraan tata kelola perikanan karang oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan tersedia; 2. Dokumen kemitraan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan tersedia ;	1. Dokumen kemitraan tata kelola perikanan karang oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan tersedia; 2. Dokumen kemitraan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan tersedia ;	100%	74.810.500	5.333	74.810.500	5.333

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2021	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2021 (IDR)	Budget AWP 2021 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
7	Output 3.2 SDM KMHA dampingan dalam menerapkan tata kelola perikanan karang dengan prinsip RB-SFM yang ditingkatkan dan sarana pengembangan usaha	2%	0.2%	1) Laporan pendampingan 3 KMHA untuk implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM tersedia; 2. Modul pelatihan penguatan kapasitas tersedia  3. Laporan pelatihan penguatan kapasitas (pengetahuan dan peralatan pendukung usaha perikanan) kelompok dampingan KMHA dalam pengolahan hasil tangkapan	1) Pertemuan bulanan Kelompok.  2) Modul pelatihan penguatan kapasitas tersedia  3) Laporan pendampingan 3 KMHA untuk implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM tersedia  4) Pelaksanaan Pengadaan alat pendukung RB-SFM 5) Mekanisme dan SOP Pemakaian Peralatan Pendukung RB-SFM. 6) Pengawasan untuk perikanan tangkap di Rote Ndao: Pertemuan Bulanan Pokmaswas/ Manaholo.	100%	1.368.334.525	97.550	1.368.334.525	97.550

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2021	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2021 (IDR)	Budget AWP 2021 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
8	<b>Output 3.3 KMHA dampingan menerapkan pengolahan hasil tangkapan dengan prinsip RB-SFM serta memiliki kapasitas dalam pengolahan hasil tangkapan</b>	2%	0.2%	1) Laporan pendampingan 3 KMHA untuk implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM tersedia; 2. Modul pelatihan penguatan kapasitas tersedia  3. Laporan pelatihan penguatan kapasitas (pengetahuan dan peralatan pendukung usaha perikanan) kelompok dampingan KMHA dalam pengolahan hasil tangkapan	1) Pertemuan bulanan Kelompok Pengolahan.  2) Modul pelatihan penguatan kapasitas tersedia.  3) Laporan pendampingan 3 KMHA untuk implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM.  4) Laporan Pelaksanaan pengadaan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan. 5) Mekanisme dan SOP pemakaian peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan.	100%	760.358.677	54.207	760.358.677	54.207
9	<b>Output 3.4 Dokumen hasil pembelajaran dari pilot activities di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil</b>	2%		1. Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pilot activities di 3 KMHA	1. Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pilot activities di 3 KMHA	100%	204.755.600	14.597	204.755.600	14.597

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2021	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2021 (IDR)	Budget AWP 2021 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
	<b>monitoring dan evaluasi berupa best management practices (BMPs)</b>			2. Dokumentasi praktik pembelajaran a. BMP tentang pengakua dan perlindungan KMHA b. BMP tentang sustainable fisheries	2. Dokumentasi praktik pembelajaran a. BMP tentang pengakua dan perlindungan KMHA b. BMP tentang sustainable fisheries c. BMP tentang RBFM -KMHA d. BMP kemitraan mendukung terapan RBFM dan sustainable fisheries					
10	<b>Output 4.1 Dukungan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan periodik - serta audit proyek</b>	5%	5%	1. Laporan monev dan spot check lapangan 2. dokumentas material komunikasi 3. Struktur tim pelaksana proyek	1. Laporan monev dan spot check lapangan 2. dokumentas material komunikasi 3. Struktur tim pelaksana proyek 4. Laporan pembelajaran proyek	100%	1.129.213.055	80.503	1.129.213.055	80.503
11	<b>Output 5.1 Terselenggaranya tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan proyek</b>	5%	5%	1. Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik 2. Tersedianya tim pengelola proyek 3. Struktur tim pelaksana proyek 4. Kontrak tim pelaksana proyek dan konsultan	1. Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik 2. Tersedianya tim pengelola proyek 3. Struktur tim pelaksana proyek 4. Kontrak tim pelaksana proyek dan konsultan	100%	291.750.606	20.774	291.750.606	20.774

Matriks Output Vs Program Tahun 2022

Laporan Akhir Kegiatan 2020-2022

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2022	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2022 (IDR)	Budget AWP 2022 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
1	Output 2.1 Naskah akademis (kebijakan daerah) pengakuan dan perlindungan tenurial system KMHA di lokasi pilot activities			1. Peta wilayah kelola laut KMHA 2. Naskah akademik di kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat	Peta wilayah kelola adat di Kabupaten Rote Ndao	100%	296.891.373	21.071	296.891.373	21.071
2	Output 2.2 Hasil kajian baseline dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap pelaksanaan RBFM	3,80%	1,50%	1 Draft laporan kajian baseline sosial ekonomi dan lingkungan di 3 KMHA tersedia	1. Laporan laporan kajian baseline sosial ekonomi lingkungan di 3 KMHA tersedia	100%	189.849.890	13.474	189.849.890	13.474
3	Output 3.1 Kemitraan dalam tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM, melalui kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan	2%		1. Dokumen kemitraan tata kelola perikanan karang oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan tersedia; 2. Dokumen kemitraan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan tersedia ;	1. Dokumen kemitraan tata kelola perikanan karang oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan tersedia; 2. Dokumen kemitraan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM yang didukung pelaku usaha perikanan tersedia ;	100%	30.086.287	2.135	30.086.287	2.135

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2022	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2022 (IDR)	Budget AWP 2022 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
4	Output 3.2 SDM KMHA dampingan dalam menerapkan tata kelola perikanan karang dengan prinsip RB-SFM yang ditingkatkan dan sarana pengembangan usaha	2%	0.2%	<p>1) Laporan pendampingan 3 KMHA untuk implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM tersedia;</p> <p>2. Modul pelatihan penguatan kapasitas tersedia</p> <p>3. Laporan pelatihan penguatan kapasitas (pengetahuan dan peralatan pendukung usaha perikanan) kelompok dampingan KMHA dalam pengolahan hasil tangkapan</p>	<p>1) Pertemuan bulanan Kelompok.</p> <p>2) Modul pelatihan penguatan kapasitas tersedia</p> <p>3) Laporan pendampingan 3 KMHA untuk implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM tersedia</p> <p>4) Pelaksanaan Pengadaan alat pendukung RB-SFM</p> <p>5) Mekanisme dan SOP Pemakaian Peralatan Pendukung RB-SFM.</p> <p>6) Pengawasan untuk perikanan tangkap di Rote Ndao: Pertemuan Bulanan Pokmaswas/ Manaholo.</p>	100%	121.923.011	8.653	121.923.011	8.653

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2022	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2022 (IDR)	Budget AWP 2022 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
5	Output 3.3 KMHA dampingan menerapkan pengolahan hasil tangkapan dengan prinsip RB-SFM serta memiliki kapasitas dalam pengolahan hasil tangkapan	2%	0.2%	1) Laporan pendampingan 3 KMHA untuk implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM tersedia; 2. Modul pelatihan penguatan kapasitas tersedia 3. Laporan pelatihan penguatan kapasitas (pengetahuan dan peralatan pendukung usaha perikanan) kelompok dampingan KMHA dalam pengolahan hasil tangkapan	1) Pertemuan bulanan Kelompok Pengolahan.  2) Modul pelatihan penguatan kapasitas tersedia. 3) Laporan pendampingan 3 KMHA untuk implementasi pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM.  4) Laporan Pelaksanaan pengadaan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan. 5) Mekanisme dan SOP pemakaian peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan.	100%	94.490.475	6.706	94.490.475	6.706
6	Output 3.4 Dokumen hasil pembelajaran dari pilot activities di TNP-LS dan SAP-KRA dari hasil monitoring dan evaluasi berupa best management practices (BMPs)	2%		1. Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pilot activities di 3 KMHA	1. Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pilot activities di 3 KMHA 2. Dokumentasi praktik pembelajaran	100%	117.547.276	8.343	117.547.276	8.343

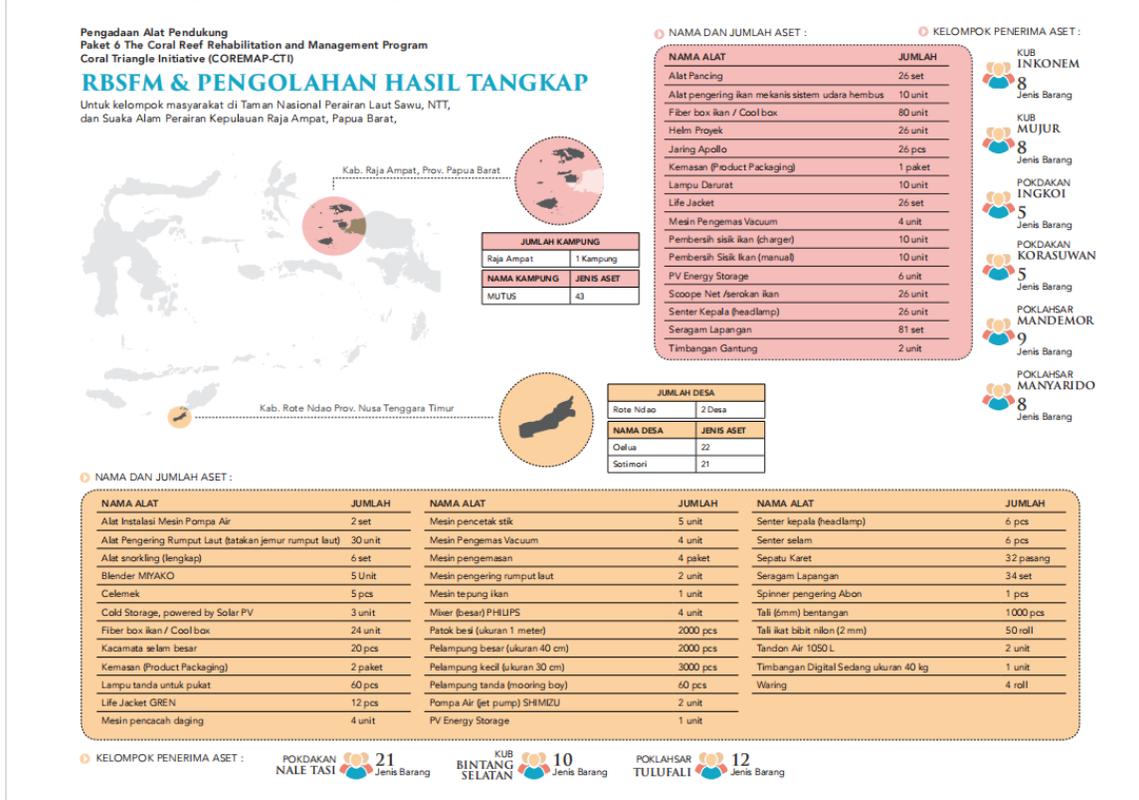
No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2022	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2022 (IDR)	Budget AWP 2022 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
					a. BMP tentang pengakua dan perlindungan KMHA b. BMP tentang sustainable fisheries c. BMP tentang RBFM -KMHA d. BMP kemitraan mendukung terapan RBFM dan sustainable fisheries					
7	Output 3.5 Dokumen pembelajaran dari pilot activities di TNP-LS dan SAP-KRA didukung oleh pemerintah daerah sasaran	2%		1) Laporan kegiatan lokakarya dukungan pemerintah daerah (Kab. Rote Ndao, Pemda NTT, Kab. Raja Ampat, Pemda Papua Barat) terhadap 4 (tiga) best management practices (BMPs) yang dihasilkan proyek 2. Dokumen dukungan para pihak terkait komitmen untuk mengadopsi 4 BMPs	1) Laporan kegiatan Workshop Desiminasi terhadap 4 (tiga) best management practices (BMPs) yang dihasilkan proyek 2. Dokumen dukungan para pihak terkait komitmen untuk mengadopsi 4 BMPs	100%	45.755.000	3.247	45.755.000	3.247
8	Output 4.1 Dukungan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan periodik - serta audit proyek	5%	5%	1. Laporan movev dan spot check lapangan 2. dokumentas material komunikasi 3. Struktur tim pelaksana proyek	1. Laporan movev dan spot check lapangan 2. dokumentas material komunikasi 3. Struktur tim pelaksana proyek 4. Laporan pembelajaran proyek	100%	341.946.290	24.269	341.946.290	24.269

No	Output	Bobot output (%)	Bobot output realisasi (%)	Indikator/Target Output 2022	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP 2022 (IDR)	Budget AWP 2022 (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
9	Output 5.1 Terselenggaranya tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan proyek	5%	5%	1. Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik 2. Tersedianya tim pengelola proyek 3. Struktur tim pelaksana proyek 4. Kontrak tim pelaksana proyek dan konsultan	1. Dukungan pelaksanaan operasional proyek dan logistik 2. Tersedianya tim pengelola proyek 3. Struktur tim pelaksana proyek 4. Kontrak tim pelaksana proyek dan konsultan	100%	47.958.000	3.404	47.958.000	3.404

### 3. INFOGRAFIS HASIL PROGRAM

#### 3.1. Sarana dan Prasarana

Berikut adalah sarana dan prasarana pendukung RBFM dan pengolahan hasil perikanan yang diberikan di tiga KMHA beserta distribusinya:



#### 3.2. Peningkatan Kapasitas

Banyak rangkaian forum diskusi atau FGD/training/workshop/sosialisasi serta beberapa kajian yang melibatkan peserta, baik laki-laki dan perempuan, dari tiga KMHA serta instansi terkait baik BKKPN Kupang maupun SKPD di tingkat kabupaten.

Peningkatan kapasitas yang telah dilakukan selamaproyek berjalan 2020- 2022 yaitu

- Workshop kajian bioekonomi sederhana - secara partisipatif bagi KMHA sasaran bersama BKKPN Kupang Wilker Rote Ndao dan Satker Raja Ampat.
- Loka-adat menyusun skema kemitraan RB-SFM dan pengolahan hasil tangkapan (perumusan proposal kemitraan bagi BUMD dan Koperasi).
- Loka-adat perencanaan pengadaan peralatan pendukung RB-SFM (bersama tiga Pokmas di wilayah *pilot activities*: Rote Ndao dan Raja Ampat)

- d. Pendampingan penggunaan peralatan pendukung RB-SFM (bagi tiga Pokmas di wilayah *pilot activities*: Rote Ndao dan Raja Ampat). Serial FGDs bersama tiga Pokmas di dua lokasi *pilot activities*.
- e. Pengawasan untuk perikanan tangkap di Raja Ampat: monitoring partisipatif untuk implementasi RBSFM.
- f. *Workshop* pengolahan hasil tangkapan bagi KMHA di dua lokasi *pilot activities* (bersama BUMD dan Koperasi).
- g. Loka-adat perencanaan pengadaan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan (bersama tiga Pokmas di wilayah *pilot activities*: Rote Ndao dan Raja Ampat)
- h. Pendampingan penggunaan peralatan pendukung pengolahan hasil tangkapan (bagi tiga Pokmas di wilayah *pilot activities*: Rote Ndao dan Raja Ampat) serial FGDs bersama tiga Pokmas di dua lokasi *pilot activities*.
- i. *Workshop* monitoring dan evaluasi - bagi perumusan BMPs.
- j. Loka-adat perumusan BMPs di dua lokasi target (Waisai dan Kupang).
- k. Loka-tulis finalisasi BMPs di Bogor untuk tiga BMPs.
- l. Midterm Workshop (Progress Pelaksanaan Project dan EKKP3K BKKPN Kupang) di dua lokasi target: Kupang (NTT) dan Sorong (Papua Barat).

### 3.3. Kajian, Survei, dan BMPs



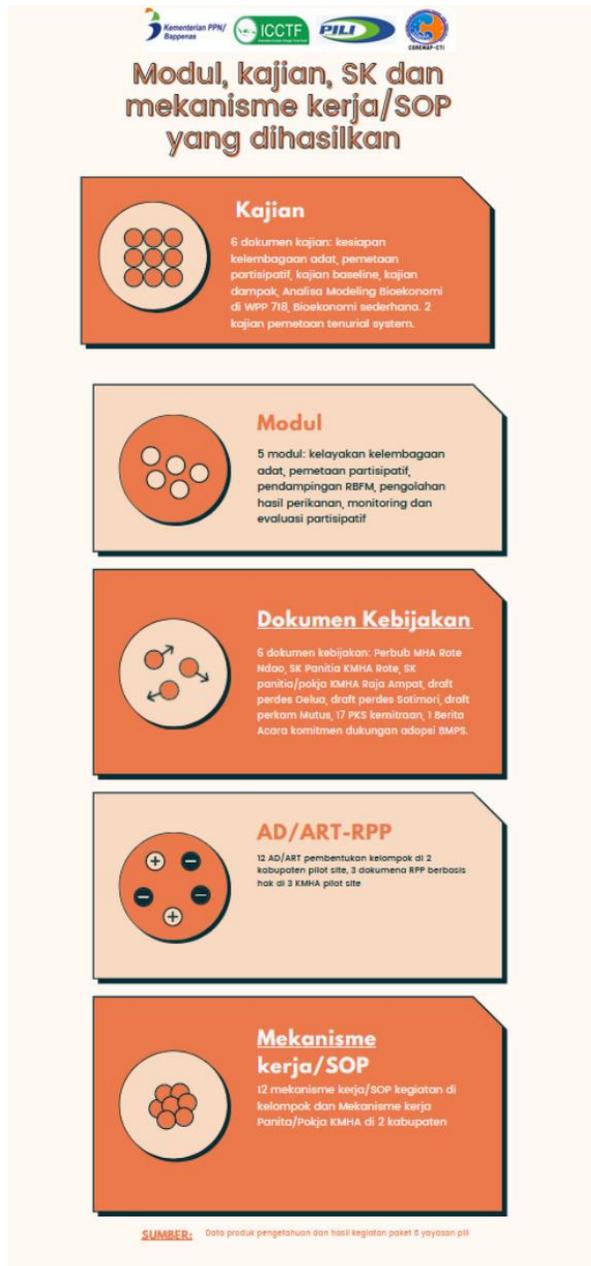
Kajian dan survei yang telah dilakukan pada tahun 2020-2022 yaitu

- a. Kajian *baseline* tentang praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan/RBFM, serta *screening* KMHA di Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat.
- b. FGD bersama Pokja/Panitia KMHA dan UPT pengelola TNP-LS dan SAP-KRA (BKKPN Kupang) dalam merumuskan "peta wilayah kelola laut dan perikanan" KMHA sasaran.
- c. Pelaksanaan kajian bioekonomi secara partisipatif bagi perikanan karang oleh KMHA di dua UPT (bersama pakar).
- d. Kajian dampak tentang praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan/RBFM, serta *screening* KMHA di Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat.
- e. Empat buku pembelajaran atau BMP tentang pengakuan dan perlindungan KMHA, BMP pendampingan RBFM, BMP RPP berbasis hak, dan BMP kemitraan.

#### **3.4. Modul, Kajian, Surat Keputusan, dan Mekanisme Kerja/SOP yang Dihasilkan**

- a) Lima dokumen kajian: 1) kesiapan kelembagaan adat, 2) pemetaan partisipatif, 3) *baseline* sosial, ekonomi, dan lingkungan, 4) dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, 5) kajian bioekonomi sederhana di tiga KMHA;
- b) Lima modul: 1) kesiapan kelembagaan adat, 2) pemetaan partisipatif, 3) pendampingan RBFM, 4) pendampingan pengolahan perikanan, 5) monitoring dan evaluasi partisipatif;
- c) Empat buku BMPs: 1) pengakuan dan perlindungan KMHA, 2) RBFM, 3) RPP berbasis hak, 4) kemitraan;
- d) Enam dokumen kebijakan: 1) Perbup MHA Rote Ndao, 2) SK Panitia KMHA Rote Ndao, 3) SK Panitia/Pokja KMHA Raja Ampat, 4) Draf Perdes Oelua, 5) Draf Perdes Sotimori, 6) Draft Perkam Mutus;
- e) Dua belas AD/ART kelompok;
- f) Tiga dokumen RPP MHA;
- g) Satu SOP Tanggap Darurat;
- h) Satu SOP Penanganan Pengaduan dan Keluhan;
- i) Dua belas SOP Penggunaan dan pemeliharaan alat dukungan RBFM dan pengolahan hasil perikanan;
- j) Dua dokumen pemetaan wilayah KMHA *tenurial system* Rote Ndao dan SAP Kepulauan Raja Ampat;
- k) Dua mekanisme kerja/rencana kerja Panitia/Pokja KMHA di Kabupaten Rote dan Raja Ampat;

- l) Tujuh belas dokumen PKS kemitraan di Kabupaten Raja Ampat dan Rote Ndao antara kelompok dengan dinas terkait (DPMD, Diskoperindag, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan), desa, dan Koperasi Mitra Mina Cendrawasih di Sorong;
- m) Satu dokumen BA dukungan para pihak adopsi pembelajaran BMPs PILI.



#### 4. ENVIRONMENT AND SOCIAL ACTION PLAN (ESAP), GENDER INCLUSION PLAN & PELAKSANAANNYA

##### 4.1. Tindakan Terkait Dampak Lingkungan dan Sosial

Pemenuhan ESSF pada Paket 6 COREMAP-CTI, PILI dengan mengacu pada dokumen “KERANGKA KERJA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL” yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) & Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Fase Restrukturisasi Kedua. Beberapa tindakan telah dilakukan PILI dalam melaksanakan kegiatan terkait Dampak Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Action Plan-ESAP).

1. Awal proyek PILI telah melakukan *screening* aspek lingkungan dan sosial melalui kajian awal (*rapid environment and social impact assessment*) untuk melihat resiko dan potensi dampak lingkungan dan sosial dari semua kegiatan yang diusulkan baik fisik maupun non-fisik. PILI dalam kegiatannya bersifat non-fisik sehingga menggunakan Kerangka Kerja Perlindungan Sosial terutama pada Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF). Pada tahap ini PILI telah melakukan Studi Penyaringan Awal Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang di dalamnya termasuk menilai kesiapan kelembagaan adat di 2 (dua) lokasi terpilih yaitu di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Kemudian memetakan para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan wilayah adat.
2. PILI telah merekrut personil untuk mengelola aspek lingkungan dan sosial proyek, serta implementasi ESAP.
3. PILI telah menyiapkan dan memperbaharui SOP Penanganan Keluhan dan Pengaduan dan SOP Tanggap Darurat termasuk penerapan protokol kesehatan terkait pandemi Covid 19 pada setiap kegiatan paket 6 dan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan ESAP.
4. PILI telah memenuhi kebijakan ketenagakerjaan meliputi kesetaraan, non diskriminasi, pekerja anak, kerja paksa, serta keluhan pekerja melalui Pedoman Operasional Proyek (POP) PILI.
5. PILI telah melakukan diskusi, sosialisasi, dan konsultasi publik sesuai dengan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) kepada masyarakat adat yang terkena dampak, baik berupa dampak negatif maupun positif (sebagai penerima manfaat). Dan memastikan bahwa kearifan lokal diakomodasi dalam desain kegiatan. PILI dalam kegiatannya telah mendapat dukungan dari kesepakatan dengan masyarakat adat di dua lokasi kegiatan.

6. PILI telah menyerahkan Laporan Penanganan Keluhan dan Pengaduan per triwulan dari April 2020 hingga Maret 2022.

#### 4.2. Inklusi Gender

Dalam pelaksanaan proyek dengan keterlibatan SDM pengelola proyek sudah diberikan akses kesetaraan gender. Program manager, asisten administrasi, dan koordinator lapangan Kupang perempuan. Bendahara, staf lapangan Rote dan Raja Ampat serta asisten staf lapangan Rote dan Raja Ampat laki-laki. Dari total 9 pelaksana proyek, 4 di antaranya perempuan.

Begitu juga untuk peserta kegiatan, setiap aktivitas melibatkan perempuan dalam kegiatan. Hal ini dilakukan dengan memastikan setiap undangan kegiatan wajib mengikutsertakan peserta perempuan, meskipun jumlahnya belum proporsional.

Dalam kajian *baseline* juga dilakukan kajian gender atas akses perempuan dalam pemanfaatan pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan sosial dan budaya di masing-masing lokasi proyek (tiga *pilot site*). Dalam pembentukan kelompok juga dibuat komposisi yang mengakomodasi keterlibatan perempuan, dimana untuk kelompok pengolah pemasar (Poklahsar) didominasi perempuan.

Faktor terbesar adalah waktu kegiatan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas keseharian. Antisipasinya dengan melakukan pertemuan terpisah dengan kelompok perempuan dan pendekatan yang berbeda dengan kelompok laki-laki. Peran dominasi perempuan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan berbeda dengan laki-laki. Aktivitas terbesar laki-laki pada saat produksi, sedangkan perempuan lebih banyak saat dan setelah panen. Antisipasinya dilakukan pelatihan khusus kelompok perempuan yang disesuaikan dengan peran sosialnya dalam pengelolaan potensi SDA perikanan berkelanjutan.

Sampai saat ini, dampak proyek masih belum terlihat karena masih tahap persiapan atau pra kondisi dimana tingkatannya masih pada tahap berbagi informasi dan *sharing* pengetahuan bersama. Kelompok perempuan yang terlibat dalam diskusi lebih berperan aktif dalam *sharing* pengalaman dan ingatannya dalam pemetaan partisipatif hingga kini. Kaum perempuan yang terlibat dengan laki-laki mempunyai posisi yang sama saat berbagi informasi memetakan potensi desa dan analisa *stakeholder*. Meskipun KUBE PEKKA atau kelompok usaha bersama perempuan kepala keluarga tidak ada, namun pembagian peran dalam akses pengembangan perikanan untuk pengolahan hasil perikanan dominan untuk kelompok perempuan.

## 5. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROYEK

### 5.1. Dampak Proyek Terhadap Masyarakat/Pemerintah/Lingkungan

Secara umum dampak proyek terhadap masyarakat/pemerintah/lingkungan sudah mulai terlihat di tingkat tapak melalui konsistensi pertemuan kelompok masyarakat yang dibentuk dan didampingi oleh PILI. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah keterlibatan OPD di setiap kegiatan PILI menjadi bukti atensi maupun pemahaman arti penting kegiatan PILI.

Keterlibatan masyarakat adat baik melalui pengurus dewan adat maupun masyarakat adat itu sendiri berkontribusi positif dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan cara-cara tradisional. Di setiap kesempatan seperti pendampingan kelompok masyarakat, PILI selalu melibatkan OPD/UPT terkait agar pembelajaran tentang perikanan tangkap, budi daya, dan juga pengawasan menggunakan penerapan hukum adat dapat lebih efektif dan lebih terjamin keberlanjutannya.

Saat ini dua kabupaten yang menjadi lokus kegiatan sudah terinformasikan dengan baik dan juga memiliki Panitia (Kabupaten Rote Ndao dan Raja Ampat) dan Pokja MHA (Kabupaten Raja Ampat) yang ikut mendorong kelompok kerja MHA yang menjadi payung keberadaan masyarakat adat di tingkat desa/kampung. Para pihak baik masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah yang terwakili dari pemerintah desa, dinas terkait, dan Bappeda juga sudah lebih paham akan kesempatan kelompok masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan asistensi terhadap praktik pengelolaan perikanan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan analisa dampak yang dilakukan pada bulan Februari 2022 di tiga KMHA, ada empat komponen dampak yang bisa dilihat.

RELASI KAUSALITAS ANTARA INTERVENSI DAN DAMPAK PROGRAM PILI-ICCTF (2020-2022)

Bogor-Maret2022 @FF



1. Lessons learned di TNP Laut Sawu (TNP-LS)

1. Keberhasilan inisiasi Panitia MHA di Kab. Rote Ndao meletakkan dasar percepatan rekognisi MHA - mendukung kemitraan formal program konservasi TNP-LS antara BKKPN Kupang & MHA
2. Penguasaan informasi MHA terhadap wilayah adat-nya, kondisi SDI dan ekosistem sekitarnya, dan kearifan lokal - penting untuk terus dijaga dan diadopsi dalam RPP RB-SFM
3. Kelompok usaha MHA telah memiliki kapasitas teknis, dan skema pengembangan usaha-nya telah didukung oleh pemerintah desa/kabupaten (mendukung nilai pemberdayaan EVIKA)
4. Pengalaman pendampingan saat Covid-19 dan saat bencana siklon tropis Seroja, membawa pengalaman berharga bagi MHA (dan stakeholders lainnya) mengenai pentingnya integrasi isu penguatan resiliensi MHA dalam pengembangan kemitraan pengelolaan KKPn, dalam mendukung kenaikan nilai EVIKA

2. Lessons learned dari SAP Kepulauan Raja Ampat (SAP-KRA)

1. Keberhasilan inisiasi Panitia MHA di Kab. Raja Ampat meletakkan dasar percepatan rekognisi MHA - mendukung kemitraan formal program konservasi SAP-KRA antara BKKPN Kupang dan MHA
2. Penguasaan informasi MHA terhadap wilayah adat-nya, kondisi SDI dan ekosistem sekitarnya, dan kearifan lokal - penting untuk terus dijaga dan diadopsi dalam RPP RB-SFM
3. Kelompok usaha di bawah MHA telah memiliki kapasitas teknis, dan skema pengembangan usaha-nya telah didukung oleh pemerintah desa/kabupaten (mendukung nilai pemberdayaan EVIKA)
4. Mengupayakan dukungan kebijakan daerah bagi pengakuan dan penguatan MHA dapat ditempuh dengan mengombinasikan ragam kerangka regulasi yang telah tersedia di beberapa peraturan perundangan yang berbeda, serta melalui jalur kementerian yang berbeda

Strategi keberlanjutan proyek

a. Keberlangsungan kelompok-kelompok yang telah dibentuk dalam menjamin keberlanjutan operasional kegiatan dan pemeliharaan peralatan yang telah dihibahkan dengan:

- i. Mendorong Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah dibuat dengan target pembentukan BUMDES dimana ada kesepakatan pembiayaan perawatan milik kelompok dari BUMDES maupun dana desa. Pada Kabupaten Rote Ndao status pembahasan sudah di Bagian Hukum dan di Raja Ampat telah ada kesepakatan bersama antara BAMUSKAM dan para pihak di Kampung Mutus;
- ii. Kelompok di Rote Ndao membangun kesepakatan antara kelompok budidaya dan pengolahan untuk menyisihkan pendapatan bagi operasional Manaholo;
- iii. Kelompok di Rote Ndao telah dimasukkan kegiatan pengawasan pada RPJMD untuk bisa mendapatkan dana desa secara rutin. Mendaftarkan kelompok Pokmaswas menjadi kelompok usaha nelayan tangkap/budidaya untuk bisa mendapatkan pendanaan mandiri melalui usaha;
- iv. Dalam Perkam yang telah diajukan kepada Bagian Hukum Raja Ampat salah satunya pembiayaan dari retribusi bagan (hasil pembahasan bersama Bamuskam beserta pemangku lainnya. Bahwa ada alokasi pendanaan dari kompensasi izin bagan di Kampung Mutus);

- v. Ada integrasi program lanjutan yang diteruskan oleh program lain baik dari pemerintah maupun lintas program, untuk program TEKAD di Kabupaten Raja Ampat, sedangkan integrasi penanganan *stunting* di Kabupaten Rote Ndao dari pendampingan dinas hingga alokasi dana desa sebagai pendampingan rutin kelompok di tiga KMHA;
- vi. Untuk membantu penguatan kelembagaan kelompok pascaprojek, Yayasan PILI berkomitmen untuk mendampingi kelompok minimal setahun setelah proyek selesai dengan menempatkan CO-lokal di tiga KMHA. Untuk CO-lokal di Kampung Mutus berdasarkan diskusi “tiga batu satu tungku”, fungsi CO-lokal dilanjutkan oleh majelis dan dipimpin ibu pendeta.

**b. Integrasi kegiatan Coremap-CTI dengan kegiatan pada kementerian/lembaga (pembinaan, bantuan pemerintah):**

- i. Kerja sama dengan DPMD Rote Ndao dalam program penanganan *stunting* dengan pembelian produk abon ikan dan sejenisnya ke Poklhasar baik melalui mekanisme dana desa maupun program pendampingan dari DPMD dan Diskoperindagkop kabupaten;
- ii. Program TEKAD Kemendes Raja Ampat, sudah memasukkan Kampung Mutus sebagai salah satu desa dampingan untuk pemberdayaan masyarakat melalui promosi produk dan pemasaran hingga tahun 2024. Selain itu, program Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat juga sudah mengalokasikan pendampingan untuk sentra ‘kampung nelayan’ di Mutus dan sudah sinergi dengan program peningkatan kapasitas.

**c. Mendorong akses pendanaan melalui pendanaan alokasi khusus yang masih dibutuhkan dan juga anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota termasuk dengan pihak swasta (CSR) untuk operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kapasitas kelompok dalam mengelola peralatan bantuan dan mengakses pendanaan untuk keberlanjutan kegiatan:**

- i. Pelatihan pembuatan proposal kerjasama/kemitraan dengan OPD/UPT ataupun swasta yang telah dilakukan;
- ii. kemitraan dengan koperasi mina cendrawasih di Sorong;
- iii. Pembuatan SOP/mekanisme kerja melalui kesepakatan (FPIC) dan pembuatan rencana kerja (termasuk skema pembiayaan).

- d. Transfer pengetahuan dengan mencetak hasil dokumentasi capaian hasil proyek (*policy brief*, kajian, pembelajaran), menerbitkan melalui website lembaga maupun website mitra (BKKPN, Pemda Rote Ndao dan Raja Ampat, dan lain-lain) serta mendistribusikan *softfile*.
- e. Transfer pengetahuan hasil kajian, *policy brief*, dan dokumentasi pembelajaran (BMPs) dengan melibatkan OPD dan UPT pada setiap kegiatan. Pelibatan tim kerja khususnya dengan Pokja KMHA di Raja Ampat di setiap kegiatan sejak perencanaan hingga pelaporan. Dokumen yang dihasilkan dikomunikasikan sebagai capaian bersama dan disampaikan ke seluruh *stakeholder*.

## 6. INOVASI DAN TEROBOSAN

**INOVASI**  
Berangkat dari Adat untuk tata kelola perikanan berkelanjutan di TNP laut Sawu dan SAP Raja Ampat

**Efektifitas dan penguatan kelembagaan adat dalam praktik RBFM**  
Mengedepankan pengetahuan adat dalam membangun praktik-praktik terbaik dalam tata kelola perikanan berkelanjutan. Penyelesaian konflik dan mengembangkan potensi dengan kelembagaan adat

**Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan berbasis hak**  
RPP disusun untuk mengembangkan potensi sumber daya ikan dan diperkuat dengan peraturan adat yang sudah berlaku. Namun pelaksanaan dan pengaturan pengelolaan disesuaikan dengan hukum formal pengawasan, perkam/perdes untuk memperkuatnya.

**Sarana dan Prasarana pendukung RBFM dan Pengolahan hasil perikanan**  
Inovasi peralatan seperti rak pengeringan ikan asin sistem hembus, membantu kelompok di Mutus untuk meningkatkan kualitas produksi. Dio tingkat kelembagaan kelompok, mengelola sarpras dengan mekanisme kolektif dan individu untuk mengembangkan usaha

**Pendekatan kemitraan untuk pendampingan dan penguatan kelembagaan**  
Biasanya kemitraan merupakan pengembangan usaha kelompok, namun dalam proyek ini dokumen kerjasama kemitraan menjadi media untuk meneruskan pendampingan dan dukungan para pihak kepada kelompok

Yayasan PILI 2022

Saat ini inovasi dan terobosan yang dilakukan antara lain:

#### **A. Dari sisi penguatan kelembagaan adat**

Inisiasi untuk menggali pengetahuan adat dengan perencanaan bersama di tingkat tapak menjadi salah pendekatan tersendiri dalam penelitian sosial dan upaya pemberdayaan masyarakat adat. Masyarakat adat dalam strata sosial masuk dalam kelompok marginal, namun dengan program ini, upaya untuk mendampingi kelembagaan adat di tingkat tapak. Selain itu pembentukan kelompok yang berbasis adat yaitu Manaholo yang kemudian mengikuti asas pembentukan kelompok di SKPD dan menuliskan SK/AD atau ART serta mekanisme kerja yang biasanya tidak ada di struktur adat menjadi pengetahuan sendiri untuk organisasi adat di tingkat tapak.

#### **B. Penyusunan rencana pengelolaan perikanan berbasis hak**

Pada umumnya akses sumber daya ikan di pesisir mengacu pada rencana pengelolaan perikanan wilayah pengelolaan perikanan (RPP WPP), namun dalam program ini, karena tidak ada wilayah kelola adat di perairan maka pendekatan dokumen RPP berbasis hak mengikuti analisa kebutuhan dan pengembangan KMHA yang berbasis desa/kampung. Hanya saja untuk pemetaan wilayah 'mencari ikan' sebagai 'piring makan bersama' di Kabupaten Raja Ampat akan disinergikan dengan rencana pengelolaan SAP Kepulauan Raja Ampat.

Untuk di Kabupaten Rote Ndao, meski wilayah KMHA di perairan tidak ada, sinergi kegiatan di dalam RPP berbasis hak dipayungi dengan papadak/hohorok yang selama ini sudah dijalankan untuk aktivitas pelanggaran masyarakat atas zonasi pemanfaatan atau pemanfaatan tradisional yang bisa diakses masyarakat adat. Untuk menguatkannya perlu didukung dengan adanya peraturan desa.

#### **C. Sarana dan prasarana pendukung RBFM dan pengolahan hasil perikanan**

Dalam memberikan akses atas pendampingan kelompok di tiga KMHA telah dirancang kebutuhan alat dan sarana pendukung kegiatan. Salah satu yang menjadi inovasi adalah alat pengering ikan sistem hembus udara yang diberikan kepada Poklhasar di Kampung Mutus, Raja Ampat. Hal ini merupakan upaya untuk peningkatan ekonomi di Kampung Mutus yang hasil utamanya adalah ikan asin.

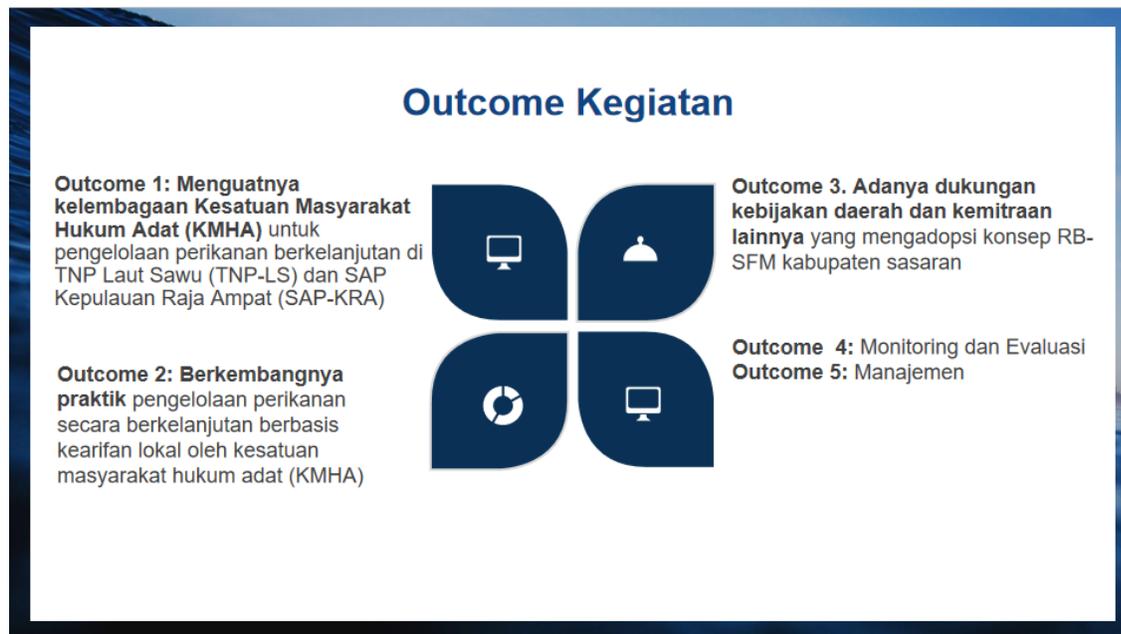
Selain itu ada alat pengering fabrikasi untuk rumput laut dengan sistem penutup terpal, sehingga nelayan budidaya rumput laut tidak lagi khawatir jika hujan datang secara tiba-tiba selama proses pengeringan.

#### D. Pendekatan kemitraan untuk pendampingan dan penguatan kelembagaan

Biasanya kemitraan dilakukan untuk pengembangan kelompok yang sudah mandiri dalam pengelolaan organisasi maupun usahanya. Namun dengan durasi proyek yang pendek, dokumen kerja sama kemitraan ini digunakan untuk memanjangkan dukungan pendampingan dari para pihak. Sehingga masing-masing dinas bisa menyesuaikan anggaran kepada kelompok yang sudah terbentuk dan bisa dikawal hingga menuju kemandirian.

### 7. PEMBELAJARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan proyek ini dibagi menjadi lima capaian atau *outcome* di antaranya seperti berikut ini:



Dalam setiap *outcome* terdapat beberapa capaian indikator yang disesuaikan dengan output yang dirancang sesuai dengan jadwal setiap bulannya. Dalam panduan LFA yang telah dibuat merupakan kerangka acuan kegiatan atau *road map* yang dijalankan secara bertahap dan harus tercapai setiap bulannya. Hal itu direkam dalam laporan bulanan, laporan kuartal dan laporan tahunan sebagai *monitoring* dan evaluasi. Untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan paket 6, tahapan yang dilakukan mengikuti tahapan dan strategi yang direncanakan dalam LFA, yang perlu dilakukan antara lain:

#### 1. *Set up* SDM pengelola proyek dan posisi kantor lapangan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat adat baik di tingkat kabupaten dan kampung/desa diperlukan intensitas komunikasi yang cukup tinggi. Di

awal proyek penetapan *duty station* kantor lapangan diperlukan untuk mempermudah jembatan komunikasi dengan para pihak. Untuk kantor lapangan di Raja Ampat dipilih kota Waisai sebagai *fieldbased office* aktivitas kegiatan.

Sedangkan untuk TNP Laut Sawu, di awal diperlukan banyak koordinasi dengan BKKPN Kupang dan DKP Provinsi NTT maka *based* kantor lapangan dipilih Kota Kupang. Pada waktu itu BKKPN Kupang Wilker Rote masih belum terbentuk dan baru ada di 2021. Penempatan SDM pengelola proyek juga menggunakan strategi penempatan fasilitator lapang serta CO lokal yang *live in* atau tinggal di sekitar desa lokasi desa dampingan (*pilot site*). Masing-masing desa/kampung didampingi oleh CO lokal yang berperan untuk membangun komunikasi dan edukasi terkait pra kondisi untuk pembentukan kelompok dan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan ketika kelompok sudah terbentuk.

## **2. Monitoring dan evaluasi internal untuk membangun tata hubungan koordinasi dan komunikasi pelaksana proyek di lapangan**

Untuk memaksimalkan monitoring dan pengawasan jarak jauh perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi intensif “satu pintu”. Hal ini dijalankan untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan proyek. Sehingga penetapan *job desk* setiap pengelola proyek perlu dimasukkan level kewenangan dan supervisi untuk membangun tata hubungan komunikasi jarak jauh. Sistem ini akan mengurangi *miss communication* dan *miss leading* dalam pelaksanaan kegiatan. Pengaturan koordinasi dan komunikasi internal perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### **a) Koordinasi yang jelas untuk penyampaian informasi kepada para pihak**

Ada beberapa koordinasi yang dilakukan di tingkat lapangan. Penyampaian informasi, sosialisasi kegiatan kepada para pihak di awal kegiatan perlu pemahaman substansi yang utuh di semua fasilitator hingga CO lokal, meskipun kegiatan ini juga baru pertama kali bagi Yayasan PILI intensif di lapangan dengan lanskap pesisir dan perairan. Terlebih lagi dengan sistem kerja pengelolaan keuangan melalui DIPA, dengan berbagai kelengkapan administrasi detail sebagai bukti pengeluaran anggaran yang *eligible*.

Jarak jauh antara dua *site* TNP Laut Sawu dengan lingkup kerja Kupang-Rote Ndao serta SAP Kepulauan Raja Ampat, dengan lingkup kerja Wasai-Mutus perlu garis koordinasi yang jelas sehingga capaian *output* dikawal dan berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui sejak awal untuk mencari solusi sehingga capaian kegiatan bisa terlaksana.

Kemampuan setiap fasilitator dan CO lokal di awal kegiatan cukup beragam, hal ini perlu strategi pengelolaan yang baik. Tahap penyesuaian kegiatan dan intensitas capaian yang harus dijalankan setiap bulannya memerlukan koordinasi intensif baik evaluasi bulanan maupun tindak lanjut kegiatan di bulan berikutnya yang disesuaikan dengan indikator capaian *output*. Setiap bulan diakhir bulan antara tanggal 25-30 dilakukan rapat internal untuk evaluasi capaian kerja bulanan dan perencanaan kegiatan berikutnya.

Setiap kegiatan yang melibatkan para pihak, juga dilakukan secara konsisten sosialisasi terkait prosedur Penanganan Keluhan dan Pengaduan dari waktu ke waktu dan evaluasi penerapannya.

### **b) Modifikasi pendekatan untuk mencari solusi permasalahan**

Dalam pelaksanaan kegiatan lapangan tentunya muncul berbagai persoalan. Terlebih saat mulainya program ini masuk dalam pandemi Covid 19 yang cukup menyita banyak anggaran untuk protokol kesehatan (*prokes*) dan syarat perjalanan. Begitu juga hambatan pertemuan terbatas cukup membuat CO lokal dan fasilitator lapangan kesulitan untuk menetapkan kepastian tanggal kegiatan di tingkat kabupaten maupun kampung dengan izin Satgas. Solusi untuk kegiatan ini, pertemuan terbatas di kampung/desa dengan *prokes* ketat. Pada awalnya, kegiatan pertemuan direncanakan banyak dilakukan di tingkat kabupaten. Dengan situasi tersebut kegiatan di kabupaten dilakukan *door to door* dan diskusi informal. Di sisi lain, hal positif yang diperoleh adalah kedekatan personil pemangku yang ikut mendorong kegiatan ini menjadi lebih mudah dalam pelaksanaan proyek.

Persoalan kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pertemuan, pembentukan kelompok memerlukan pendekatan yang cukup berbeda dan beragam. Setiap fasilitator punya *interest* tersendiri membangun komunikasi dengan para pihak, sehingga solusi atas permasalahan individu dan kelompok tentunya disesuaikan dengan tingkat permasalahan dan dampak atas permasalahan itu.

Contohnya: budaya 'iri' yang masih cukup kental di Kampung Mutus perlu pendekatan yang berbeda dengan yang lain. Mengawal konsistensi keputusan kolektif di Mutus menjadi salah satu kunci untuk memompa motivasi personal dalam kelompok. Jika si A mendapatkan kepercayaan untuk mengakomodir kegiatan harus mendapatkan persetujuan kolektif di kelompok besar dan perlu membentuk tim kerja. Jika ada yang menentang dan tidak setuju di luar forum, maka keputusan awal dianggap tidak bermasalah. Sehingga rencana awal bisa terus berjalan. Bisa jadi dalam perjalanannya si B tidak setuju, sepanjang itu tidak disampaikan terbuka di forum diskusi maka

pernyataan si B tidak berlaku. Meskipun timbul tantangan lainnya, kalau si B menjadi tidak aktif di kelompok. Sehingga perlu pendekatan personal dari peran CO lokal dan fasilitator untuk memotivasi kembali anggota supaya aktif di kelompok.

Lain halnya dengan di Rote, persoalan kelompok tidak hanya di tingkat personal tetapi kelembagaan. Hal ini tentunya perlu solusi yang berbeda. Pendekatan penyelesaian kelembagaan, mendekati dengan cara kerja bersama, memetakan peran dan posisi antar lembaga untuk tujuan bersama diperlukan untuk resolusi konflik. Begitu juga koordinasi lintas lembaga kelompok diperlukan agar bisa membangun satu tujuan berkembangnya usaha perikanan dalam satu desa.

### 3. Mengawal dinamika capaian kegiatan dan penyelesaian laporan

Kegiatan di lapangan cukup padat dan tenggat waktu yang ketat. Setiap bulan di awal pelaksanaan kegiatan masih soal prakondisi dan kajian persiapan untuk menentukan *pilot site* dan melihat situasi kebijakan di tingkat kabupaten terkait pengakuan dan perlindungan KMHA.

## Outcome 1

Output 1.1: Adanya **dukungan kebijakan pemda kabupaten/provinsi** di 2 lokasi  
Output 2.1: Tersedianya satu hasil **kajian kelayakan lokasi KMHA**  
Output 3.1: Tersedianya satu hasil **kajian tentang tenurial system KMHA** di lokasi pilot activities

**Capaian**

- ✓ SK panitia KMHA di Raja Ampat dan POKJA KMHA SAP Raja Ampat dan mekanisme kerja
- ✓ Modul kelayakan kelembagaan dan modul pemetaan partisipatif
- ✓ Dokumen kajian Kesiapan kelembagaan adat
- ✓ Dokumen Kajian pemetaan Partisipatif **SAP Raja Ampat (Mutus)**



Dari peta kegiatan di Outcome 1 tentunya banyak kegiatan yang melibatkan para pihak kunci untuk bisa mengawal rangkaian kegiatan pendampingan ke depan. Target draf SK Panitia/Pokja KMHA awalnya direncanakan di awal pelaksanaan kegiatan (Q1 dan Q2 tahun 2020). Namun sampai akhir tahun belum tercapai karena proses para pihak di daerah masih belum terbiasa dengan diskusi terkait KMHA.

Raja Ampat misalnya, informasi atau ulasan mengenai KMHA masih sangat minim. Melibatkan dua lembaga adat terkait posisi masyarakat di SAP Kepulauan Raja Ampat pun cukup sulit dipertemukan di pertemuan resmi forum KMHA di tingkat kabupaten. Namun dengan intensif pembentukan tim dari dinas yang dipimpin oleh Bappeda Raja Ampat cukup terbukti mampu mengawal lahirnya SK panitia KMHA di Raja Ampat yang terbit pada bulan Agustus 2021 lalu. Diskusi informal para tim kerja saat itu menjadi format cukup intensif membangun pemahaman yang sama dan saling berbagi peran mewujudkan Panitia KMHA ini di tingkat kabupaten.

Untuk Rote, pendekatan di Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKTAPB) atau forum adat cukup intensif dan perlu waktu lama untuk melihat posisi FKTAPB di forum tingkat kabupaten. Dukungan untuk memperbesar peran FKTAPB di tingkat kabupaten juga dilakukan hingga revitalisasi kelembagaan FKTAPB untuk mendukung peran-peran adat dalam diskusi tentang KMHA. Namun tantangan terbesar pendampingan FKTAPB di awal karena keputusan sifatnya *hak prerogatif* ketua adat sehingga intervensi keputusan kolektif tidak bisa dilakukan.

Sementara itu, kondisi kesehatan Ketua FKTAPB mempengaruhi pada keaktifan beliau dalam mengawal kegiatan hingga tingkat desa. Sehingga kegiatan di desa hanya dikawal perwakilan FKTAPB yang tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Kemudian pendekatan beralih untuk inisiasi di tingkat dinas, dimana Bappelitbangda Rote menjadi *leading sector* untuk proses ini.

Saat itu momentumnya pas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kemendagri untuk pembentukan Panitia KMHA di tingkat kabupaten, identifikasi, dan verifikasi wilayah KMHA di tingkat kabupaten dan menerbitkan dukungan kebijakan KMHA kemudian melaporkan di tingkat provinsi dan kementerian. Diskusi awal disambut baik, Plt. Bappelitbang Rote Ndao segera menadbirkan Kabag Hukum Kabupaten Rote Ndao untuk memulai proses diskusi hingga terbitnya SK Panitia KMHA di bulan Agustus 2021. Surat Keputusan Panitia KMHA Rote Ndao lebih dulu terbit dibandingkan di Raja Ampat—meskipun draf SK Panitia/Pokja KMHA Raja Ampat telah masuk lebih awal. Dukungan tim kabupaten cukup kondusif dan berjalan baik hingga semangat mengenai pengakuan dan perlindungan KMHA benar-benar terealisasi hingga saat ini proses penerbitan peraturan daerah mengenai pengaturan kelembagaan adat di Rote Ndao masih terus berjalan.

## Outcome 2.

**Output 2.1:** Tersedianya **draft kajian akademis/naskah akademik** untuk usulan pengakuan dan perlindungan KMHA

**Output 2.2.:** Tersusunnya **kajian baseline dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan** terhadap pelaksanaan Right-based Fisheries Management (RBFM)

**Output 2.3.:** Kajian **ekonomi dan biologi di tingkat nasional** yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan input, output and process control untuk sumber daya udang di **WPP 718**

**Output 2.4:** Tersedianya **kajian bio-ekonomi sederhana** di 3 lokasi KMHA sasaran bagi rencana RB-SFM)

**Output 2.5:** Tersedianya **Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan** berbasis hak (Right-Based Sustainable Fisheries Management atau RB-SFM) di 3 KMHA

### Capaian:

- ✓ Dokumen kajian Baseline dan kajian dampak
- ✓ Draft naskah/kajian akademik pengakuan dan perlindungan KMHA di 2 kabupaten
- ✓ Laporan Analisa modelling Bioekonomi di WPP 718
- ✓ Dokumen Bioekonomi Sederhana di 3 KMHA
- ✓ Dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Hak di (3 KMHA)

## Outcome 3

**Output 3.1:** **Berkembangnya kemitraan** kelompok dampingan

**Output 3.2.:** **Menguatnya kapasitas KMHA dampingan**

**Output 3.3.:** **Terimplementasi pengolahan hasil tangkapan** serta menguatnya kapasitas kelompok dalam pengolahan hasil tangkapan

**Output 3.4:** Tersedianya **pembelajaran dari pilot activities** di berupa best management practices (BMPs), 4 buku: *Pengakuan dan perlindungan KMHA, Pengelolaan RBFM, Rencana Pengelolaan Perikanan, Kemitraan.*

**Output 3.5.** Terlaksananya workshop/lokakarya pembelajaran dan komitmen adopsi BMPS

### Capaian:

- ✓ Pendampingan Kelompok dan pemetaan kebutuhan alat untuk pengembangan usaha 8 kelompok raja ampas, 4 kelompok di Rote
- ✓ Pengadaan alat dukungan RBFM dan Pengolahan Hasil Perikanan di 6 kelompok di raja ampas dan 3 kelompok di Rote
- ✓ Kemitraan dalam pengembangan unit usaha kelompok serta pengawasan: Rote: 4 PKS di Oelua, 4 PKS di Sotimori
- ✓ Buku Pembelajaran: 4 BMP's (**BMP's 1:** Pengakuan dan Perlindungan KMHA, **BMP's 2:**RBFM, **BMP's 3:** RPP berbasis hak, **BMP's 4:** Kemitraan )
- ✓ Laporan workshop diseminasi dan berita acara rekomendasi/komitmen penerapan BMP's)

Mengawal kegiatan di *outcome 2* dan *3* simultan dengan pendampingan kelompok dan komunikasi dengan tim kerja dari dinas. Sementara di Raja Ampat, kegiatan di *outcome 2* dan *3* selalu dilakukan di dalam kerja tim Pokja KMHA SAP Raja Ampat, sehingga tim inti dari Yayasan PILI, BKKPN Kupang Satker Raja Ampat, Dinas Perikanan, dan BPPP Ambon selalu bekerja bersama ketika turun ke kampung untuk memulai pembentukan kelompok, mengawal kajian, hingga membangun kemitraan.

Pendampingan di Rote Ndao lebih banyak dilakukan oleh CO lokal yang ada di dua desa dengan fasilitator dan asisten fasilitator lapangan.

Dua tipe pendekatan yang berbeda ini merupakan langkah yang disesuaikan dengan lokus dan peta *stakeholder* saat pemetaan partisipatif dilakukan. Hal ini tentunya dikawal *management project* di bawah manajer program untuk melihat dinamika pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan tentunya bisa kita tarik beberapa catatan yang kita sebut sebagai tantangan dan pembelajaran. Secara umum tantangan dan pembelajaran seperti berikut:



Adapun untuk dokumen pembelajaran secara rinci sudah ada dalam empat buku BMP. Catatan pembelajaran secara umum bisa dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Dinamika kelompok dalam penguatan kelembagaan**

Salah satu yang penting untuk diperhatikan dalam pembentukan kelembagaan adalah dinamika kelompok. Dinamika dari kelompok-kelompok masyarakat di tiga KMHA dampingan Yayasan PILI cukup beragam. Untuk Desa Oelua, dinamika kelompok kental dengan perbedaan pendapat anggota atas keputusan pengurus dan anggota kelompok. Begitu juga pendampingan kelompok oleh desa, masih kental dengan intervensi kelompok oleh pihak yang dominan.

Di Desa Sotimori, karena kelompok masih dalam satu lembaga— meskipun ada tiga divisi, aktivitas utama sebagai petani budidaya rumput laut cukup padat. Walau demikian, pertemuan kelompok dan juga penambahan anggota kelompok masih bisa mewadahi lingkaran personal anggota. Konflik perorangan jarang terjadi, karena kepala desa cukup berperan aktif dalam pembentukan kelompok sehingga komunikasi dua arah lebih mudah dan cukup baik.

Sedangkan untuk kelompok di Mutus, pemahaman kelompok masih berproses meski lebih lambat daripada Rote. Hal ini tentunya pengaruh atas akses informasi dan transportasi anggota masyarakat yang bergabung dengan kelompok lebih terbatas daripada di Rote Ndao. Delapan kelompok di Mutus cukup kuat untuk motivasi usaha perikanan, sehingga kerjasama dalam kelompok cukup baik. Perubahan signifikan di kelompok pengolahan hasil perikanan dengan hasil yang sudah bisa dilihat peningkatan dan perbaikan teknik pengeringan dengan alat yang digunakan.

#### **b. Penguatan kemitraan**

Penguatan kemitraan di proyek ini tidak sekedar capaian akhir proyek tetapi jembatan untuk dukungan ke arah kemandirian kelompok. Begitu juga bagi instansi dinas di kabupaten merupakan pintu masuk untuk meneruskan pendampingan terhadap kelompok.

Proses pendampingan kelompok yang kontinyu diperlukan untuk strategi pendekatan kepada kelompok pasca proyek. Selain itu, kelompok bisa mengkomunikasikan kebutuhannya kepada para pihak termasuk dinas-dinas terkait, untuk bisa dimasukkan dalam rencana anggaran yang bisa didukung pemerintah setempat.

#### **c. Dukungan kebijakan daerah untuk praktik RBFM**

Dukungan kebijakan daerah untuk praktek RBFM terkait diperlukan untuk memperbanyak akses usaha perikanan kepada masyarakat adat yang belum tergabung dalam kelompok. Pemilihan *pilot site* tentunya tidak bisa dipungkiri pendampingan kelompok ini sangat terbatas. Untuk itu dukungan daerah penting sebagai upaya menyebarkan edukasi dan pemahaman tentang usaha perikanan. Baik disisi ekologis maupun teknis praktik RBFM untuk melindungi sumber daya ikan berkelanjutan.

Selain itu dukungan kebijakan daerah melalui alokasi dana desa untuk membeli produk kelompok pengolahan cukup membantu kelompok secara nyata beroperasi rencana kerja atau rencana pengelolaan perikanan yang sudah disusun. Begitu juga dukungan penguatan

peraturan desa atau peraturan kampung di tingkat tapak, cukup diterima baik untuk memayungi pelaksanaan denda adat yang sudah berlaku di dalam aturan adat/papadak/hohorok yang berlaku di Rote Ndao maupun peraturan adat yang berlaku di Raja Ampat.

#### **d. Pentingnya akses dan Pengakuan KMHA dalam perikanan berkelanjutan**

Pemberian akses dan upaya perlindungan terhadap KMHA penting untuk terus diberikan dukungan. Hal ini seiring dengan proses pengakuan KMHA di tingkat kabupaten. Dokumen pengakuan oleh pemerintah daerah sangat diperlukan untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di KMHA.

Akses dan perlindungan dalam pembelajaran pelaksanaan kegiatan ini lebih mudah dicapai, namun upaya pengakuan masih memerlukan proses dan perlu dikawal tim panitia KMHA. Salah akses yang bisa diberikan adanya keterlibatan masyarakat adat dalam forum-forum diskusi di tingkat kabupaten maupun regional sebagai sharing pengetahuan dan pemahaman. Bukti keterlibatan masyarakat adat untuk melestarikan sumber daya alam dan sumber daya ikan di sekitar tempat tinggalnya perlu didukung untuk pemberian akses hingga pengakuan. Karena itu juga mendapat mandat negara untuk melestarikan keragaman budayanya.

Hal optimal yang dicapai sehingga menjadi **catatan sukses** proyek ini antara lain:

##### **1. Membangun kolaborasi para pihak**

Dalam memulai kegiatan dan membangun tim lapangan pendekatan para pihak kunci diperlukan. Sehingga kerja-kerja bersama di tingkat tapak bisa berlanjut. Meskipun pendekatan dan level koordinasi berbeda antara Rote Ndao dan Raja Ampat, namun kerja kolaborasi ini cukup sukses untuk menjadi contoh di program atau proyek lain.

##### **2. Dukungan kebijakan pengakuan dengan terbitnya SK Panitia KMHA**

Di kedua kabupaten kegiatan yang menghasilkan produk hukum berupa SK Panitia KMHA yang ditandatangani bupati cukup berhasil. Satu tahun pelaksanaan kegiatan ini, kedua SK bisa dihasilkan dengan tim dinas yang berbagi peran mengawal hingga keluarnya keputusan ini. Proses detail di kedua kabupaten juga berbeda langkah dan juga strateginya karena tantangannya juga berbeda, namun capaian yang dihasilkan pada akhirnya cukup baik untuk menjadi kisah sukses.

##### **3. Pembentukan kelompok**

Pembentukan kelompok dilakukan di masing-masing desa atau kampung. Pembentukan kelompok diawali dengan proses diskusi pemangku kepentingan dan sudah dilakukan saat

kajian pemetaan partisipatif. Pembentukan kelompok juga melihat hasil pemetaan *stakeholder* dan disosialisasikan sesuai prosedur pembentukan kelompok yang ada di peraturan dinas perikanan. Pembentukan kelompok ini jumlah anggota serta struktur kepengurusan diambil sesuai dengan juklak yang ada, minimal 10 orang dalam satu kelompok dan ada ketua, sekretaris, dan bendahara di dalam strukturnya.

Baik di Rote Ndao maupun di Raja Ampat, proses pembentukan kelompok cukup lancar, hanya pemahaman atas pentingnya kelompok masih perlu edukasi dan input pengetahuan soal leadership dan pentingnya kelembagaan kelompok. Seiring dengan itu tentunya dinamika kelompok cukup berjalan baik. Kesesuaian antar individu maupun ketidakcocokan ide pun bisa diselesaikan dengan komunikasi antar personal. Hingga proyek ini berakhir, kelompok masih beraktifitas dengan usaha perikananannya baik budidaya, perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan maupun pengawasan mandiri.

#### **4. Pendampingan kelompok hingga kemitraan**

Proses pendampingan kelompok yang sudah terbentuk sudah melewati masa satu tahun ketika proyek ini berakhir. Hanya saja sebagai komitmen dan tanggung jawab untuk mengawal kemandirian kelompok PILI menerapkan strategi keberlanjutan dengan mengawal kelompok oleh CO lokal satu tahun pasca-proyek ini. Selain itu upaya pendampingan kelompok tetap dilakukan rutin dari mulai pembiasaan diskusi bulanan di setiap kelompok dan update progres capaian kinerja kelompok terhadap rencana kerja yang dilakukan.

Pendampingan kelompok ini salah satunya juga melakukan asistensi terkait pembuatan proposal teknis yang dikomunikasikan kepada dinas terkait. Hal ini pembiasaan anggota kelompok untuk meningkatkan level komunikasi dan mengawal motivasi kolektif di kelompok dampingan. Kegiatan ini mesti rutin dilakukan sebagai upaya mitigasi kelompok menjadi pasif karena tidak ada komunikasi intensif diantara anggota. Selain itu, kemitraan juga merupakan jembatan kelompok dalam melaporkan capaian-capaian usaha perikanan yang dilakukan untuk mendapatkan perbaikan teknis dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Selain upaya optimal, dengan keterbatasan ruang atau jarak lokasi dampingan dan keterbatasan waktu kurang lebih 20 bulan atas dukungan proyek ini, ada juga hal-hal yang **kurang optimal**. Adapun catatan yang kurang optimal dalam capaian proyek ini diantaranya:

## 1. Proses pengakuan KMHA di Kabupaten Raja Ampat

Pendampingan dalam menggulirkan proses pengakuan di Raja Ampat masih butuh waktu yang cukup lama. Diskusi peran aktif panitia KMHA harus terhenti karena proses pergantian jabatan kepala dinas di beberapa instansi. Dan ini tentunya mengulang dari awal proses pemahaman bersama terhadap upaya-upaya pengakuan dan perlindungan KMHA di Raja Ampat. Ada kurang lebih 4 kepala dinas berganti yang tadinya mengawal dan menjadi tim bersama di pembentukan KMHA. Tentunya ini perlu memebangun komunikasi ulang dan tata koordinasi dari awal untuk bisa berbagi peran kembali dalam upaya pengakuan KMHA di Raja Ampat.

Dari tahapan proses pengakuan dan perlindungan di Kabupaten Raja Ampat masih sebatas identifikasi wilayah adat di SAP Raja Ampat. Masih ada lima kampung lagi yang perlu pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi areal mencari di ruang laut SAP Raja Ampat. Tahapan selanjutnya mestinya penetapan wilayah KMHA di Raja Ampat dan dukungan kebijakan berupa PERDA pengaturan kelembagaan adat ataupun perlindungan KMHA di Raja Ampat.

## 2. Mekanisme *reward* untuk kelompok kurang tepat di tengah program.

Dalam proyek ini ada dukungan pemberian bantuan alat pendukung, hanya saja proses pemberian alat ini belum seiring dengan penguatan kelembagaan kelompok. Sehingga proses dinilai kurang tepat. Mestinya penguatan kelembagaan berjalan dan muncul inisiatif baru diberikan reward atas dukungan alat kepada anggota kelompok. Sehingga motivasi personal bergabung dalam kelompok tidak terpecah dengan adanya penerimaan bantuan alat. Hal ini tidak bisa dihindari karena durasi program sangat pendek dan menjadi capaian indikator yang harus terpenuhi ketika proyek ini selesai dikerjakan. Kedepannya, perlu memperhitungkan tata waktu prakondisi kelompok hingga benar-benar siap diberikan reward berupa bantuan alat pendukung.

Harapan ke depan, upaya perencanaan hingga tahap berakhirnya proyek bisa berisi roadmap pemberdayaan yang lebih baik lagi. Begitu juga dukungan para pihak dalam pemberian akses, perlindungan dan upaya pengakuan KMHA di daerah.

## 8. REKOMENDASI PENTING SEBAGAI TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL/*OUTPUT* SETELAH PROGRAM BERAKHIR DAN TANTANGANNYA

**Rekomendasi tindak lanjut/solusi:** Perlu dukungan pemerintah Kabupaten dalam mengawal panitia POKJA KMHA di Raja Ampat. Perlu kegiatan rutin PANITIA KMHA yang melibatkan FKTAB di rote Ndao terkait dengan inventarisasi dan identifikasi wilayah

kelola adat yang menjadi tugas daerah. Perlu pendampingan rutin kepada masyarakat desa atau kampung ke depan untuk melaksanakan RPP yang telah ada dan masih proses finalisasi dokumen. Perlunya pendampingan aktif untuk melibatkan masyarakat adat dalam pembahasan kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan SDA khususnya yang berinteraksi langsung dengan masyarakat adat di wilayahnya.

Kerja tim Panitia/POKJA baik di Kabupaten Rote Ndao maupun Raja Ampat perlu mendapatkan perhatian penting dari pemerintah setempat. *Political will* untuk meneruskan akses dan perlindungan KMHA ini sangat penting dan perlu disadari sebagai kebutuhan daerah. Untuk itu keaktifan forum adat dan juga diskusi di dalam tim panitia/POKJA KMHA mestinya terus berlanjut hingga proses penetapan wilayah kelola adat dan juga proses berjalannya perlindungan KMHA berjalan sebagaimana mestinya.

Kunci sinergi program dengan berbagai SKPD adalah perencanaan bersama dan keterlibatan program ini sejak awal. Untuk itu pembekalan untuk mendampingi kelompok melalui RPP berbasis hak musti menjadi komitmen bersama yang ditandai dengan alokasi pendanaan selanjutnya dari para pihak setelah program selesai. Upaya untuk membangun kemitraan juga menjadi penting sebagai salah satu *exit strategy* untuk terus mengawal kelompok sehingga mampu untuk mandiri secara institusi dan juga meningkatkan ekonomi serta pengetahuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Coleman, J. 1999. Social Capital in the Creation of Human Capital. Cambridge: Harvard University Press.
- Direktur Eksekutif Epistema Institute. Kelembagaan Negara Dan Masyarakat Adat Yang Diperlukan untuk Penguatan Hak Konstitusional Masyarakat Adat. Epistema Institute.
- Iswahyudi. Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Pelayanan Publik. PKPP. Lembaga Administrasi Negara.
- North DC. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. New York. USA.
- Parveen dan Showkat. 2017. In-depth Interview. Module.
- Soekanto, Soerjono. 2011. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tiwari, Reena, Marina Lommerse, Dianne Smith. 2014. M2 Models and Methodologies for Community Engagement. Springer Science – Business Media Singapore. Singapore.
- Arnstein SR. 1969. A Ladder of Citizen Participation. JAIP. Vol (35). No. 4. p: 216 – 224.
- Moynihn, D. P. 2003. Normative and Instrumental Perspective on Public Participation: Citizen.
- Summits in Washington, DC. The American Review of Public Administration. North DC. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. New York. USA.
- Wilcox, David. 1993. The Guide to Effective Participation. The Joseph Rowntree Foundation. UK.

### LAMPIRAN

## Lampiran 1. Daftar publikasi/produk komunikasi yang dihasilkan

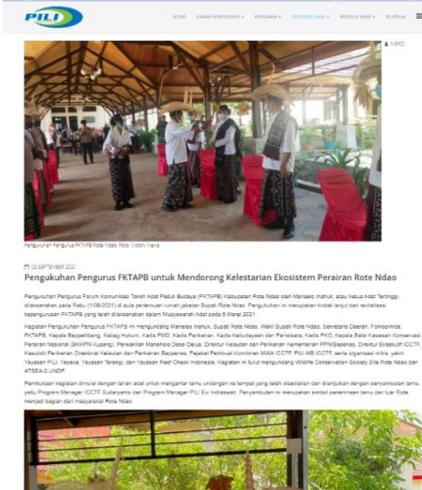
### Website PILI [www.pili.or.id](http://www.pili.or.id)



[Bappenas-ICCTF dan PILI Peduli Kesejahteraan 6 Pokmas di Raja Ampat](#)



[Mendukung Perikanan Berkelanjutan di Rote Ndao](#)



[Penguatan Pengurus FKTPAB untuk Mendorong Kelestarian Ekosistem Perairan Rote Ndao](#)



[Konservasi Terumbu Karang COREMAP-CTI dimulai di Raja Ampat](#)



**Perikanan Berkelanjutan untuk SAP Kepulauan Raja Ampat**

Walaupun Indonesia Timur terkenal dengan pariwisata alam yang indah dan kekayaan ragam hayati laut yang tinggi, saat ini belum ada peraturan Raja Ampat. Perikanan ini dipandang sebagai sumber komersial terutama di pulau Raja Ampat. Perikanan Raja Ampat adalah kawasan Marine Protected Area dan Perikanan RI No. 84/Men/2008.

Kawasan seluas 80.000 ha ini secara administratif masuk ke dalam Daerah Istimewa Barat dan berada di bawah pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Pulau Barat di sebelah utara perairan ini berbatasan dengan Pulau Waigeo, sebelah Timur dengan perairan Pulau Dore, sebelah Selatan dengan perairan Kepulauan Fakarua, sementara di sebelah Barat berbatasan dengan perairan Pulau Batangas dan Pulau Waikutun.

Sebagai pusat Dagang Terumbu Karang (DGT) Terumbu Karang Raja Ampat juga akan eksisisten secara karing dan bisa jadi semua dan menjadi salah satu dan legible karing dunia. Restorasi hasil perikanan sekitar 100 juta karing. 10 restorasi merupakan perikanan, sampai ini restorasi 70% dan karing dunia. Perikanan ini juga menjadi habitat bagi 500 jenis ikan karing serta 800 jenis moluska.

Terumbu karang yang di dalam wilayah SAP Kepulauan Raja Ampat, yaitu Terumbu Karang, Batu, Moluska, Molluscanaria, dan Waikutun merupakan yang tinggi di SAP Kepulauan Raja Ampat akan bisa diolah yang merupakan sumber dan bisa diolah.

Sebagai sumber perikanan di sini merupakan sektor perikanan seluas sumber perikanan. Namun perikanan di sini bukan berarti karena masalah yang signifikan masih tradisional, hal tersebut perikanan dan kemampuan dalam menangkap hasil perikanan juga menjadi satu karena bisa masyarakat lokal yang telah menjadi perikanan.



**Manaholo, Penjaga Laut di Ujung Selatan Indonesia**

Tiga tahun silam Perikanan Raja Ampat mengalami situasi yang sangat kritis. Saat itu, di Raja Ampat terdapat 100 perikanan yang sedang mengalami kerusakan dan saat ini perikanan ini sudah mulai pulih. Perikanan Raja Ampat ini adalah kawasan Marine Protected Area dan Perikanan RI No. 84/Men/2008.

Kawasan seluas 80.000 ha ini secara administratif masuk ke dalam Daerah Istimewa Barat dan berada di bawah pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. Pulau Barat di sebelah utara perairan ini berbatasan dengan Pulau Waigeo, sebelah Timur dengan perairan Pulau Dore, sebelah Selatan dengan perairan Kepulauan Fakarua, sementara di sebelah Barat berbatasan dengan perairan Pulau Batangas dan Pulau Waikutun.

Sebagai pusat Dagang Terumbu Karang (DGT) Terumbu Karang Raja Ampat juga akan eksisisten secara karing dan bisa jadi semua dan menjadi salah satu dan legible karing dunia. Restorasi hasil perikanan sekitar 100 juta karing. 10 restorasi merupakan perikanan, sampai ini restorasi 70% dan karing dunia. Perikanan ini juga menjadi habitat bagi 500 jenis ikan karing serta 800 jenis moluska.

Terumbu karang yang di dalam wilayah SAP Kepulauan Raja Ampat, yaitu Terumbu Karang, Batu, Moluska, Molluscanaria, dan Waikutun merupakan yang tinggi di SAP Kepulauan Raja Ampat akan bisa diolah yang merupakan sumber dan bisa diolah.

Sebagai sumber perikanan di sini merupakan sektor perikanan seluas sumber perikanan. Namun perikanan di sini bukan berarti karena masalah yang signifikan masih tradisional, hal tersebut perikanan dan kemampuan dalam menangkap hasil perikanan juga menjadi satu karena bisa masyarakat lokal yang telah menjadi perikanan.

Perikanan Berkelanjutan untuk SAP Kepulauan Raja Ampat

Manaholo, Penjaga Laut di Ujung Selatan Indonesia

**Instagram @pilirenetwork**





**Pelatihan Kajian Partisipatif Desa Otao dan Sotmedu, Rote Ndao**  
Kajian ini menggunakan metode diskusi dan berbagi pengetahuan antar sesama masyarakat.

**pilgreennetwork** Pelatihan kajian partisipatif Desa Otao dan Sotmedu Rote Ndao  
Kebudayaan masyarakat desa dengan wilayah administrasi yang berkembang. Pengaruh dan juga pemukiman administrasi sebagai faktor yang menjadi desa memiliki perlu perhatian. Begitu juga soal tanah adat dan juga pengetahuan adat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat di Rote Ndao.  
PILI Green Network melalui program COREMAP-CTI memulainya kegiatan kajian kearifan dan pemertanian partisipatif terhadap dua desa di kabupaten ini. Dua desa ini akan dibantu oleh tim untuk pengembangan perikanan berkelanjutan dengan mengadopsikan pengetahuan adat.  
Kebudayaan untuk mengetahui kata-kata yang ada potensi dan membangun dalam jiwa mereka oleh para penduduk. Selain itu, mereka juga mengembangkan wilayah perairan dan habitat (terumbu karang) untuk kegiatan pemertanian organik untuk pemertanian perikanan, zona Otao, Sotmedu dan lain sebagainya yang penting bagi masyarakat setempat.

Lihat insight  
Disukai oleh **epymotte** dan **22 lainnya**



**Taman Nasional Perairan LAUT SAWU**  
Sebagai kawasan konservasi, TNP Laut Sawu bisa menjadi basis pengembangan dan lokasi berkegiatan dan mendukung pertumbuhan pembangunan pariwisata.

**pilgreennetwork** Taman Nasional Perairan (TNP) merupakan tipe kawasan konservasi perairan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  
Salah satunya adalah TNP Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur (NTT). Laut Sawu terletak di Zona Cagar Budaya Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah peyala laut. Terasa Laut TNP Laut Sawu terbagi dalam dua wilayah yaitu Wilayah Perairan Selat Sumba dan selatannya dan Wilayah Perairan Terasa Sumba dan selatannya dengan luas total lebih dari 15 juta hektar.  
Laut Sawu beres dalam pembangunan di NTT karena hampir setengah luasnya berkearifan budaya yang sangat berharga yaitu Laut Sawu. Lebih dari 60% potensi terumbu karang yang ada di NTT dibentengi oleh Laut Sawu.  
Jika Anda pernah mendengar istilah wilayah terumbu karang dunia atau anggur karang (Coral Triangle), Laut Sawu termasuk di dalamnya.  
Sebelum beres memelihara lebih memadai untuk memelihara

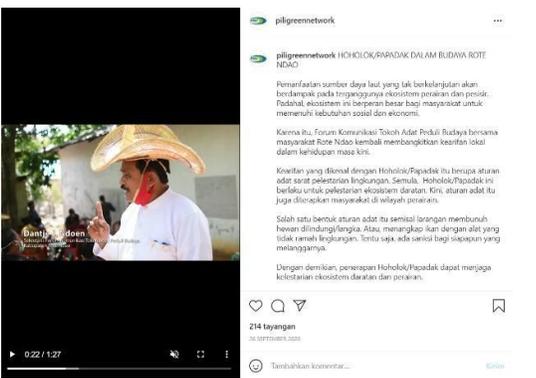
Lihat insight  
Disukai oleh **epymotte** dan **21 lainnya**



**ROTE NDAO, PULAU TERLUAR SELATAN INDONESIA**  
Rote menjadi pulau yang indah dan kaya dengan keindahan alam, khususnya dengan nama Kabupaten Rote Ndao melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 dengan BKA sebagai BUKA baktanya.

**pilgreennetwork** ROTE NDAO, PULAU TERLUAR SELATAN INDONESIA  
Rote merupakan pulau di bagian selatan Indonesia yang termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).  
Pulau Rote memiliki banyak adat. Beberapa masyarakat Rote sangat menghormati pulau ini. Untuk membangun masyarakat dengan "Tulu Desu Du Rota Hala" yang berarti Pulau yang Grogol. Kata lain adalah "Tulu Du Nao" yang berarti Pulau yang Harta dan "Tulu Du Nao" yang artinya Pulau yang Suci.  
Pulau ini terkenal dengan berbagai kota, wisata pantai, musik sampein, karnaval, dan tari-tari (T) Laga.  
Rote memiliki pulau-pulau kecil di sekitarnya berbatasan dengan kabupaten dengan nama Kabupaten Rote Ndao melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 dengan BKA sebagai BUKA baktanya.  
Hingga saat ini Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Loboan, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote

Lihat insight  
Disukai oleh **epymotte** dan **19 lainnya**



**HOBLOK/PAPADAK DALAM BUDAYA ROTE NDAO**

**pilgreennetwork** HOBLOK/PAPADAK DALAM BUDAYA ROTE NDAO  
Pemanfaatan sumber daya laut yang tak berkelanjutan akan berdampak pada terganggunya ekosistem perairan dan pesisir. Padahal, ekosistem ini berperan besar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi.  
Karena itu, Forum Komunitas "Tobak Adat Peduli Budaya" berinisiatif masyarakat Rote Ndao kembali membangkitkan kearifan lokal dalam kehidupan masa kini.  
Kearifan yang dimiliki dengan Hoblok/Papadak ini berupa aturan adat sangat pelestarian lingkungan. Sama halnya Hoblok/Papadak ini berlaku untuk pelestarian ekosistem daratan. Kini, aturan adat itu juga diterapkan masyarakat di wilayah perairan.  
Salah satu bentuk aturan adat itu sendiri larangan memburuh hewan dilindungi seperti ikan, mengutip: ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan, serta siapa saja yang melanggar yang dilanggarnya.  
Dengan demikian, penerapan Hoblok/Papadak dapat menjaga kelestarian ekosistem perairan dan pesisir.

Lihat insight  
Disukai oleh **epymotte** dan **21 lainnya**



**KONSERVASI LAUT SAWU DAN RAJA AMPAT**  
Pelatihan Pemetaan Partisipatif dan Kelembagaan Bersama Perwakilkan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Kampung Monev, Bano, Wening, Maramba & Mesomangaru)

**pilgreennetwork** KONSERVASI LAUT SAWU DAN RAJA AMPAT  
Pilgreennetwork PILI Green Network melalui program Coremap-CTI Sponsoring kegiatan kajian kearifan dan pemertanian partisipatif terhadap lima desa di Kabupaten Raja Ampat yang masuk ke dalam Situs Alam Perairan Raja Ampat, yaitu Desa ini adalah Desa Mubus, Bano, Wening, Maramba dan Mesomangaru, dan lokasi tersebut dipertahankan oleh Kabupaten Raja Ampat.  
Masyarakat Hukum Adat.  
Kegiatan pelatihan pemertanian partisipatif dan kearifan lokal ini dilakukan dengan metode diskusi dan berbagi pengetahuan antar masyarakat.  
#COREMAPCTI #KonservasiLingkungan #PusatInovasiLingkungan #PusatInovasiLingkungan #Kebudayaan #SDG #PusatInovasiLingkungan

Lihat insight  
Disukai oleh **epymotte** dan **25 lainnya**



**KONSERVASI LAUT SAWU DAN RAJA AMPAT**

**pilgreennetwork** KONSERVASI LAUT SAWU DAN RAJA AMPAT  
Pilgreennetwork PILI Green Network bersama Koordinator Suku Kuku Perairan Raja Ampat Bapak M. Saniyem dan Kabid PPSD Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat Bapak Zubada melakukan koordinasi dan diskusi terkait kegiatan kajian kearifan dan pemertanian partisipatif terhadap lima Kampung yang telah dilakukan di Kabupaten Raja Ampat.  
#COREMAPCTI #KonservasiLingkungan #PusatInovasiLingkungan #Kebudayaan #SDG #PusatInovasiLingkungan

Lihat insight  
Disukai oleh **epymotte** dan **33 lainnya**



**Kick Off Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative COREMAP-CTI**  
Masyarakat Masyarakat (B Sorong, Papua Barat, Juni 13/11) ini akan.

**pilgreennetwork** Kick Off Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative COREMAP-CTI  
Pusat Inovasi Lingkungan Indonesia (PILI) Green Network melalui program Coremap-CTI Sponsoring kegiatan kajian kearifan dan pemertanian partisipatif terhadap lima desa di Kabupaten Raja Ampat yang masuk ke dalam Situs Alam Perairan Raja Ampat, yaitu Desa ini adalah Desa Mubus, Bano, Wening, Maramba dan Mesomangaru, dan lokasi tersebut dipertahankan oleh Kabupaten Raja Ampat.  
Masyarakat Hukum Adat.  
Kegiatan pelatihan pemertanian partisipatif dan kearifan lokal ini dilakukan dengan metode diskusi dan berbagi pengetahuan antar masyarakat.  
#COREMAPCTI #KonservasiLingkungan #PusatInovasiLingkungan #PusatInovasiLingkungan #Kebudayaan #SDG #PusatInovasiLingkungan

Lihat insight  
Disukai oleh **epymotte** dan **37 lainnya**



**PELATIHAN KAJIAN BIOEKONOMI SEDERHANA SECARA PARTISIPATIF**  
BERSAMA KESALUAN MAHASISWA KAMPUS DAN BOONP KUPANG

**pilgreennetwork** PELATIHAN KAJIAN BIOEKONOMI SEDERHANA SECARA PARTISIPATIF BERSAMA KESALUAN MAHASISWA KAMPUS DAN BOONP KUPANG  
Narasumber:  
1. Ivan Fauz, S.S., M.Eng. - BOONP Kupang  
2. Tita Rospawati, M.S. - Sumbawa (Pusat Inovasi Lingkungan) 3. I. Soham Nival, M.Sc. - Praktis Hilang Perikanan  
Tanggal/Masa: Rabu/22 November 2020  
Waktu: 09:00 - 14:30 WITA  
Regulasi: <https://bit.ly/BioekonomiPerikanan>  
Pendaftaran Gratis  
✓ Dapikan E-sertifikat  
#COREMAPCTI #KonservasiLingkungan #PusatInovasiLingkungan #Kebudayaan #SDG #PusatInovasiLingkungan #PusatInovasiLingkungan #PusatInovasiLingkungan #PusatInovasiLingkungan

Lihat insight  
Disukai oleh **epymotte** dan **30 lainnya**



**pilgreennetwork**  
 Foto: Dharma Haryanto

**pilgreennetwork** Hih-hih! Jaspak! merupakan kawasan laut di Rote pada jang waktu administratif menjadi bagian dari Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Pada awalnya atasan ini dibentuk untuk mengelola sumber dan pelestarian berbagai lahan. Kini atasan hohohoh! jaspak fu diterapkan untuk kawasan laut.

Sangat lebih lengkap dapat dibaca pada website kami, www.pili.or.id

#Rote #RoteNdao #KabupatenRoteNdao #NusaTenggaraTimur #ICCTF #CoralReefRehabilitationandManagementProgram #CoralTriangleInitiative #COREMAP-CTI #SustainableDevelopmentGoals

28 May

Lihat insight

Disukai oleh **agengripud** dan 41 lainnya

11 reaksi

Tambahkan komentar...



**pilgreennetwork**  
 Foto: Dharma Haryanto

**pilgreennetwork** Dari Sabang sampai Merauke, kepulauan Indonesia dibentengi dan lindungi oleh tiga juta kilometer perahu laut. Indonesia memberangkas, menjadi rumah bagi ribuan nelayan laut. Masyarakat yang peduli, membuat segala bentuk manfaat. Termasuk lagi para nelayan di Bumi Nusantara.

Foto suasana pagi hari di Pantai Desaru, Kupang, NTT pada September 2020. Belakangan ini, masyarakat dan nelayan yang kembali dan membuat hasil tangkapan mereka.

Program Internasional Melawan Raut Rapih #Korupsi #Pungutan #Korupsi

27 May

Lihat insight

Disukai oleh **agengripud** dan 27 lainnya

10 reaksi

Tambahkan komentar...



**pilgreennetwork**  
 Foto: Dharma Haryanto

**pilgreennetwork** Kurang lebih 60 tahun sudah masyarakat Indonesia memperingati Hari Nelayan Nasional.

Melalui Hari Nelayan Nasional, pemerintah bersama masyarakat diharapkan dapat memperkuat pembangunan sarana hasil laut, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Semoga pesiaran Indonesia tetap lestari dan nelayan kita kian sejahtera.

Selamat Hari Nelayan Nasional!

[Sisa lebih lengkap tentang #HariNelayanNasional di pili.or.id]

#HariNelayanNasional #HariNelayanNasional2021 #Nelayan #Pili #Korupsi

28 May

Lihat insight

Disukai oleh **agengripud** dan 28 lainnya

10 reaksi

Tambahkan komentar...



**pilgreennetwork**  
 Foto: Dharma Haryanto

**pilgreennetwork** Hari #Panglaila.

Bantu NTT dan Rote Bergerak (1 April 2021) adalah bentuk dukungan NTT dan sekitarnya. Termasuk diantaranya adalah di Rote Ndao, kawasan proyek pembangunan masyarakat dan pelestarian pesisir yang sudah kami (PILSI dan Pili) selenggarakan.

alasan: Kita sudah rusak dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Rote ekonominya terpuruk, pasar tutup, nelayan tidak melaut. Dan pariwisata terkendala banjir dan lumpur.

Bantuan Anda sangat berarti bagi masyarakat NTT pada umumnya dan Rote pada khususnya agar dapat segera pulih dan bergerak lagi menata kehidupan dan masa depan.

Donasi dapat disalurkan melalui:

1. Membantu keluarga pesisir (makanan dan minuman)
2. Menyediakan alat sanitasi, tenda, dan barang-barang pendukung lainnya.
3. Menyediakan kebutuhan material, pemangkas, dan anak-anak seperti obat, sosis, popok, pembalut, dan kebutuhan-praktis lainnya.

Hashtag: #PrayForNTT #SaveRote #SaveNTT

Hubungi: 08578072389 (Fria Maya Shafira), 08572942028 (AUP)

23 May

Lihat insight

Disukai oleh **agengripud** dan 23 lainnya

10 reaksi

Tambahkan komentar...



**pilgreennetwork**  
 Foto: Dharma Haryanto

**pilgreennetwork** Pelatihan Kajian Partisipatif Desa Oelua dan Sotimori, Rote Ndao

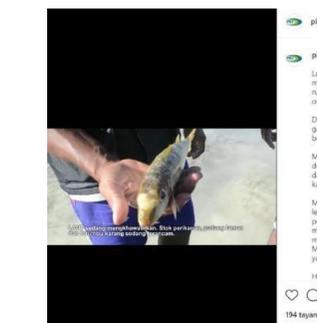
Keberadaan masyarakat desa dengan wilayah administratifnya terus berkembang. Perubahan dan juga peraturan administratif sebagai tanggapan sendiri desa memiliki perlu perubahan. Begitu juga soal tatanan adat dan juga pengetahuan yang menjadi bagian vital budaya masyarakat di Rote Ndao.

PILI Green Network melalui program Coremap-CTI menuai kegiatan kajian kebijakan dan pemetaan partisipatif terhadap dua desa di kabupaten ini. Dua desa ini akan dijadikan desa pilot untuk.

Liked by **nititiana** and 22 others

22 September 21, 2020

Add a comment...



**pilgreennetwork**  
 Foto: Dharma Haryanto

**pilgreennetwork** The Ocean's Life and Livelihoods

Laut tidak hanya menyediakan pemandangan yang indah dan menarik. Menjadi lebih dari 70% permukaan Bumi, laut menjadi rumah sekaligus penyedia sumber kehidupan bagi berbagai organisme di planet ini.

Dalam zaman yang semakin berkembang, laut juga dipandang sebagai kunci ekonomi. Diperkirakan, 40 juta orang dapat bekerja di industri berbasis kelautan tahun 2030 mendatang.

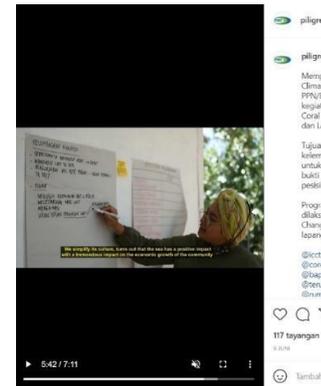
Meski memiliki manfaat dan potensi yang besar, laut membutuhkan dukungan manusia untuk menjaga keberadaannya. 30% penurunan dalam kondisi kesehatan ikan, dengan larum dan terumbu karang pun mengalami kerusakan.

Masyarakat Indonesia sendiri punya mimpi memiliki laut yang lestari di Rote Ndao NTT. Artinya, ada kelompok masyarakat pengawal laut yang disebut Manuholo. Manuholo bertugas untuk mengawal jalannya hohohoh! atau Papabab, sebuah aturan adat mengenai pelestarian lingkungan. Adanya Hoho!hohoh! dan Manuholo di Rote sendiri karena masyarakat merasa kelestarian laut yang kian terancam.

Hari ini, Seberkas Waberi Dharma Dasi memusatkan sebuah

194 tayangan

Tambahkan komentar...



**pilgreennetwork**  
 Foto: Dharma Haryanto

**pilgreennetwork** SELAMAT HARI LAUT SEDUNIA

Memperingati Hari Laut Sedunia pada 8 Juni 2021, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan seluruh mitra pelaksana mendokumentasikan kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) di Raja Ampat, Papua Barat dan Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur.

Tujuan COREMAP-CTI adalah memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir untuk menghasilkan informasi pengelolaan sumber daya berbasis bukti dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas.

Program ini didanai oleh hibah GEF melalui Bank Dunia yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas-Indonesia Climate Change Trust Fund bekerjasama dengan mitra pelaksana di lapangan.

@icctfofficial @coremapcti @bappenascti @teumbukarangindonesia @vismah-wisaka

117 tayangan

Tambahkan komentar...



**pilgreennetwork**  
 Foto: Dharma Haryanto

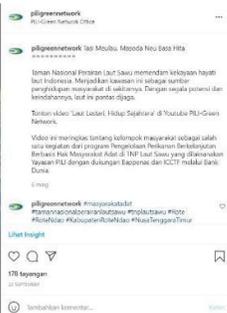
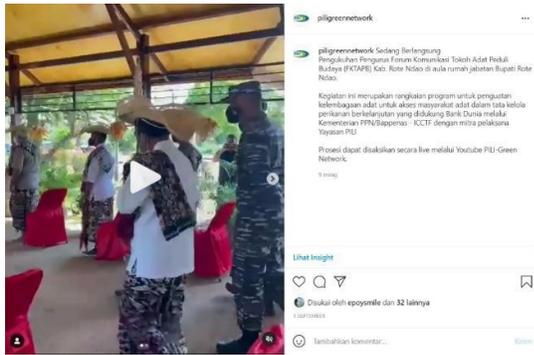
**pilgreennetwork** Sebagai tindak lanjut dari evaluasi pembangunan Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya (FKAPB) Kabupaten Rote Ndao pada 1 Maret 2021, akan dilakukan Pengukuhan Pengurus FKAPB oleh Manuholo Hoho!

Lihat insight

Disukai oleh **agengripud** dan 26 lainnya

11 reaksi

Tambahkan komentar...



**Youtube**  
**PILI-Green Network**



[mengail Maslahat di Laut Sawu](#)



[Laut Lestari Masyarakat Sejahtera](#)



[Pengukuhan Pengurus FKATAPB Rote Ndao](#)



[Hari Laut Sedunia](#)



[Hoholok/Papadak dalam Budaya Rote Ndao](#)

**Merchandise dan Banner Kegiatan**  
Kegiatan Penyusunan Laporan Kajian Kelayakan di Kupang  
Oktober 2020



## Kegiatan Dialog Pemangku Kepentingan (Rangkaian Kick Off Meeting) November 2020



## Kegiatan Workshop Bioekonomi Sederhana dan FGD Pemetaan Partisipatif November 2020



Merchandise Monitoring dan Evaluasi Paket 6 (April 2021), FGD Finalisasi RPP Berbasis Hak (Agustus 2021), dan Pengukuhan Pengurus FKTAAPB Rote Ndao (September 2021)



Factsheet Maret 2021

## AKSES MASYARAKAT ADAT

COREMAP-CTI FACT SERIES

**INFORMASI PROYEK**

**Mitra Pelaksana:**  
Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)

**Tujuan:**  
Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola sumber daya perikanan dan perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat di TNP Laut Sawu, Provinsi NTT dan SAP Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

**Periode:**  
Agustus 2020 - Februari 2022

**Lokasi:**  
TNP Laut Sawu dan SAP Raja Ampat

**PENDAHULUAN**

Kegiatan paket 6 adalah akses masyarakat adat dalam tata kelola perikanan berkelanjutan di Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat.

Kegiatan awal yang telah dilakukan adalah penyediaan data dan informasi bagi para pemangku melalui kajian kelayakan kelembagaan adat dan juga pemetaan partisipatif atas informasi adat di tiga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA).

Kegiatan ini akan mengoptimalkan kemitraan masyarakat adat dalam pengawasan perairan dan perikanan berkelanjutan di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dan Raja Ampat, Papua Barat.

**SASARAN**

- Menguatnya kelembagaan KMHA untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat.
- Berkembangnya praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal oleh KMHA.
- Implementasi rencana pengelolaan perikanan secara berkelanjutan berbasis masyarakat (RB-SFM) di wilayah kabupaten sasaran.

**CAPAIAN**

Capaian Paket 6 hingga Maret 2021 yaitu:

- Kesepakatan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) KMHA.
- Kajian kelayakan di dua lokasi pilot.
- Pemetaan partisipatif tenurial system KMHA di dua lokasi pilot.
- Kajian baseline sosial ekonomi dan lingkungan mengenai praktik RB-SFM.
- Data primer hasil survei sumber daya udang sebagai dukungan terhadap kajian bioekonomi sumber daya udang secara nasional.
- Hasil analisis dan modeling sumber daya udang yang dapat dijadikan masukan dan referensi dalam penyusunan rencana pengelolaan berbasis hak.
- Pembentukan kelompok masyarakat di Desa Oelua dan Sotimori, Rote Ndao, serta di Kampung Mutus, Raja Ampat.

Peta lokasi kegiatan Paket 6 di TNP Laut Sawu

Peta lokasi kegiatan Paket 6 di SAP Kepulauan Raja Ampat

Kegiatan observasi laut di Kampung Mutus

☎ 0251 8657 002

📷 piligreennetwork

🌐 www.pili.or.id

Factsheet November 2021

**PAKET 6**  
**Berangkat dari Adat:**  
**Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat**

**PROGRAM COREMAP-CTI - BAPPENAS - ICCTF - PILI**

Melalui Program Kegiatan Paket 6 Program COREMAP-CTI, Bappenas - ICCTF bersama Yayasan PILI melakukan kegiatan yang berkaitan dengan RBSFM (Right based Sustainable Fisheries Management). RBSFM merupakan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang memadukan kearifan lokal dan sains.

Kegiatan awal yang telah dilakukan adalah penyediaan data dan informasi bagi para pemangku kepentingan melalui kajian kelayakan kelembagaan adat dan juga pemetaan partisipatif atas informasi adat di lokasi kajian.

**TUJUAN**

- Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola sumber daya pesisir dan perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat di lokasi program.

**SASARAN**

- Menguatnya kelembagaan adat untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- Berkembangnya praktik pengelolaan perikanan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
- Implementasi rencana pengelolaan perikanan secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

0251-8657002 | piligreennetwork | pili.or.id

**Kabupaten Rote Ndao**

**NUSAK DENGKA**  
DESA OELUA, KEC. LOAHOLU  
KAB. ROTE NDAO

**NUSAK LANDU**  
DESA SOTIMORI, KEC. LANDU LEKO  
KAB. ROTE NDAO

- Desa Oelua: 8 dusun, 5 dusun merupakan dusun pesisir.
- Mata pencaharian: nelayan dan budidaya rumput laut
- Aturan adat: Haholak Haholak yang berlaku di darat diapakai dan diterapkan di perairan
- Manaholo laut sebagai pengawas dan penegak Haholak
- Tiga Kelompok Masyarakat
  - KUB Bintang Selatan
  - Kelompok Tulufali
  - Manaholo Desa Oelua

- Desa Sotimori: 4 dusun
- Mata pencaharian: budidaya rumput laut dan nelayan
- Aturan adat: Papadak Papadak merupakan sebutan khusus di wilayah Timur Rote
- Manaholo laut sebagai pengawas dan penegak Papadak
- Satu Kelompok Masyarakat Nale Tasi, memiliki 3 dhuvi:
  - Dwisi Petani Budidaya
  - Dwisi Pengolahan
  - Dwisi Pengawasan

**Pengukuhan Pengurus FKTA PB**

**Pemetaan Partisipatif**

**Penutupan Peralatan Pendukung RBSFM dan Pengolahan Hasil Tangkapan**

0251-8657002 | piligreennetwork | pili.or.id

**CAPAIAN**

- Penguatan kelembagaan forum adat di Rote Ndao dan pembentukan Panitia/Pokja KMHA di Raja Ampat.
- Kajian kelayakan, pemetaan partisipatif, analisis dan modeling citra satelit, kajian baseline sosial ekonomi dan lingkungan, dan kajian bioekonomi mengenai RBSFM.
- Survei, analisis dan modeling sumber daya udang sebagai dukungan terhadap kajian bioekonomi nasional.
- Pembentukan kelompok masyarakat/Pokmas di Desa Oelua dan Sotimori (Rote Ndao) dan Kampung Mutus (Raja Ampat).
- Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Berbasis Hak
- Pengadaan dan pendampingan penggunaan peralatan pendukung RBSFM dan pengolahan hasil tangkapan untuk Pokmas.

**PERIODE**  
Agustus 2020 - Februari 2022

**LOKASI PROGRAM**

TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga ditetapkan sebagai kawasan konservasi

- KEPMEN-KP No. 5 Tahun 2014: Taman Perairan Laut Sawu (TNP-LS).
- KEPMEN-KP No. 64 Tahun 2009: Suska Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat (SAP-KRA)

Sebagai kawasan konservasi, kedua perairan ini menjadi basis pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Program ini akan mengoptimalkan kemitraan masyarakat adat dalam pengawasan perairan dan perikanan berkelanjutan di TNP Laut Sawu dan SAP Kepulauan Raja Ampat.

**TNP Laut Sawu Kabupaten Rote Ndao**

Kabupaten Rote Ndao termasuk salah satu dari 10 kabupaten yang berada di TNP Laut Sawu. Dua lokasi pilot program berada di Kabupaten Rote Ndao yaitu Desa Oelua dan Desa Sotimori. Sistem wilayah di Kabupaten Rote Ndao disebut dengan Nusak, terbagi dalam 19 Nusak. Desa Oelua termasuk dalam wilayah Nusak Dengka dan Desa Sotimori masuk ke dalam wilayah Nusak Landu.

**Diskusi dengan Para Pemangku**

**Pemetaan Partisipatif**

**Observasi Batas Laut**

**Kajian Bioekonomi Sederhana**

0251-8657002 | piligreennetwork | pili.or.id

**SAP Kepulauan Raja Ampat**

Terdapat 5 kampung yang termasuk dalam SAP Kepulauan Raja Ampat yaitu Kampung Manyatun, Meemanggara, Mutus, Waislip, dan Bianci. Pulau-pulau ini dipercaya merupakan tanah ulayat masyarakat Suku Maya. Namun demikian masyarakat yang bermukim berasal dari Suku Betow/Beser yang merupakan sub suku Biak yang telah lama bermukim di Raja Ampat.

**KAMPUNG MUTUS, KAB. RAJA AMPAT**

- Kampung Mutus dipilih menjadi lokasi kajian dan model pengembangan dari program atas kesepakatan dalam pertemuan forum tiga tungsu 5 kampung di SAP Kepulauan Raja Ampat.
- Mata pencaharian utamanya yaitu nelayan.
- 8 Kelompok Masyarakat
  - Pokmaswas Berawan Jaya
  - Pokmaswas Namani
  - Poklahsar Manyardo
  - Pokladalan Inglat
  - KUB Ingkonem
  - KUB Mujar
  - Poklahsar Mandemor
  - Pokladalan Karasawan

**Pemetaan Partisipatif**

**Observasi Batas Laut**

**Kajian Bioekonomi Sederhana**

0251-8657002 | piligreennetwork | pili.or.id

Factsheet Maret 2022



### TNP Laut Sawu

Kabupaten Rote Ndao termasuk salah satu dari 10 kabupaten yang berada di TNP Laut Sawu. Kebanyakan penduduk Rote Ndao bekerja sebagai nelayan. Saat tidak bisa melaut, mereka akan melakukan budi daya rumput laut atau berkebun. Orang Rote mengenal kearifan lokal yang disebut 'hoholok' atau 'papadak' untuk mengelola sumber daya terestrial dan perairan kearifan lokal ini dilawisi oleh penjaga adat yang disebut 'manaholo'.

*Manaholo, seorang pembudi daya rumput laut di kawasan perikanan laut Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.*

Sebelum kemerdekaan, Rote menganut sistem pemerintahan kerajaan yang disebut 'nusak' dengan pemimpin yang disebut 'manak' atau raja. Setelah kemerdekaan, sembilan belas nusak yang ada di Rote Ndao setara dengan tingkat kecamatan. Oelua di bagian barat dan Sotimori di bagian timur Rote, dipilih sebagai dua lokasi kegiatan Yayasan PILI.

#### DESA OELUA, KECAMATAN LOAHLU

- Dahulu Oelua masuk dalam wilayah Nusak Dengka, kerajaan terbesar dari 19 nusak di Rote Ndao.
- Secara administratif Oelua berada di Kecamatan Loahlou.
- Terdapat delapan dusun, lima di antaranya merupakan dusun pesisir.
- Mata pencaharian penduduk Oelua didominasi nelayan tangkap.
- Yayasan PILI membentuk tiga kelompok masyarakat dalam bidang perikanan:
  - Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bintang Selatan
  - Kelompok Pengolah dan Pemasar (Paklahsar) Tulufali
  - Manaholo Desa Oelua

#### DESA SOTIMORI, KECAMATAN LANDU LEKO

- Dahulu Sotimori masuk dalam wilayah Nusak Landu, kerajaan tertua yang budayanya paling dihormati.
- Secara administratif berada di Kecamatan Landu Leko.
- Terdapat empat dusun di Sotimori.
- Mata pencaharian penduduk Sotimori didominasi petani budidaya rumput laut.
- Yayasan PILI membentuk satu kelompok masyarakat:
  - Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Nole Tasi, terdiri dari:
    - Divisi pengolahan dan pemasaran perikanan
    - Divisi pengawasan ekosistem pesisir dan laut

☎ 0251 8657 002    📷 piligreennetwork    🌐 www.pili.or.id

### KAMPUNG MUTUS, DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN

Melalui diskusi 'Tiga Batu Satu Tungku' bersama ketua adat, kepala kampung, dan ketua agama dari masing-masing kampung, Mutus dipilih sebagai lokasi kegiatan Yayasan PILI.

Masyarakat Mutus mengenal kearifan lokal 'kabur' yang lambat laun diucapkan sebagai 'kabur'. Cerita mistis yang disematkan dalam area yang di-kabus akan membuat orang tidak mengeksplorasi sumber daya di wilayah tersebut.

Setelah Agama Kristen Protestan masuk Mutus pada 1950-an, diperkenalkanlah aturan tanpa cerita mistis. Kabus diganti dengan sasi gereja dan sasi adat. Masuknya Kristen Protestan juga melahirkan konsep 'Tiga Batu Satu Tungku' sebagai unsur pemimpin kampung.

Secara administratif, Mutus berada di Distrik Waigeo Barat Daratan. Penduduk Mutus masih mengandalkan perikanan tangkap sebagai pekerjaan utama.

Yayasan PILI mencoba mendorong potensi di bidang perikanan lainnya, dengan membentuk delapan kelompok masyarakat:

- KUB Inkonom
- KUB Mujur
- Paklahsar Manyarida
- Paklahsar Mandemor
- Pakdakan Ingoi
- Pakdakan Karaswan
- Kelompok Masyarakat Pengawas (Pakmaswas) Barawan Jaya
- Pakmaswas Mambri

### SAP Kepulauan Raja Ampat

Terdapat 5 kampung yang termasuk dalam SAP Kepulauan Raja Ampat yaitu Kampung Manyalfun, Meosmanggara, Mutus, Waisilip, dan Bianci. Pulau-pulau ini dipercaya merupakan tanah ulayat masyarakat Suku Maya. Namun demikian masyarakat yang bermukim berasal dari Suku Betew/Beser yang merupakan sub-suku Biak yang telah lama bermukim di Raja Ampat.

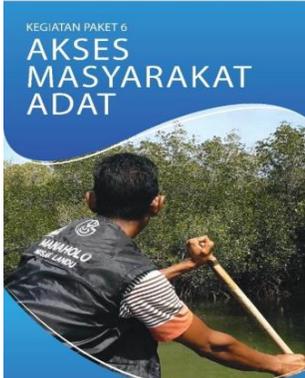


*Pembuatan kebun karang di Kampung Mutus, Raja Ampat untuk rehabilitasi ekosistem perairan.*

☎ 0251 8657 002    📷 piligreennetwork    🌐 www.pili.or.id

## Audiensi dengan Bupati Rote Ndao April 2021

\*kegiatan tidak jadi dilakukan karena badai seroja



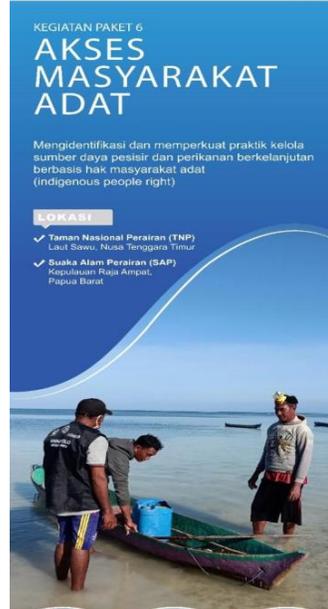
### KEGIATAN PAKET 6 AKSES MASYARAKAT ADAT

Akses masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan akan mengoptimalkan kemitraan dalam pengawasan perairan dan perikanan berkelanjutan di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dan Raja Ampat, Papua Barat.

**LOKUS**

- AKSES MASYARAKAT ADAT  
PILI mendorong pengakuan dan perfindungan kelembagaan adat oleh pemerintah, sehingga masyarakat adat memiliki akses untuk mengelola wilayah perairannya.
- MODEL DESA BELAJAR DI TIGA KMNA  
Desa belajar dibentuk untuk memperluas pengetahuan terkait pengelolaan perikanan. Lokasi yang akan dijadikan model yaitu Desa Sotimori dan Oelua di Rote Ndao, dan Kampung Mutus di Raja Ampat.

PILI Green Network  
Yayasan Pusat Inovasi Lingkungan Indonesia  
Jl. Tembungung Wamengki No.200 Cendana, Doreri Baran, Jember Barat, Indonesia  
☎ 0251 8657002    🌐 www.pili.or.id    📷 piligreennetwork



### KEGIATAN PAKET 6 AKSES MASYARAKAT ADAT

Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola sumber daya pesisir dan perikanan berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat (indigenous people right)

**LOKASI**

- ✓ Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur
- ✓ Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat

PILI Green Network  
Yayasan Pusat Inovasi Lingkungan Indonesia  
Jl. Tembungung Wamengki No.200 Cendana, Doreri Baran, Jember Barat, Indonesia  
☎ 0251 8657002    🌐 www.pili.or.id    📷 piligreennetwork

## Lampiran 2: Dokumen List aset dan penyerahan aset

No	Kegiatan	Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Total Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah BMN	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
1	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Fiber box ikan / Cool box	TANAGA	2021	12	Unit	800.000	9.600.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
2	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Mesin tepung ikan		2021	1	Unit	6.250.000	6.250.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
3	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Mesin pencacah daging		2021	4	Unit	396.000	1.584.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
4	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Mesin Pengemas Vacuum		2021	4	Unit	676.500	2.706.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
5	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Kemasan (Product Packaging)		2021	1	Paket	15.900.000	15.900.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
6	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Timbangan Digital Sedang ukuran 40 kg	SAYAKI	2021	1	Unit	660.000	660.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
7	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Cold Storage, powered by Solar PV		2021	2	Unit	43.000.000	86.000.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik

No	Kegiatan	Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Total Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah BMN	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
8	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Spinner pengering Abon		2021	1	Pcs	2.640.000	2.640.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
9	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Tandon Air 1050 L	PINGUIN	2021	1	Unit	2.400.000	2.400.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
10	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Seragam Lapangan		2021	6	Set	451.000	2.706.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
11	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Pompa Air (jet pump)	SHIMIZU	2021	1	Unit	2.090.000	2.090.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
12	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Alat Instalasi Mesin Pompa Air		2021	1	Set	4.400.000	4.400.000	Baru	Poklhasar Tulufali	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
13	Peralatan Pendukung RBSFM	Fiber box ikan / Cool box	TANAGA	2021	12	Unit	830.500	9.966.000	Baru	KUB Bintang Selatan	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
14	Peralatan Pendukung RBSFM	Alat snorkling (lengkap)	AMSCUD	2021	6	Set	1.045.000	6.270.000	Baru	KUB Bintang Selatan	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
15	Peralatan Pendukung RBSFM	Lampu tanda untuk pukot	Warning Light - DZ	2021	60	Pcs	451.000	27.060.000	Baru	KUB Bintang Selatan	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
16	Peralatan Pendukung RBSFM	Senter selam	LAKUGE	2021	6	Pcs	253.000	1.518.000	Baru	KUB Bintang Selatan	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
17	Peralatan Pendukung RBSFM	Pelampung tanda (mooring boy)	YQE	2021	60	Pcs	88.000	5.280.000	Baru	KUB Bintang Selatan	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
18	Peralatan Pendukung RBSFM	Senter kepala (headlamp)	DONY MS309	2021	6	Pcs	429.000	2.574.000	Baru	KUB Bintang Selatan	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik

No	Kegiatan	Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Total Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah BMN	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
19	Peralatan Pendukung RBSFM	Cold Storage, powered by Solar PV		2021	1	Unit	46.000.000	46.000.000	Baru	KUB Bintang Selatan	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
20	Peralatan Pendukung RBSFM	Sepatu Karet		2021	12	Pasang	520.000	6.240.000	Baru	KUB Bintang Selatan	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
21	Peralatan Pendukung RBSFM	Seragam Lapangan		2021	6	Set	500.500	3.003.000	Baru	KUB Bintang Selatan	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
22	Peralatan Pendukung RBSFM	Life Jacket	GREN	2021	12	Pcs	230.000	2.760.000	Baru	KUB Bintang Selatan	Desa Oelua, Kec. Loaholu, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
23	Peralatan Pendukung RBSFM	PV Energy Storage		2021	1	Unit	9.100.000	9.100.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
24	Peralatan Pendukung RBSFM	Tali (6mm) bentangan	RODA IKAN	2021	1000	tali	20.020	20.020.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
25	Peralatan Pendukung RBSFM	Pelampung besar (ukuran 40 cm)		2021	2000	Pcs	18.480	36.960.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
26	Peralatan Pendukung RBSFM	Pelampung kecil (ukuran 30 cm)		2021	3000	Pcs	14.520	43.560.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
27	Peralatan Pendukung RBSFM	Tali ikat bibit nilon (2 mm)		2021	50	Roll	29.000	1.450.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
28	Peralatan Pendukung RBSFM	Patok besi (ukuran 1 meter)		2021	2000	Pcs	72.930	145.860.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
29	Peralatan Pendukung RBSFM	Kacamata selam besar	TAFFSPORT	2021	20	Pcs	137.500	2.750.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
30	Peralatan Pendukung RBSFM	Sepatu karet		2021	20	Pasang	522.500	10.450.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
31	Peralatan Pendukung RBSFM	Alat Pengerang Rumput Laut (Para-para tatakan jemur rumput laut)		2021	30	Unit	12.044.500	361.335.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik

No	Kegiatan	Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Total Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah BMN	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
32	Peralatan Pendukung RBSFM	Seragam lapangan		2021	20	Set	500.500	10.010.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
33	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Mesin pencetak stik		2021	5	Unit	385.000	1.925.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
34	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Mesin pengemasan		2021	4	Unit	660.000	2.640.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
35	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Kemasan (Product Packaging)		2021	1	Paket	15.900.000	15.900.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
36	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Mesin pengering rumput laut		2021	2	Unit	2.310.000	4.620.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
37	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Celemek		2021	5	Pcs	77.000	385.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
38	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Waring		2021	4	Roll	440.000	1.760.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
39	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Pompa Air (jet pump)	SHIMIZU	2021	1	Unit	2.200.000	2.200.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
40	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Tandon Air 1050 L	PINGUIN	2021	1	Unit	2.145.000	2.145.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik

No	Kegiatan	Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Total Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah BMN	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
41	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Alat Instalasi Mesin Pompa Air		2021	1	Set	4.400.000	4.400.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
42	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Blender	MIYAKO	2021	5	Unit	495.000	2.475.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
43	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Mixer (besar)	PHILIPS	2021	4	Unit	740.000	2.960.000	Baru	Pokdakan Nale Tasi	Desa Sotimori, Kec. Landu Leko, Kab. Rote Ndao	Kondisi Baik
44	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Fiber box ikan / Cool box	TANAGA	2021	11	Unit	800.000	8.800.000	Baru	Poklhasar Mandemor	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
45	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	PV Energy Storage		2021	1	Unit	10.100.000	10.100.000	Baru	Poklhasar Mandemor	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
46	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Mesin Pengemas Vacuum		2021	2	Unit	660.000	1.320.000	Baru	Poklhasar Mandemor	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
47	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Kemasan (Product Packaging)		2021	1	Paket	15.900.000	15.900.000	Baru	Poklhasar Mandemor	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
48	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Timbangan Gantung	WEIHENG	2021	1	Unit	330.000	330.000	Baru	Poklhasar Mandemor	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik

No	Kegiatan	Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Total Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah BMN	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
49	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Pembersih Sisik Ikan (manual)		2021	5	Unit	55.000	275.000	Baru	Poklhasr Mandemor	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
50	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Pembersih sisik ikan (charger)	GETRA HR-85B	2021	5	Unit	770.000	3.850.000	Baru	Poklhasr Mandemor	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
51	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Seragam Lapangan		2021	13	Set	450.000	5.850.000	Baru	Poklhasr Mandemor	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
52	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Alat pengering ikan mekanis sistem udara hembus		2021	5	Unit	7.103.250	35.516.250	Baru	Poklhasr Mandemor	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
53	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Fiber box ikan / Cool box	TANAGA TNG60	2021	17	Unit	800.000	13.600.000	Baru	Poklhasr Manyarido	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
54	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	PV Energy Storage		2021	1	Unit	10.100.000	10.100.000	Baru	Poklhasr Manyarido	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
55	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Mesin Pengemas Vacuum		2021	2	Unit	660.000	1.320.000	Baru	Poklhasr Manyarido	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
56	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Timbangan Gantung	WEIHENG	2021	1	Unit	330.000	330.000	Baru	Poklhasr Manyarido	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik

No	Kegiatan	Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Total Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah BMN	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
57	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Pembersih Sisik ikan (manual)		2021	5	Unit	55.000	275.000	Baru	Poklhasr Manyarido	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
58	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Pembersih sisik ikan (charger)	GETRA HR-85B	2021	5	Unit	770.000	3.850.000	Baru	Poklhasr Manyarido	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
59	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Seragam Lapangan		2021	17	Set	450.000	7.650.000	Baru	Poklhasr Manyarido	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
60	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Alat pengering ikan mekanis sistem udara hembus		2021	5	Unit	7.103.250	35.516.250	Baru	Poklhasr Manyarido	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
61	Peralatan Pendukung RBSFM	PV Energy Storage		2021	1	Unit	12.350.000	12.350.000	Baru	KUB Inkonem	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
62	Peralatan Pendukung RBSFM	Fiber box ikan / Cool box	TANAGA TNG60	2021	16	Unit	830.500	13.288.000	Baru	KUB Inkonem	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
63	Peralatan Pendukung RBSFM	Lampu Darurat	SURYA SQL L3001	2021	5	Unit	82.500	412.500	Baru	KUB Inkonem	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
64	Peralatan Pendukung RBSFM	Senter Kepala (headlamp)	DONY	2021	16	Unit	423.500	6.776.000	Baru	KUB Inkonem	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
65	Peralatan Pendukung RBSFM	Helm Proyek		2021	16	Unit	88.000	1.408.000	Baru	KUB Inkonem	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
66	Peralatan Pendukung RBSFM	Life Jacket	GREN	2021	16	Set	230.000	3.680.000	Baru	KUB Inkonem	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat	Kondisi Baik

No	Kegiatan	Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Total Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah BMN	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
											Daratan, Kab. Raja Ampat	
67	Peralatan Pendukung RBSFM	Seragam Lapangan		2021	16	Set	469.219	7.507.500	Baru	KUB Inkonem	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
68	Peralatan Pendukung RBSFM	Alat Pancing		2021	16	Set	1.047.200	16.755.200	Baru	KUB Inkonem	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
69	Peralatan Pendukung RBSFM	PV Energy Storage		2021	1	Unit	12.350.000	12.350.000	Baru	KUB Mujur	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
70	Peralatan Pendukung RBSFM	Fiber box ikan / Cool box	TANAGA TNG60	2021	10	Unit	830.500	8.305.000	Baru	KUB Mujur	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
71	Peralatan Pendukung RBSFM	Lampu Darurat	SURYA SQL L3001	2021	5	Unit	82.500	412.500	Baru	KUB Mujur	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
72	Peralatan Pendukung RBSFM	Senter Kepala (headlamp)	DONY	2021	10	Unit	423.500	4.235.000	Baru	KUB Mujur	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
73	Peralatan Pendukung RBSFM	Helm Proyek		2021	10	Unit	88.000	880.000	Baru	KUB Mujur	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
74	Peralatan Pendukung RBSFM	Life Jacket	GREN	2021	10	Set	230.000	2.300.000	Baru	KUB Mujur	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
75	Peralatan Pendukung RBSFM	Seragam Lapangan		2021	11	Set	500.500	5.505.500	Baru	KUB Mujur	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
76	Peralatan Pendukung RBSFM	Alat Pancing		2021	10	Set	1.047.200	10.472.000	Baru	KUB Mujur	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik

No	Kegiatan	Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Total Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah BMN	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
77	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	PV Energy Storage		2021	1	Unit	10.100.000	10.100.000	Baru	Pokdakan Ingkoi	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
78	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Seragam Lapangan		2021	16	Set	451.000	7.216.000	Baru	Pokdakan Ingkoi	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
79	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Fiber box ikan / Cool box	TANAGA TNG60	2021	16	Unit	808.500	12.936.000	Baru	Pokdakan Ingkoi	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
80	Peralatan Pendukung RBSFM	Jaring Apollo		2021	16	Pcs	76.000	1.216.000	Baru	Pokdakan Ingkoi	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
81	Peralatan Pendukung RBSFM	Scoope Net /serokan ikan		2021	16	Unit	75.000	1.200.000	Baru	Pokdakan Ingkoi	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
82	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	PV Energy Storage		2021	1	Unit	10.100.000	10.100.000	Baru	Pokdakan Koraswan	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
83	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Seragam Lapangan		2021	10	Set	451.000	4.510.000	Baru	Pokdakan Koraswan	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
84	Peralatan Pendukung Pengolahan Hasil Tangkapan	Fiber box ikan / Cool box	TANAGA TNG60	2021	10	Unit	808.500	8.085.000	Baru	Pokdakan Koraswan	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
85	Peralatan Pendukung RBSFM	Jaring Apollo		2021	10	Pcs	76.000	760.000	Baru	Pokdakan Koraswan	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik

No	Kegiatan	Jenis Barang	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Total Perolehan (Rp)	Kondisi	Penerima Hibah BMN	Lokasi	Hasil Pemeriksaan
86	Peralatan Pendukung RBSFM	Scoope Net /serokan ikan		2021	10	Unit	75.000	750.000	Baru	Pokdakan Koraswan	Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kab. Raja Ampat	Kondisi Baik
<b>Total</b>								<b>1.248.604.700</b>				

## Lampiran 3. Dokumen pendukung pembuktian capaian indikator untuk setiap output

### Output 1.1

#### Perbup Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA

  
**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ROTE NDAO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

#### SK Bupati Raja Ampat

**BUPATI RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT  
NOMOR : 188/48/SK-BRA/VIII/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA DAN KELOMPOK KERJA KESATUAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT DI SUKA ALAM PERAIRAN KABUPATEN RAJA AMPAT**

**BUPATI RAJA AMPAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat maka perlu di bentuk Panitia dan Kelompok Kerja (POKJA) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Suaka Alam Perairan (SAP) Kabupaten Raja Ampat;  
b. bahwa untuk mengakui dan menghormati Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Suaka Alam Perairan Kabupaten Raja Ampat;  
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan identitas budaya Masyarakat Hukum Adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman;  
d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Raja Ampat tentang Pembentukan Panitia Dan Kelompok Kerja Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Suaka Alam Perairan Kabupaten Raja Ampat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

#### SK Bupati Rote Ndao

  
**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 504/KEP/BER/2021**

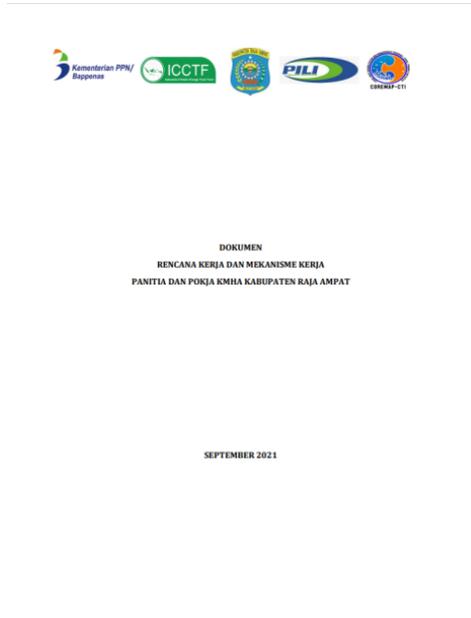
**TENTANG  
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATER ROTE NDAO**

**BUPATI ROTE NDAO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;  
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Rote Ndao, maka perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Rote Ndao;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

## Draft Rencana dan Mekanisme Kerja Panitia dan Pokja KMHA Kab. Raja Ampat



### V. MEKANISME KERJA PANITIA DAN POKJA KMHA KABUPATEN RAJA AMPAT

Mekanisme kerja Panitia dan Pokja KMHA yaitu tugas Rinci Panitia dan Pokja KMHA sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu pada SK adalah sebagai berikut.

Mekanisme kerja Panitia yaitu tugas Rinci Panitia KMHA sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu pada SK adalah:

- Mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat hukum adat secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- Menyediakan sarana yang diperlukan masyarakat hukum adat dalam rangka menjaga kelestarian dan keutuhan adat istiadat, tradisi dan wilayah adat;
- Melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat;
- Melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat di Kabupaten Raja Ampat;
- Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja KMHA untuk membentuk Forum KMHA dalam pengelolaan dan perlindungan adat di Kabupaten Raja Ampat;
- Memantau dan mengevaluasi kinerja Kelompok Kerja KMHA dan Forum KMHA;
- Tugas - tugas lain yang dipandang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak - hak masyarakat hukum adat.

Mekanisme kerja Panitia yaitu tugas Rinci Kelompok Kerja KMHA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Forum KMHA dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan bersama berbasis adat di wilayah SAP Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat dengan mematuhi perundangan yang berlaku
- Membuat dan menetapkan Struktur, Rencana Kerja, Mekanisme Kerja serta Kelembagaan Forum KMHA untuk kemudian meminta persetujuan Panitia KMHA;
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada para pihak;

Tugas - tugas lain yang dipandang perlu dilakukan dalam rangka pembentukan Forum KMHA SAP Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak - hak masyarakat hukum adat.

- Siti Kelompok Kerja KMHA-SAP Raja Ampat bersifat sementara, secara otomatis akan membubarkan diri setelah Forum KMHA terbentuk melalui SK Bupati dengan menyerahkan laporan peranggung jawaban tugas kepada Panitia KMHA

## Draft Rencana dan Mekanisme Kerja Panitia dan Pokja KMHA Kab. Rote Ndao

DOKUMEN  
RENCANA KERJA DAN MEKANISME KERJA  
PANITIA MHA KABUPATEN ROTE NDAO

SEPTEMBER 2021

### III. Anggota Panitia MHA

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao	Ketua
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rote Ndao	Sekretaris
3.	PIL Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Rote Ndao	Anggota
4.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao	Anggota
5.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Rote Ndao	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rote Ndao	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kab. Rote Ndao	Anggota
8.	Camat Landuleko	Anggota
9.	Camat Rote Timur	Anggota
10.	Camat Pantai Baru	Anggota
11.	Camat Rote Tengah	Anggota
12.	Camat Lobalain	Anggota
13.	Camat Rote Selatan	Anggota
14.	Camat Rote Barat Laut	Anggota
15.	Camat Rote Barat Daya	Anggota
16.	Camat Rote Barat	Anggota
17.	Camat Ndao Nuse	Anggota

### IV. MEKANISME KERJA PANITIA MHA KABUPATEN ROTE NDAO

Mekanisme kerja Panitia yaitu tugas Rinci Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu pada SK adalah melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui tahapan- tahapan:

- Identifikasi Masyarakat Hukum Adat dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat yang dilakukan dengan mencermati sejarah Masyarakat Hukum Adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat.
- Mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

## Output 1.2

### Modul Kajian Kelayakan Kelembagaan



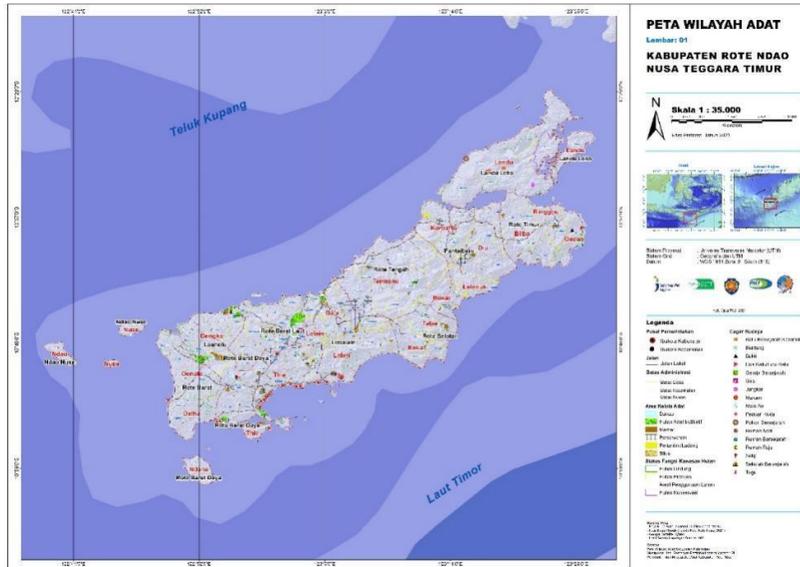
## Output 1.3

### Modul Pemetaan Partisipatif dan Pelaksanaan Prinsip FPIC



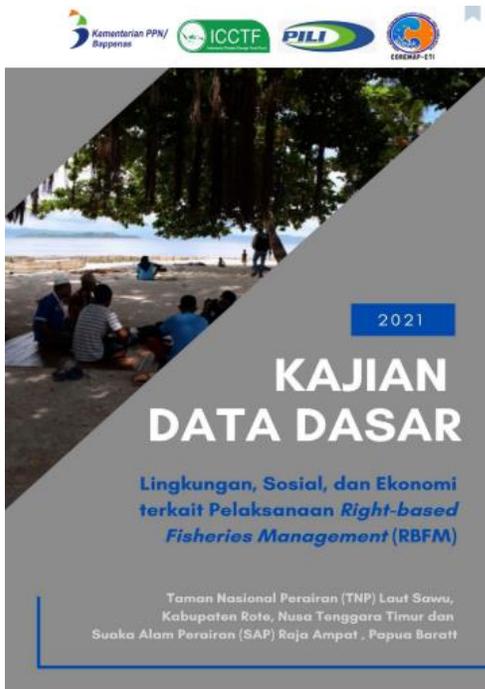
## Output 2.1

### Peta Wilayah Kelola Adat



## Output 2.2

### Kajian *Baseline* Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

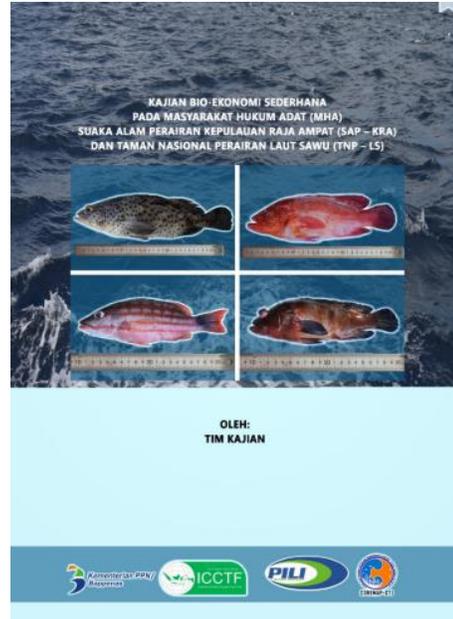


### Kajian Dampak Tata Kelola Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Bersama MHA



## Output 2.4

### Dokumen Kajian Bioekonomi Sederhana di SAP Kepulauan Raja Ampat dan TNP Laut Sawu



## Output 2.5

### A. Dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan

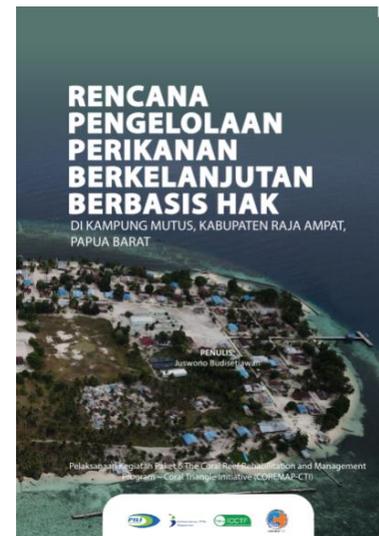
#### Desa Sotimori



#### Desa Oelua



#### Kampung Mutus



B. Berita Acara Pembentukan Kelompok Kabupaten Raja Ampat

Berita Acara Pokdakan Ingkoi

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS PERIKANAN. BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIAYA PERIKANAN (POKDAKAN) "INGKOI" KAMPUNG MUTUS No. 523.1/ 57 / III / 2021. Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul, 20.00 WIT. s/d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik Waigo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempunan dan masyarakat.

Berita Acara Pokdakan Korasuwan

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS PERIKANAN. BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIAYA PERIKANAN (POKDAKAN) "KORASWAN" KAMPUNG MUTUS TIMUR No. 523.1/ 57 / III / 2021. Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul, 20.00 WIT. s/d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik Waigo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempunan dan masyarakat.

Berita Acara KUB Inkonem

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS PERIKANAN. BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PENANGKAPAN IKAN "INKONEM" KAMPUNG MUTUS No. 523.1/ 57 / III / 2021. Pada Hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul, 20.00 WIT. s/d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik Waigo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempunan dan masyarakat.

Berita Acara KUB Mujur

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS PERIKANAN. BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PENANGKAPAN IKAN "MUJUR" KAMPUNG MUTUS TIMUR No. 523.1/ 57 / III / 2021. Pada Hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul, 20.00 WIT. s/d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik Waigo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempunan dan masyarakat.

Berita Acara Poklahsar Mandemor

Berita Acara Poklahsar Manyarido

**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**DINAS PERIKANAN**  
*Alamat : Waiau, Distrik Waiau Kota*

**BERITA ACARA**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGOLAHAN IKAN DAN PEMASARAN**  
**"POKLAHSAR MANDEMOR" KAMPUNG MUTUS TIMUR**  
No. 523.1/ / III / 2021

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul, 20.00 WIT, s/d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik Waigeo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan masyarakat.

Telah dilaksanakan penetapan Pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan (POKLAHSAR) "MANDEMOR" dengan Keputusan sebagai berikut :

1. **Identitas Kelompok**
  - a. Nama Kelompok : Mandemor
  - b. Alamat : Kampung Mutus Timur, Distrik Waigeo Barat daratan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
  - c. Jumlah Anggota : 8 Orang
  - d. Jenis Usaha : Pengolahan Ikan (Ikan Asin, Abon Ikan, Krupuk Ikan, Fishik Ikan, Sambal Ikan).
2. **Susunan Pengurus**
  - a. Ketua : Adolfince Sauyai
  - b. Sekretaris : Lenora Makusi
  - c. Bendahara : Adriana Manggara
  - d. Anggota : *Sesuai Daftar terlampir.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani bersama untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.

Penyuluh Perikanan  
Kabupaten Raja Ampat  
**John Pieter Mainake, S.Pi**  
Nip. 19781012 200506 1 001

Ketua Kelompok  
**Adolfince Sauyai**

Mengetahui,  
KEPALA DINAS  
**MARTHEUS L.R. BARTHOLOMEUS, ST, MSI**  
NIP. 19801031 200502 1 006

**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**DINAS PERIKANAN**  
*Alamat : Waiau, Distrik Waiau Kota*

**BERITA ACARA**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASARAN PRODUK**  
**PERIKANAN (POKLAHSAR) "MANYARIDO" KAMPUNG MUTUS**  
No. 523.1/ / III / 2021

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul, 20.00 WIT, s/d selesai bertempat di kantor LPS/TK Kampung Mutus Distrik Waigeo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat, telah di selenggarakan Pertemuan yang di hadiri oleh Unsur Pemerintah Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan dan masyarakat.

Telah dilaksanakan penetapan Pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan (POKLAHSAR) "MANYARIDO" dengan Keputusan sebagai berikut :

1. **Identitas Kelompok**
  - a. Nama Kelompok : Manyarido
  - b. Alamat : Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat daratan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
  - c. Jumlah Anggota : 13 Orang
  - d. Jenis Usaha : Pengolahan Ikan (Ikan Asin, Abon Ikan, Krupuk Ikan, Fishik Ikan, Sambal Ikan).
2. **Susunan Pengurus**
  - a. Ketua : Ambrosius Mambaku
  - b. Sekretaris : Lenorence Dimara
  - c. Bendahara : Korina Mayor
  - d. Anggota : *Terlampir.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani bersama untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.

Penyuluh Perikanan  
Kabupaten Raja Ampat  
**John Pieter Mainake, S.Pi**  
Nip. 19781012 200506 1 001

Ketua Kelompok  
**Ambrosius Mambaku**

Mengetahui,  
KEPALA DINAS  
**MARTHEUS L.R. BARTHOLOMEUS, ST, MSI**  
NIP. 19801031 200502 1 006

## C. SK Pembentukan Kelompok Kab. Raja Ampat

### SK Pokdakan Ingkoi



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN**  
**NOMOR : 66 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN (POKDAKAN)**  
**"INGKOI"**  
**KAMPUNG MUTUS DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN**  
**KABUPATEN RAJA AMPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran kegiatan budaya perikanan melalui organisasi kelompok, maka dipandang perlu membentuk kelompok budaya perikanan (POKDAKAN) dan menetapkan pengurus dan anggota kelompok budaya perikanan (POKDAKAN).
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok dan pengurus yang dapat menjalankan kegiatan sebuah Kelompok Budaya Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

**SK KUB Inkonem**

### SK Pokdakan Koraswan



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT**  
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN**  
**NOMOR : 67 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN (POKDAKAN)**  
**"KORASWAN"**  
**KAMPUNG MUTUS TIMUR DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN**  
**KABUPATEN RAJA AMPAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran kegiatan budaya perikanan melalui organisasi kelompok, maka dipandang perlu membentuk kelompok budaya perikanan (POKDAKAN) dan menetapkan pengurus dan anggota kelompok budaya perikanan (POKDAKAN).
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok dan pengurus yang dapat menjalankan kegiatan sebuah Kelompok Budaya Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

**SK KUB Mujur**



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
NOMOR : 62 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PENANGKAPAN IKAN  
"INKONEM" KAMPUNG MUTUS DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN  
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran kegiatan perikanan melalui organisasi kelompok, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok usaha bersama dan menetapkan pengurus dan anggota kelompok usaha bersama.
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok dan pengurus yang mampu menjalankan kegiatan sebuah Kelompok Usaha Bersama Penangkapan Ikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : Pertama : Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penangkapan Ikan "INKONEM" di Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat.

## SK Poklhasar Mandemor



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
NOMOR : 60 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASARAN  
PRODUK PERIKANAN (POKLAHSAR) "MANDEMOR"  
KAMPUNG MUTUS TIMUR DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN  
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran kegiatan pengolahan produk perikanan melalui organisasi kelompok, maka dipandang perlu membentuk kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan (POKLAHSAR) dan menetapkan pengurus dan anggota kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan (POKLAHSAR).
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok dan pengurus yang dapat menjalankan kegiatan sebuah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

## SK Pokmaswas Barawan Jaya



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
NOMOR : 61 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PENANGKAPAN IKAN  
"MUJUR" KAMPUNG MUTUS TIMUR DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN  
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran kegiatan perikanan melalui organisasi kelompok, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok usaha bersama dan menetapkan pengurus dan anggota kelompok usaha bersama.
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok dan pengurus yang mampu menjalankan kegiatan sebuah Kelompok Usaha Bersama Penangkapan Ikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

MEMUTUSKAN :  
Menetapkan : Pertama : Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penangkapan Ikan "MUJUR" di Kampung Mutus Timur, Distrik Waigeo Barat Daratan Kabupaten Raja Ampat.

## SK Poklhasar Manyarido



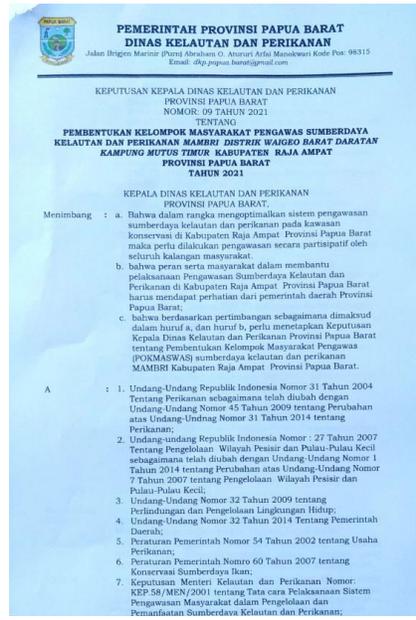
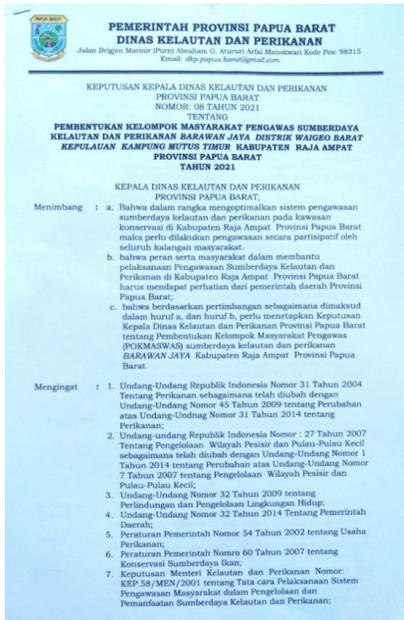
PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
NOMOR : 62 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASARAN  
PRODUK PERIKANAN (POKLAHSAR) "MANYARIDO"  
KAMPUNG MUTUS DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN  
KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN RAJA AMPAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan kelancaran kegiatan pengolahan produk perikanan melalui organisasi kelompok, maka dipandang perlu membentuk kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan (POKLAHSAR) dan menetapkan pengurus dan anggota kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan (POKLAHSAR).
- b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota kelompok dan pengurus yang dapat menjalankan kegiatan sebuah Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

## SK Pokmaswas Mambri

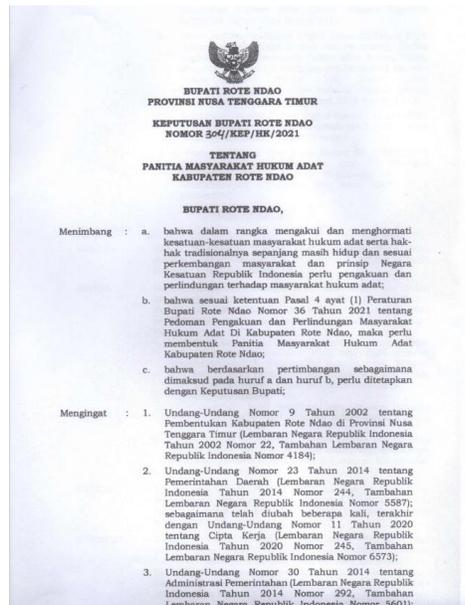


**Kab. Rote Ndao**

**SK Pokdakan Naletasi**



**SK Poklhasr Tulufali**



## SK KUB Bintang Selatan



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA OELUA  
KECAMATAN LOAHOLU  
KABUPATEN ROTE NDAO**

Nomor : 140 / 44 / DOL / II / 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG  
PENGUKUHAN KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN PENANGKAP IKAN  
"Bintang Selatan"**

**DESA OELUA**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, perlu diupayakan peningkatan pembinaan terhadap para Penangkap Ikan sehingga mempunyai jiwa wirausaha,
  - bahwa untuk memudahkan pembinaan teknis maupun non teknis terhadap para pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah pesisir, terutama yang mempunyai niat mengembangkan usaha agribisnis perikanan maka perlu dibentuk Kelompok Usaha
  - bahwa sebagai media untuk Peningkatan Kemampuan Kelompok Usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan agar dapat berfungsi sebagai Unit Usaha Perikanan, Unit Usaha Keuangan Mikro Perikanan dan Unit Usaha Penunjang lainnya sehingga menjadi Organisasi Usaha yang kuat,
  - bahwa pembentukan Kelompok Usaha Bersama Nelayan Penangkap Ikan KUB Bintang Selatan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan,
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang Penangkapan Ikan
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
  - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078).

## SK Revitalisasi Manoholo Oelua



**FORUM KOMUNIKASI TOKOH ADAT PEDULI BUDAYA  
(FKTAPB)  
KABUPATEN ROTE NDAO**  
Sekretariat : Jln. Nusaklain, Kelurahan Mokdale

**SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR : 18/FKTAPB/VII/2021**

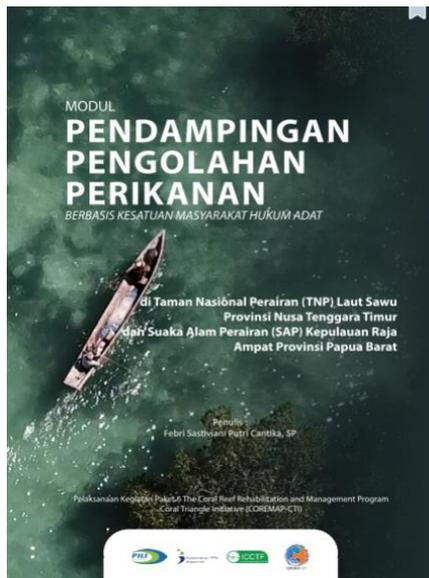
**TENTANG  
REVITALISASI MANAHOLO DESA OELUA DALAM MENDUKUNG  
SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT TAMAN NASIONAL PERAIRAN LAUT  
SAWU DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
FORUM KOMUNIKASI TOKOH ADAT PEDULI BUDAYA  
KABUPATEN ROTE NDAO,**

- Menimbang** :
- bahwa Penerapan kearifan lokal papadak/hoholok dilakukan guna mendukung pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Rote Ndao sebagai bagian dari Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu;
  - bahwa pemberlakuan hoholok/papadak untuk tahap awal, dilaksanakan dengan pembentukan Manaholo (Pengawas Papadak Hoholok) yang di fokuskan pada 3 (tiga) Nusak (Wilayah Kerajaan) yaitu Nusak Dengka, Nusak Termanu dan Nusak Landu;
  - bahwa dalam pelaksanaan masa bakti manaholo terjadi pemekaran wilayah Desa
  - bahwa anggota manaholo di Desa Oelua sudah tidak relevan dan diperlukan adanya Revitalisasi keperguruan.
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya Kabupaten Rote Ndao.
- Mengingat** :
- Undang - undang tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

## Output 3.2

### Modul Pendampingan Pengolahan



## Output 3.3.

### Berita Acara Penitipan Barang

**BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BANTUAN PEMERINTAH  
HIBAH BANK DUNIA ICCTF - BAPPENAS  
CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM  
CORAL TRIANGLE INITIATIVE PROJECT (COREMAP-CTI) GEF TF15470  
Nomor: 001/BAP/PILI-GP6/11/2021**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 02 November 2021, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Evi Indraswati  
NIK : 3271055101780008  
Jabatan : Program Manager Paket 6 Yayasan PILI  
Alamat : Jl.Tumenggung Wiradireja No.216 Cmahpar Begor 16155

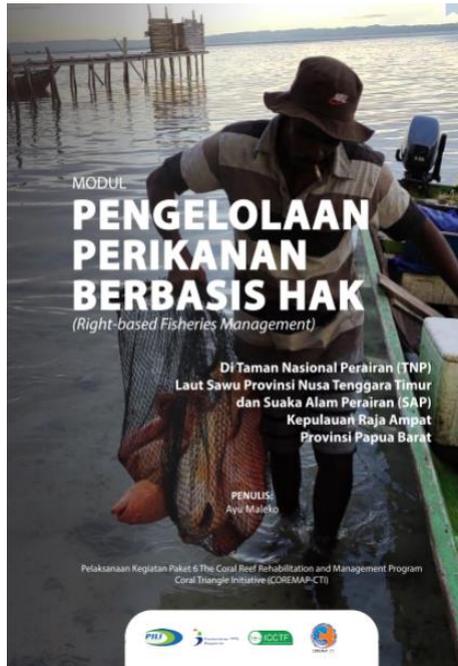
Yang dalam hal ini bertindak sesuai kewenangan yang diterima untuk dan atas nama Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Mitra Pelaksana Paket 6: Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Zeth Yapen  
Jabatan : Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) INKONEM  
Alamat : Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat

Yang dalam hal ini bertindak sesuai kewenangan yang diterima untuk dan atas nama Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) INKONEM, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Penitipan Sementara Barang Bantuan Pemerintah Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat yang berasal dari Hibah Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI) dari Bank Dunia dan ICCTF - Bappenas sebagai *Implementing Partner* dengan ketentuan sebagai berikut:

## Modul Pengelolaan Perikanan



## Berita Acara Penitipan Barang

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BANTUAN PEMERINTAH  
HIBAH BANK DUNIA ICCTF - BAPPENAS  
CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM  
CORAL TRIANGLE INITIATIVE PROJECT (COREMAP-CTI) GEF TF15470  
Nomor: 005/BAP/PILI-GP6/11/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal 02 November 2021, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Evi Indraswati  
NIK : 3271055101780008  
Jabatan : Program Manager Paket 6 Yayasan PILI  
Alamat : Jl.Tumenggung Wiradireja No.216 Cimahpar Bogor 16155

Yang dalam hal ini bertindak sesuai kewenangan yang diterima untuk dan atas nama Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) Mitra Pelaksana Paket 6: Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

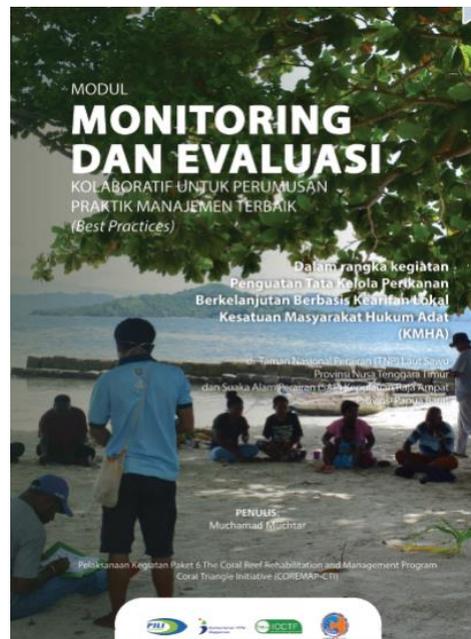
2. Nama : Adolince Sauyai  
Jabatan : Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan (POKLAHSAR) MANDEMOR  
Alamat : Kampung Mutus, Distrik Waigeo Barat Daratan, Kabupaten Raja Ampat

Yang dalam hal ini bertindak sesuai kewenangan yang diterima untuk dan atas nama Ketua Kelompok Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan (POKLAHSAR) MANDEMOR, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Penitipan Sementara Barang Bantuan Pemerintah Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Barat yang berasal dari Hibah Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP - CTI) dari Bank Dunia dan ICCTF - Bappenas sebagai *Implementing Partner* dengan ketentuan sebagai berikut:

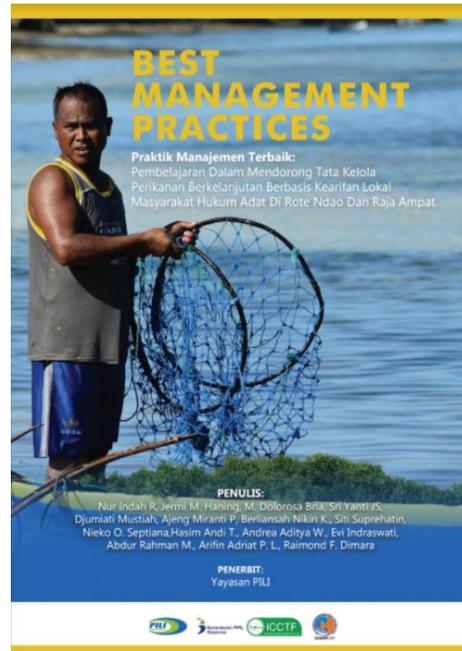
### Output 3.4.

## Modul Monitoring dan Evaluasi BMPs



BMP tentang Pengakuan KMHA

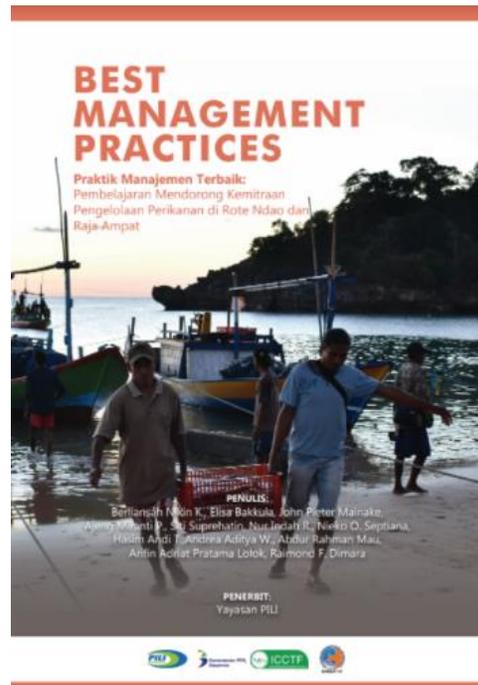
BMP tentang RBFM



### BMP tentang RPP



### BMP tentang Kemitraan



Lampiran 4. Dokumen lainnya yang dihasilkan  
Draf Perdes Oelua

Draf Perdes Sotimori

LOGO	<b>PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO KECAMATAN LOAHOLU DESA OELUA</b>
PERATURAN DESA ..... NOMOR ..... TAHUN 2021	
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN HOBOLOK PAPADAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DESA OELUA KECAMATAN LOAHOLU KABUPATEN ROTE NDAO	
DENGAN RAHMAT TUJAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA OELUA	
Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa sumberdaya perikanan dan kelautan perlu dimanfaatkan secara lestari</li> <li>b. Bahwa dalam pengelolaan sumberdaya perikanan perlu keterlibatan masyarakat lokal.</li> <li>c. Bahwa dalam upaya meningkatkan stok sumberdaya perikanan di perairan Desa Oelua dipandang perlu untuk pengakuan dan pencatatan Hobolok/Papadak dalam Peraturan Desa.</li> <li>d. Bahwa tugas dan pelaksanaan Hobolok/Papadak merupakan tanggung jawab manuholo selaku pengawas berbasah adat.</li> </ul>
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.</li> <li>5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan atau Perusakan Laut</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</li> <li>9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan</li> </ul>

LOGO	<b>PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO KECAMATAN LANDU LEKO DESA SOTIMORI</b>
PERATURAN DESA SOTIMORI NOMOR ..... TAHUN 2021	
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN HOBOLOK PAPADAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DESA SOTIMORI KECAMATAN LANDU LEKO KABUPATEN ROTE NDAO	
DENGAN RAHMAT TUJAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SOTIMORI	
Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa sumberdaya perikanan dan kelautan perlu dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan</li> <li>b. Bahwa dalam pengelolaan sumberdaya perikanan perlu keterlibatan masyarakat lokal.</li> <li>c. Bahwa dalam upaya meningkatkan ketersediaan sumberdaya perikanan di perairan Desa Sotimori dipandang perlu untuk pengakuan dan penerapan Hobolok/Papadak dalam Peraturan Desa.</li> <li>d. Bahwa tugas dan pelaksanaan Hobolok/Papadak merupakan tanggung jawab manuholo selaku pengawas berbasah adat.</li> </ul>
Mengingat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li> <li>2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.</li> <li>5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan atau Perusakan Laut</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</li> <li>9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang</li> </ul>

## Draf Perkam Mutus

DRAFT PERATURAN KAMPUNG MUTUS Minggu, 24 Oktober 2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusaha kios yang menjual 5 bahan pokok: Retribusi Kampung Rp 300.000,-</li> <li>2. Pengusaha kios yang menjual 5 bahan pokok dan ada usaha lain: Retribusi Kampung Rp 500.000,-</li> <li>3. Setiap pengusaha minyak subsidi: Retribusi Kampung Rp 500.000,-</li> <li>4. Pengusaha hasil laut, pengumpul: Retribusi Kampung Rp 2.000,-/kg</li> <li>5. Anak pribumi/Mutus yang mendatangkan pengusaha Bagan/pengusaha lain wajib mengikuti peraturan kampung yang sudah ada/ditetapkan</li> <li>6. Setiap pengusaha Bagan wajib memiliki ijin resmi Pemerintah Kampung Mutus</li> <li>7. Retribusi pengusaha bagan sebesar Rp 10.000.000,-/bulan gelap dengan pembagian: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Kampung Rp 1.000.000,-</li> <li>b. Bemukam Rp 1.000.000,-</li> <li>c. Gereja Rp 1.000.000,-</li> <li>d. Masyarakat Rp 6.000.000,-</li> <li>e. Pokmaswas Rp 1.000.000,-</li> </ul> </li> <li>8. Pengusaha Bagan dan pengusaha hasil laut lainnya sebelum beroperasi di wilayah kampung wajib bayar sebelum melakukan aktifitas</li> <li>9. Minimal bagan yang beroperasi di Kawasan Mutus tidak lebih dari 3</li> <li>10. Bagan yang diperbolehkan di Kawasan hanya 5 GT ke bawah</li> <li>11. Setiap bagan yang di Kawasan Mutus bersedia menerima setiap anggota pokmaswas untuk jaga dan mencatat hasil yang ditangkap selama bulan gelap dan juga untuk mengawasi hasil tangkapan seperti "jin tangkap momar berarti momar saja yang lain tidak" dan bersedia membayar 1x pengajam Rp 150.000,-</li> <li>12. Setiap pengusaha yang tidak memiliki ijin dan mengambil hasil di Kawasan, apabila didapatkan segera diproses dengan 3 tungku.</li> <li>13. Setiap kapal yang sandar di Pelabuhan bayar retribusi per jam Rp 50.000,-</li> <li>14. Pengambilan material bangunan seperti pasir dan batu tidak diperbolehkan ambil dalam Kampung Mutus. Apabila didapatkan akan diproses 3 tungku.</li> <li>15. Pengambilan material bangunan pasir dan batu untuk proyek: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasir: Rp 600.000,-</li> <li>b. Batu: Rp 700.000,-</li> </ul> </li> <li>16. Yang belum ada tentang perikanan berkelanjutan ditambahkan untuk Mas Andi dan teman-teman ketika sampai Mutus.</li> </ul>

### **Berangkat dari Adat:**

Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu - Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat - Provinsi Papua Bara.

Di Tahun 2011, TNC Savu Sea mencatat seluas 5.019,53 ha. mangrove dan 5.320,62 ha. lamun terdapat di kawasan TNP Laut Sawu, dengan area terluas berada di Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao.

Hasil monitoring berdasar Panduan EKPP3K- BKKPN Kupang dan KepMenKP No. 6/Kepmen-KP/ 2014 , menunjukkan bahwa tekanan dan praktik penangkapan dan eksploitasi SDA laut yang merusak telah berdampak pada kelestarian ekosistem laut dangkal di TNP Laut Sawu (terutama mangrove, lamun, dan terumbu karang). Lain halnya dengan kondisi ekologis Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat di Distrik Waigeo Barat, Kab. Raja

Ampat, Prov. Papua Barat masih tergolong baik, karakteristik fisik perairan Kepulauan Raja Ampat sangat mendukung kehidupan biota perairan khususnya terumbu karang. Mengidentifikasi dan memperkuat praktik kelola sumber daya pesisir dan perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat (*indigenous people right*) di wilayah TNP Laut Sawu, Prov.

Nusa Tenggara Timur dan SAP Kep. Raja Ampat, Prov. Papua Barat, menjadi krusial dan penting untuk dilakukan.

Dengan menargetkan lima sasaran dan sepuluh kegiatan utama, PILI melalui dukungan Program Hibah COREMAP-CTI, World Bank, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) telah berhasil mencapai ke-lima dan sepuluh kegiatan utama tersebut dalam sajian BAB 3

INFOGRAFIS HASIL PROGRAM